

Kehidupan Nelayan

Lintas Batas

Di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur

Direktorat
Kebudayaan

Riana Dyah Prawitasari
I Gusti Ayu Armini
I Made Satyananda



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BALI
TAHUN 2017

500 KIH
K

**KEHIDUPAN NELAYAN LINTAS BATAS
DI KABUPATEN ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Oleh :

Riana Dyah Prawitasari

I Gusti Ayu Armini

I Made Satyananda

**Kehidupan Nelayan Lintas Batas di Kabupaten Rote Ndao
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

© Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali

Oleh :

Riana Dyah Prawitasari

I Gusti Ayu Armini

I Made Satyananda

Disain cover : KEPEL COM ART

Layout & setting : KEPEL COM ART

Diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali
Jalan Raya Dalung Abianbase Nomor 107 Dalung, Kuta Utara,
Badung, Bali 80361

Telepon (0361) 439547 Faksimile (0361) 439546

Laman: <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbbali/>

Posel : bpnbbali@gmail.com

Cetakan Pertama, Desember 2017

ISBN : 978-602-7961-15-9

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis dari penulis
dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya tulisan tentang Kehidupan Nelayan Lintas Batas di Kabupaten Rote Ndao telah selesai dilaksanakan dengan baik.

tulisan tentang Kehidupan Nelayan Lintas Batas di Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, NTB, NTT Tahun Anggaran 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan sosial budaya dan ekonomi, perubahan sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial budaya dan ekonomi nelayan lintas batas di Desa Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penelitian ini dapat terlaksana atas perhatian, bantuan dan kerjasama Balai Pelestarian Budaya Bali, NTB, NTT dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao, Kantor Kecamatan Rote Barat Laut, Kantor Desa Oelua untuk itu kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Kepala Dinas Budpar Kabupaten Rote Ndao beserta staf, Kepala Desa Oelua beserta staf dan penduduk desa Oelua, dusun Oelaba, informan yang telah membantu penelitian.

Kami sangat menyadari, bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang membangun demi

kesempurnaannya akan kami terima. Kami berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Denpasar, September 2017
Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya
Bali, NTB, NTT

I Made Dharma Suteja, S.S., M.Si
NIP. 197106161997031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Ruang Lingkup	7
E. Tinjauan Pustaka	8
Konsep	8
Pengertian Kehidupan	8
Pengertian Nelayan	9
Pengertian Lintas Batas	9
Teori	12
Tinjauan Penelitian Sebelumnya	13
F. Metode Penelitian	14
G. Manfaat Penelitian	15
BAB II DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN	17
A. Kondisi Geografi	17
1. Letak dan Batas Administrasi	17
2. Luas dan Jenis Penggunaan Lahan	20
B. Kondisi Demografi	22

1.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk	22
2.	Pendidikan	24
3.	Mata Pencaharian	25
4.	Agama	28
C.	Latar Belakang Sejarah dan Budaya	29
1.	Latar Belakang Sejarah	29
2.	Budaya Masyarakat	41
BAB III KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI NELAYAN LINTAS BATAS SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN		51
A.	Kehidupan Sosial Budaya Nelayan	53
1.	Tingkat Pendidikan Nelayan	54
2.	Sistem Keekerabatan	58
B.	Kehidupan Ekonomi Nelayan	60
1.	Pendapatan Nelayan	63
BAB IV PERUBAHAN SOSIAL NELAYAN LINTAS BATAS DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN WILAYAH		69
A.	Kehidupan Nelayan Lintas Batas Sebelum Pemekaran Wilayah	69
B.	Pemekaran Wilayah Kabupaten Rote Ndao	76
C.	Pembangunan Setelah Pemekaran Wilayah Kabupaten Rote Ndo	80
D.	Kehidupan Nelayan Pelintas Batas Setelah Pemekaran Wilayah	88
BAB V PENUTUP		103
A.	Simpulan	103
B.	Saran dan Rekomendasi	106
DAFTAR PUSTAKA		109
DAFTAR INFORMAN		113

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki laut seluas 5, 8 juta km² yang terdiri dari laut nusantara seluas 2,3 juta km², perairan teritorial seluas 0,8 juta km², perairan ZEE seluas 2,7 juta km² dan panjang garis pantai 95.181 km (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2009:1). Data tersebut menunjukkan Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang relatif besar.

Beberapa wilayah provinsi di Indonesia merupakan kepulauan seperti Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah kajian Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, NTB dan NTT memiliki wilayah kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau relatif besar seperti pulau Flores, pulau Sumba, pulau Timor, pulau Alor yang dikenal Flobamora dan pulau-pulau kecil disekitarnya seperti pulau Rote (foto 1), pulau Ndao, pulau Sabu, dan sebagainya.



Foto 1. Peta Pulau Rote, sumber: wikipedia

Kabupaten Rote Ndao adalah kabupaten yang terletak paling selatan di provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Perairan Indonesia bagian selatan merupakan batas perairan terpanjang dengan negara Australia, Papua Nugini dan Timor Leste.

Sebelum pemekaran (tahun 2002), kondisi kabupaten Rote Ndao relatif terisolasi karena sangat bergantung armada kapal yang mampu beroperasi selama musim angin barat, sedangkan jumlah kapal terbatas. Mobilitas warga, barang maupun jasa menjadi terhalang selama musim barat. Keterbatasan ini menyebabkan harga-harga bahan pokok juga menjadi semakin tinggi. Transportasi udara atau pesawat terbang belum beroperasi karena belum ada bandara.

Kabupaten Rote Ndao dibentuk sejak tahun 2002 merupakan wilayah pemekaran dari kabupaten Kupang. Pada awalnya kabupaten ini hanya memiliki enam kecamatan kemudian **Program** Percepatan Pembangunan **Sanitasi** Permukiman (PPSP) berkembang menjadi delapan kecamatan yang terdiri dari tujuh kelurahan dan 73 desa (keseluruhan 80 kelurahan atau desa). Pada tahun 2012 mengalami pemekaran kembali bertambah menjadi 10 kecamatan yang terdiri dari 89 desa atau kelurahan (ppsp.nawasis.info/sanitasi/pokja/kab.rotendao/bab1 diakses tanggal 6 januari 2017). Perkembangan yang relatif pesat terjadi dalam hal otonomi daerah. Pemekaran wilayah Rote Ndao sebelumnya

kecamatan menjadi kabupaten menyebabkan wilayah ini menjadi berkembang dengan pesat dan relatif lebih ramai dibandingkan sebelum pemekaran. Fasilitas-fasilitas kota kabupaten dibangun di Kecamatan Lobalain sebagai ibukota kabupaten dari kantor bupati, kompleks perkantoran seperti kantor DPRD dan Dinas Budpar (foto 2 dan 3).



Foto 2 dan 3. Kantor DPRD dan Dinas Budpar kabupaten Rote Ndao

Sumber: dokumentasi peneliti tahun 2017

Luas wilayah kabupaten ini sekitar 1.280,10 km² terdiri dari 96 pulau dan hanya 7 pulau yang berpenghuni yaitu pulau Rote sebagai pulau yang paling besar dan pulau-pulau kecil berpenghuni lain yaitu pulau Ndao, pulau Nuse, pulau Landu, pulau Do'o, pulau Usu dan Pulau Ndana. Diantara pulau-pulau yang berpenghuni tersebut, pulau yang paling luas wilayahnya adalah pulau Rote seluas 97854 hektar, kemudian pulau Usu seluas 1940 hektar, dan pulau Ndana seluas 1383 hektar, sedangkan pulau-pulau lainnya kurang dari 1000 hektar (Kabupaten Rote Ndao dalam Angka Tahun 2016).

Kabupaten Rote Ndao beribukota kabupaten di Kota Baa, kota ini terletak di kecamatan Lobalain. Selain menjadi pusat pemerintahan kota kabupaten, pelabuhan Baa dan bandara (Foto 4 dan 5) juga ada di kecamatan ini, dengan demikian fasilitas

perkotaan yang ada di kecamatan ini sudah relatif lengkap sehingga relatif ramai dibandingkan kecamatan lain. Kecamatan Lobalain juga merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi 30550 jiwa dibandingkan kecamatan lain, diikuti kemudian kecamatan Rote Barat Laut berjumlah 27864 jiwa (Kabupaten Rote Ndao dalam Angka Tahun 2016).



Foto 4 dan 5. Pelabuhan Baa dan Bandara, sumber: dokumentasi peneliti tahun 2017

Berdasarkan kondisi geografis yang digambarkan, Kabupaten Rote Ndao, selain memiliki potensi daratan, juga terutama memiliki potensi bahari yang relatif besar. Pulau Rote memiliki sejumlah pantai yang eksotik, beberapa di antaranya merupakan kawasan surfing terbaik dunia, yakni Pantai Nembrala dan Pantai Boa. Sektor perikanan Kabupaten Rote Ndao mempunyai sumberdaya alam perairan yang cukup besar.

Pada tahun 2013, penduduk di kabupaten ini sebagian besar yaitu 80% memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak sedangkan 20% dari seluruh penduduk memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, pegawai negeri sipil, pedagang, dan lain-lain (www.rotendaokab.go.id diakses tanggal 7 Januari 2016). Di Kecamatan Rote Barat Laut umumnya juga sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani, sedangkan

di beberapa desa di kecamatan ini merupakan desa yang terletak di pinggir pantai berbatasan langsung dengan laut seperti desa Oelua, desa Netenaen sebagian besar penduduk nelayan. Desa Oelua sebagai satu desa yang mewakili kecamatan dalam lomba desa tingkat kabupaten karena memiliki sistem administrasi yang relatif baik dibandingkan desa lain.

Potensi kelautan yang dimiliki kabupaten Rote Ndao khususnya dan Indonesia umumnya tersebut seharusnya dapat mensejahterakan kehidupan para nelayan di daerah tersebut, namun kenyataannya masih relatif banyak nelayan yang belum dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari atau pra sejahtera sehingga relatif banyak nelayan yang melintasi batas negara untuk mendapatkan hasil tangkapan lebih banyak.

Nelayan Indonesia yang berlayar sampai ke luar batas negara sudah berlangsung sejak dahulu, mereka disebut nelayan pelintas batas. Bukti nelayan Indonesia sampai ke negara lain ditemukan di pulau Tengah (Middle East Island) yang termasuk gugus pulau Pasir (Ashmore Reef Island) terdapat makam nenek moyang nelayan dari Nusa Tenggara Timur, sedangkan di bagian selatan pulau terdapat makam yang diperkirakan makam nelayan dari Madura (Indrawasih, dkk. 2010:54).

Nelayan dari pulau Rote menganggap pulau Pasir sebagai halaman belakang rumah mereka karena letaknya relatif dekat sekitar 150 km atau 78 mil laut sedangkan letak dari Australia relatif lebih jauh sekitar 190 mil laut. Nelayan berkunjung ke makam nenek moyang mereka yang dikuburkan di pulau ini. Pulau Pasir terkenal kaya teripang, lola, hiu, dan berbagai jenis ikan lain. Pulau ini juga merupakan sumber air tawar bagi para nelayan dan tempat berlindung dari badai, tempat beristirahat sambil menunggu arah angin membawa kembali ke tempat asal para nelayan.

Sirip hiu, teripang, penyu telah menjadi produk perdagangan bagi Suku Bugis, Makasar, Bajo dan Buton sejak 500 tahun yang lalu (Fox, 2000 dalam Henuk, 2008: 109). Sejak tahun 1974 sudah ada nelayan Indonesia yang ditangkap karena eksploitasi sumberdaya

laut AFZ. Pada tanggal 16 Agustus 1983 pulau Pasir menjadi cagar alam nasional oleh Australia. Pada tahun 1995 ada dua perahu membawa pengungsi dari Afganistan dan Turki. Pada tahun 1999 ada 47 kapal membawa 1398 orang menjadikan karang Ashmore sebagai pintu masuk ke Australia (Henuk, 2008: 90-91).

Pada tahun 1957 pemerintah Indonesia telah mengumumkan dan selanjutnya Undang-undang No.4 Tahun 1960 menyatakan bahwa wilayah perairan Indonesia sepanjang 12 mil dari garis yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau di Indonesia. Undang-undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif ditetapkan (Kompas, 28 Mei 2005 dalam Indrawasih dan Wahyono, 2010:56).

Pemekaran wilayah, perkembangan teknologi, modernisasi dan globalisasi dewasa ini akan mempengaruhi kehidupan nelayan pelintas batas di Indonesia umumnya dan khususnya di wilayah kabupaten Rote Ndao. Demikian pula dengan adanya perhatian dan kebijakan pemerintah yang semakin besar terhadap para nelayan di Indonesia melalui kementerian kelautan dan perikanan.

B. RUMUSAN MASALAH

Kondisi geografis kabupaten Rote Ndao yang merupakan kepulauan kecil terluar sangat bergantung dengan kondisi cuaca dalam transportasi udara dan laut, apabila cuaca ekstrim, angin kencang dan hujan deras seringkali pelayaran maupun penerbangan ditunda sampai cuaca memungkinkan. Kondisi ini menyebabkan daerah Rote Ndao sangat bergantung kepada keadaan alam yang mempengaruhi logistik atau kebutuhan bahan pokok sehari-hari yang diperlukan warga. Selain itu kondisi cuaca juga sangat mempengaruhi kehidupan nelayan karena hasil tangkapan akan berkurang. Menurut Satria (2009: 336), nelayan menghadapi sumber daya yang tidak terkontrol, pada saat hasil tangkapan berkurang harus mencari lahan yang baru

Kondisi teknologi penangkapan ikan, kualitas sumberdaya manusia yang kurang, semakin berkurangnya sumber daya

perikanan di daerah, perlindungan dan kebijakan pemerintah terhadap nelayan belum maksimal (Kusnadi, 2007: 1). Nelayan yang ada di desa Oelua, kecamatan Rote Barat Laut merupakan nelayan lintas batas yang berlayar ke daerah perbatasan Indonesia Australia. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini:

- 1) bagaimana kehidupan sosial, budaya dan ekonomi nelayan pelintas batas di daerah penelitian
- 2) bagaimana perubahan sosial, budaya dan ekonomi nelayan lintas batas dan faktor-faktor yang mempengaruhi di daerah penelitian sebelum dan setelah pemekaran?

C. TUJUAN PENELITIAN

- 1) untuk mengetahui kehidupan sosial, budaya dan ekonomi nelayan pelintas batas di daerah penelitian
- 2) untuk mengetahui perubahan sosial, budaya dan ekonomi nelayan lintas batas dan faktor-faktor yang mempengaruhi di daerah penelitian sebelum dan setelah pemekaran?

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah ruang lingkup temporal atau dimensi waktu, ruang lingkup spasial atau dimensi ruang dan ruang lingkup material atau dimensi aspek. Ruang lingkup temporal atau dimensi waktu dalam penelitian ini khususnya adalah pemekaran wilayah kabupaten rote ndao pada tahun 2002. Kehidupan nelayan lintas batas di daerah penelitian sesudah pemekaran wilayah akan mengalami perubahan sosial, budaya dan ekonomi dibandingkan sebelum pemekaran.

Ruang lingkup spasial atau dimensi ruang khususnya nelayan lintas batas di Desa Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut. Hal ini disebabkan di desa Oelua terdapat permukiman atau perkampungan nelayan yang melintasi batas wilayah administrasi negara Indonesia. Kabupaten Rote Ndao setelah pemekaran

wilayah mengalami perkembangan dan pembangunan fasilitas-fasilitas perkotaan yang relatif lebih banyak dibandingkan daerah lain.

Ruang lingkup material atau dimensi aspek adalah kehidupan masyarakat nelayan khususnya sosial, budaya dan ekonomi, perubahan sosial budaya dan ekonomi serta faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya dan ekonomi tersebut.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep

Pengertian Kehidupan

Kehidupan adalah seluruh aktivitas yang menunjang selama hidup sehari-hari manusia. Aktivitas tersebut meliputi aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, aktivitas budaya, aktivitas politik dan sebagainya. Dalam penelitian ini kehidupan yang dibahas adalah kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.

Dalam relasinya dengan waktu, sejarah dikaji mengenai perkembangan, kesinambungan, pengulangan dan perubahan. Perkembangan menyangkut segala bentuk gerak perubahan masyarakat berturut-turut dan bertahap menuju bentuk masyarakat atau bangsa yang lebih baik dan lebih tinggi tingkat hidupnya. Kesinambungan terjadi apabila generasi baru meneruskan apa yang telah diletakkan generasi. Pengulangan terjadi apabila yang pernah terjadi pada masa lalu terjadi lagi kemudian. Perubahan dipergunakan untuk menunjuk suatu perkembangan yang sifatnya lebih cepat dan lebih besar (Daliman, 2012: 9).

Konsep sistem dan pendekatan sistem terutama digunakan sebagai sarana untuk memudahkan proses analisis dan sintesis terutama menunjukkan adanya hubungan antara unsur-unsur atau dimensi-dimensi bagaimana saling mempengaruhi antara faktor ekonomi, politik, sosial dan kultural (Daliman, 2012: 9).

Penelitian ini akan membahas kehidupan sosial dalam hal pendidikan, kehidupan budaya yang berkaitan dengan mata pencahariannya serta kondisi ekonomi yaitu pendapatan nelayan.

Pengertian Nelayan

Menurut UU no. 31 tahun 2004 tentang perikanan, nelayan adalah orang yang mata pencaharian melakukan penangkapan ikan. Fathoni (2006:51) mengemukakan bahwa nelayan mengetahui teknologi pembuatan perahu, mengetahui cara navigasi laut, mempunyai organisasi sosial yang menampung pembagian kerja nelayan, pemilik perahu dan tukang pembuat perahu, sistem religi mengandung unsur keyakinan, upacara yang berkaitan dengan persepsi dan konsepsi laut.

Penelitian ini khusus untuk para nelayan yang melintasi batas administrasi pemerintah Indonesia. Nelayan di daerah penelitian yang sebagian besar mencari hasil laut atau perikanan di Pulau Pasir atau *Ashmore Reef* yang merupakan wilayah pemerintah Australia.

Pengertian Lintas Batas

Lintas artinya lalu dengan cepat, melintas diartikan lalu dengan cepat, menyeberang sedangkan batas artinya garis atau sesuatu yang ditentukan tidak boleh dilampaui (Poerwadarminta: 709 dan 105). Dalam penelitian lintas diartikan sebagai melintasi yang sama dengan melalui atau melewati. Para nelayan melintasi atau melalui batas yaitu garis yang tidak boleh dilampaui, tidak boleh dilampaui atau dilewati ini bukan dimaksudkan tidak boleh dilewati sama sekali namun boleh dilewati jika mempunyai ijin yang diperlukan dan sesuai pengaturan maritim Indonesia Australia (Foto 6).



Foto 6. Peta pengaturan maritim Australia dan Indonesia

sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT

Para nelayan harus mempunyai ijin yang sah atau resmi yang dibutuhkan untuk melewati batas administratif negara lain. Sebelum berlayar nelayan akan mengurus ijin yang diperlukan melalui dinas kelautan dan perikanan kabupaten Rote Ndao. Setelah surat ijin berlayar dan melintasi perbatasan diberikan nelayan baru dapat melaut.

Surat tersebut berisi nama kapal, bendera kebangsaan (negara asal), tonase kotor atau berat kapal, nama nakhoda, tempat bertolak, jumlah awak kapal, pelabuhan tujuan, jenis muatan, tempat diterbitkan surat, tanggal terbit surat, surat ditandatangani oleh Syahbandar atau kepala pelabuhan asal kapal.

Kedatangan dan keberangkatan kapal juga harus dilaporkan dalam bentuk laporan kedatangan dan keberangkatan kapal. Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal untuk pemerintah Indonesia dalam bentuk tabel yang diketik komputer (foto 7).

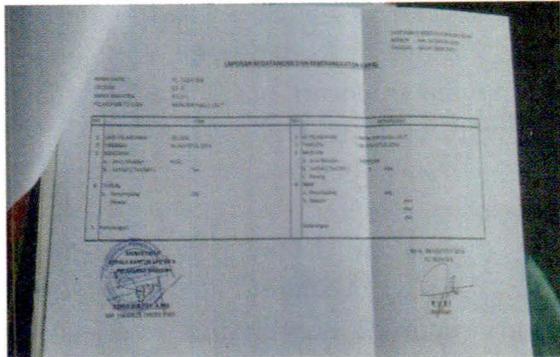


Foto 7. Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal di Indonesia

Sumber: dokumentasi peneliti tahun 2017

Laporan tersebut berisi nama asal pelabuhan tiba, tanggal kedatangan, jenis muatan, jumlah muatan (ton/m³) pada saat bongkar dan jumlah penumpang dan hewan yang turun pada saat tiba. Pada saat berangkat disebutkan tujuan misalnya mencari hasil laut, tanggal kedatangan, jenis muatan dan jumlahnya (ton/m³), jumlah penumpang dan hewan yang naik. Laporan ditandatangani oleh Kepala UPP Pelabuhan Baa dan nakhoda kapal.

Pemerintah Australia melalui Australian Customs Service (ACV) mengharuskan laporan kedatangan dan keberangkatan kapal dalam bentuk buku dan secara manual atau tulis tangan (foto 8), tidak seperti laporan kedatangan dan keberangkatan kapal yang dikeluarkan pemerintah Indonesia seperti diatas.

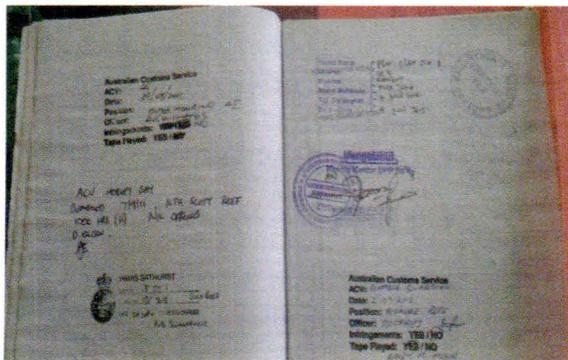


Foto 8. Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal di Australia

Sumber: dokumentasi peneliti tahun 2017

Dalam buku laporan tersebut mencakup lokasi ACV, tanggal, posisi, petugas, infringement dan rekaman yang menjelaskan bahwa kapal diijinkan mencari hasil laut di wilayah Australia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perubahan sosial. Menurut Soekanto (2005:103), perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat.

Perubahan sosial merupakan ciri khas masyarakat dan kebudayaan, dalam masyarakat tradisional perubahan sangat lambat sedangkan dalam masyarakat modern perubahan sangat cepat (Simandjuntak, 2007:1). Menurut Parson dalam Ritzer, dkk (2004:371) masyarakat akan berkembang melalui tiga tingkatan utama 1. primitif, 2. *intermediate* dan 3. modern yang kemudian berkembang menjadi lima tingkatan evolusi sosial, *advanced* primitif dan *archaic*, *historic intermediate* dan *seedbed societies*.

Perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain-lain (Soekanto, 2007: 259). Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat misalnya perubahan unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis atau kebudayaan (Soekanto, 2007: 262).

Teori perubahan sosial dalam penelitian ini untuk mengetahui kehidupan sosial, budaya dan ekonomi nelayan pelintas batas yang ada di kabupaten Rote Ndao. Kehidupan nelayan pelintas batas akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan teknologi, modernisasi dan globalisasi pada saat ini.

Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Tulisan Brooke (2011) berjudul “*Ekonomi Politik Masyarakat Nelayan Skala Kecil: Sebuah Studi Perbandingan Masyarakat Pendatang di Rote Ndao dan Jawa Timur*”, penelitian mengenai hutang piutang nelayan, hubungan antara nelayan dan pemilik perahu, keterlibatan pemerintah dalam persoalan keluarga nelayan dan peranan perempuan dalam masyarakat. Penelitian menunjukkan nelayan di Pepela dan sekitarnya hidup dalam tingkat ekonomi yang jauh dari kemakmuran. Di Papela, So’ao dan Tanjung Pasir, masyarakat nelayan hidup dalam kemiskinan dan kesenjangan antara pemilik perahu dan nelayan.

Dalam penelitian Brooke daerah penelitian di Desa Papela, So’ao dan Tanjung Pasir yang termasuk wilayah kecamatan Rote Timur, sedangkan dalam tulisan ini peneliti mengambil daerah penelitian di desa Oelua, kecamatan Rote Barat Laut, terdapat perbedaan daerah penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah sedangkan Brooke menggunakan metode penelitian antropologi.

Indrawati, dan Wahyono (2010), dalam *Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. menulis Kerjasama Bilateral dalam Kerangka Penyelesaian Masalah Nelayan Pelintas Batas Perairan Indonesia – Australia* menyebutkan pemerintah Australia dan Indonesia perlu mengupayakan kegiatan kerjasama pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan kemampuan nelayan guna memperbaiki pendapatan melalui pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan serta sosialisasi intensif kepada nelayan lintas batas tentang batas wilayah perairan AFZ dan jenis sumber daya yang dapat diakses atau diambil nelayan Indonesia.

Nelayan Indonesia dalam *Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum* karangan Retnowati (2011) dalam *Perspektif Volume XVI No 3 Tahun 2011 Edisi Mei*, menyebutkan dari sisi ekonomi pendapatan nelayan masih sangat rendah sehingga mereka miskin karena keterbatasan modal, skill, adanya tekanan dari pemilik modal, bagi hasil tidak

adil, perdagangan atau pelelangan ikan tidak transparan, tidak ada regulasi yang tepat, otoritas pemerintah lemah, budaya kerja tradisional. Kondisi demikian juga terjadi di daerah penelitian, meskipun ada beberapa perbedaan misalnya permasalahan hukum yang masih terjadi adanya nelayan Indonesia yang bermasalah dengan pemerintah Australia.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah meliputi heuristik atau pengumpulan sumber sejarah, kritik sumber atau verifikasi, interpretasi dan historiografi (Abdurrahman, 2011:104). Sumber sejarah tertulis primer dalam penelitian sejarah adalah sumber yang disampaikan saksi mata berbentuk dokumen, catatan rapat, arsip laporan pemerintah. Sumber lisan primer wawancara langsung dengan pelaku sejarah, saksi mata. Berita di koran, buku, internet adalah sumber tertulis sekunder (Abdurrahman, 2011:104).

Dalam penelitian ini juga akan menggunakan sumber tertulis dan lisan baik primer maupun sekunder. Wawancara mendalam dilakukan dengan menentukan saksi atau pelaku peristiwa kunci dan saksi atau pelaku peristiwa lainnya. Wawancara sesuai dengan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian, dalam penelitian ini khususnya perubahan sosial, budaya dan ekonomi kehidupan nelayan lintas batas di desa Oelua, kecamatan Rote Barat Laut, kabupaten Rote Ndao. Dalam wawancara dilakukan dengan perekaman dan pencatatan.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang telah direkomendasikan oleh kepala desa Oelua sebagai salah satu informan kunci. Beliau memilih 30 orang dari penduduk desa Oelua dan khususnya dari dusun Oelaba yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan lintas batas yang telah berpengalaman melaut sampai ke Pulau Pasir. Para informan tersebut menjadi peserta *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mengumpulkan data sosial, budaya, ekonomi, perubahan

sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial (seluruh data yang terkait dengan penelitian). Dalam FGD tim peneliti dapat mengamati informan yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan luas dari keaktifan diskusi. Informan yang memiliki pengetahuan tersebut menjadi informan kunci. Tim peneliti melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan kunci.

Kritik atau verifikasi sumber untuk menguji asli tidaknya sumber dengan mengetahui kapan dan dimana sumber dibuat, siapa yang membuat sumber, dari bahan apa sumber dibuat dan apakah sumber dalam bentuk asli (Abdurrahman, 2011:109). Setelah melakukan kritik sumber langkah selanjutnya adalah interpretasi sejarah. Menurut Daliman (2012:81), interpretasi berarti menafsirkan atau memberi makna fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah karena merupakan saksi-saksi bisu yang tidak dapat berbicara.

Semua fakta yang diperoleh melalui metode kritik dapat dipahami hubungannya satu sama lain secara signifikan setelah ditulis utuh historiografi yang diartikan penulisan sejarah. Dalam penulisan sejarah digunakan secara bersamaan bentuk teknis dasar deskripsi, narasi dan analisis (Tosh, 1985:95 dalam Sjamsuddin, 2012: 123). Penulisan deskriptif berusaha membentangkan masa lampau tanpa memberikan dimensi perubahan waktu. Fakta-fakta tersusun dalam suatu kesatuan seperti fakta geografis dalam peta. Penulisan deskriptif biasanya dipergunakan untuk menggambarkan bentuk struktur kelembagaan atau kehidupan masyarakat dalam periode waktu tertentu (Daliman, 2012: 108). Dengan demikian kehidupan nelayan lintas batas di Rote Ndao juga menggunakan penulisan deskriptif.

G. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi kehidupan sosial, budaya, ekonomi nelayan lintas batas di daerah penelitian bagi masyarakat umumnya, khususnya bagi masyarakat desa

nelayan. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bahan kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

BAB II

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

A. KONDISI GEOGRAFI

1. Letak dan Batas Administrasi

Kabupaten Rote Ndao adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Secara geografis Kabupaten Rote Ndao terletak pada $10^{\circ} 25' - 11^{\circ} 15'$ Lintang Selatan dan $121^{\circ} 49' - 123^{\circ} 40'$ Bujur Timur (Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka Tahun 2016). Wilayah kabupaten ini merupakan suatu kepulauan yaitu Pulau Rote dan pulau-pulau kecil disekitarnya yaitu pulau Ndao, pulau Ndana, pulau Usu, pulau Manuk, pulau Landu Ti, pulau Nuse, dan lain-lain.

Pulau-pulau tersebut tidak seluruhnya berpenghuni atau didiami masyarakat namun ada beberapa pulau yang kosong atau tidak berpenghuni. Pulau yang berpenghuni adalah pulau Rote, pulau Ndao, pulau Nuse, pulau Landu Ti, pulau Usu sedangkan pulau lainnya belum berpenghuni. Pulau Ndana yang terletak di sebelah barat Pulau Rote tidak berpenghuni namun dijaga oleh beberapa personil Danlanal sebagai penjaga perbatasan. Pulau ini tidak boleh sembarangan dikunjungi nelayan maupun masyarakat umum.

Pulau Rote merupakan pulau relatif kecil yang diapit pulau Timor di sebelah timur laut dan pulau Sumba di sebelah barat. Kabupaten Rote Ndao berada di sebelah selatan kota Kupang sebagai ibukota provinsi. Dari kota Kupang ke pulau Rote dapat dicapai melalui laut dengan kapal laut dan udara dengan pesawat terbang. Perjalanan dengan kapal ferry dapat ditempuh sekitar 4 jam sedangkan dengan kapal cepat dapat dicapai dalam waktu sekitar 2 jam. Kapal ferry berlabuh di dermaga yang ada di pelabuhan ferry di Pantai Baru sedangkan kapal cepat berlabuh di pelabuhan Baa. Pantai Baru ke pusat pemerintahan kabupaten Rote Ndao jaraknya relatif jauh sekitar 60 km sedangkan pelabuhan Baa ke pusat pemerintahan relatif lebih dekat hanya sekitar 3 km. Bandara terletak relatif paling dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten hanya kurang lebih 2 km.

Jadwal kapal ferry yang menuju pulau Rote hanya sekali sehari demikian juga dengan penerbangan ke Rote, sedangkan kapal cepat sudah dua kali sehari. Selain kapal ferry dan kapal cepat juga ada kapal jarak jauh dari Surabaya ke Maluku yaitu kapal Awu yang berlabuh di pelabuhan Baa dua minggu sekali untuk mengangkut kebutuhan sehari-hari seperti bahan pokok dan lainnya.

Balint (2005) menegaskan sudah ratusan tahun nelayan Indonesia mencari ikan, teripang, dan biota laut di sekitar pulau Pasir, bahkan mereka berkebudayaan dan ada makam di atas pulau. Pada tahun 1729 empat orang raja dipimpin Foe Mbura berlayar menuju Batavia tetapi mereka terbawa arus dan angin ke selatan dan terdampar di Pulau Pasir. Foe Mbura kemudian menancapkan tongkat dan mengukir namanya, diidentifikasi dalam prasasti Belanda yang menyebut Raja Thie terdampar di pulau tahun 1729 (Pos Kupang, Senin 20 November 2006 dalam Henuk, 2008: 4).

Orang Rote menyebut pulau Pasir *nusa solokaek* terletak sekitar 78 mil laut atau sekitar 150 km dari garis pantai pulau Rote dan 190 mil dari laut Australia. Dari pelabuhan Pepela Rote Timur, perjalanan ke pulau Pasir menggunakan perahu layar dapat ditempuh sekitar 8-9 jam sedangkan apabila menggunakan

perahu bermotor dapat ditempuh dalam waktu sekitar 3 – 4 jam. Gugusan Pulau Pasir (*Ashmore Reef*) meliputi pulau Pasir, pulau Baru (*Cartier Island*), pulau Dato (*Scott Reef*) pulau Seringapatan (*Seringapatam Reef*) dan pulau Broselam (*Browse Island*) (Timor Ekspres, Jumat 13 Oktober 2006:4 dalam Henuk, 2008: 10)

Secara administratif Kabupaten Rote Ndao terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan yaitu: 1) kecamatan Lobalain, 2) Rote Barat, 3) Rote Barat Laut, 4) Rote Barat Daya, 5) Ndao Nuse, 6) Rote Selatan, 7) Rote Tengah, 8) Rote Timur, 9) Pantai Baru dan 10) Landu Leko (Foto 9). Kabupaten Rote Ndao terdiri dari 5 (lima) kelurahan dan 112 desa. Batas-batas administrasi kabupaten Rote Ndao sebelah utara berbatasan dengan Laut Sawu, sebelah selatan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Selat Pukuafu dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Sawu (Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka Tahun 2016).



Foto 9. Peta administrasi kecamatan di Kabupaten Rote Ndao

Sumber: Kabupaten Rote Ndao dalam Angka Tahun 2016, BPS Kab. Rote Ndao

Daerah penelitian dipilih desa Oelua karena terdapat perkampungan nelayan di dusun Oelaba, di perkampungan ini juga terdapat dermaga untuk menyimpan kapal-kapal nelayan. Desa Oelua termasuk wilayah kecamatan Rote Barat Laut yang terletak disebelah barat laut ibukota kabupaten. Jarak dari desa Oelua ke kantor kabupaten sekitar 22 km sedangkan jarak desa

dengan pelabuhan Baa sekitar 25 km. Jarak desa Oelua ke kantor kecamatan Rote Barat Laut sekitar 13 km. Jalan dari kabupaten menuju desa ini relatif besar meskipun beberapa km mendekati desa jalan relatif rusak namun masih bisa dilewati kendaraan roda dua dan roda empat. Batas-batas administrasi desa Oelua sebelah utara berbatasan dengan Laut Sawu sebelah selatan dengan desa Tolama dan desa Ingguinak, sebelah timur berbatasan dengan desa Netenaen (foto 10) sebelah barat berbatasan dengan desa Tolama (Monografi Desa Oelua Tahun 2016).



Foto 10. Peta Desa Oelua di Kabupaten Rote Barat Laut

Sumber : Kantor Desa Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut

Letak desa Oelua khususnya dusun Oelaba yang berada langsung di tepi laut tersebut menyebabkan sebagian penduduk desa ini menjadi nelayan.

2. Luas dan Jenis Penggunaan Lahan

Kabupaten Rote Ndao memiliki luas wilayah daratan 1.280,10 Km² (Kabupaten Rote Ndao dalam Angka Tahun 2016) sedangkan kecamatan Rote Barat Laut memiliki luas wilayah 172, 40 km². Diantara seluruh kecamatan yang ada di kabupaten ini wilayah Rote Barat Laut merupakan kecamatan dengan luas wilayah yang ketiga, Kecamatan paling luas wilayahnya adalah kecamatan Landu Leko seluas 194,06 km² diikuti kecamatan Pantai Baru seluas 176,18 km². Dengan demikian kecamatan Rote Barat Laut

memiliki wilayah yang relatif lebih luas dibandingkan kecamatan Lobalain yang menjadi lokasi pusat pemerintahan kabupaten.

Dalam sektor perikanan Kabupaten Rote Ndao mempunyai sumberdaya alam perairan yang cukup besar yakni memiliki luas wilayah lautan 3.353,995 km² dengan panjang garis pantainya mencapai 493 km dan tersebar di semua kecamatan.

Desa Oelua memiliki wilayah seluas 15,50 km² dengan penggunaan lahan sebagian besar sebagai lahan kering seluas 3,95 km², meliputi lahan untuk tegalan 2,0 km², lahan untuk tegal atau kebun seluas 2,0 km², permukiman atau pekarangan, bangunan dan emplasement seluas 1,8 km atau 8,37% dan lahan fasilitas umum seluas 2,6 km² kemudian diikuti lahan untuk hutan lindung seluas 2,5 km² atau 22,87% (tabel 1).

Tabel 1. Jenis Penggunaan Lahan di Desa Oelua Tahun 2016

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (km ²)	Prosentase (%)
1.	Tanah kering	3,95	35,15
2.	Tegal/kebun	2,0	8,37
3.	Pekarangan, permukiman	1,8	7,78
4.	Ladang penggembalaan/pangonan	1,5	16,31
5.	Perkebunan	2,0	8,19
6.	Perkebunan negara	1,2	0,76
7.	Hutan	2,5	22,78
8.	Hutan lebat	1,0	0,76
9.	Hutan belukar	1,0	0,76
10.	Hutan sejenis	0,5	0,76
11.	Sawah Tadah hujan/rendengan	5,2	22,78
12.	Fasilitas umum	2	0,65
13.	Sarana kesehatan	1	0,46
14.	Sarana Pendidikan	8	0,04
15.	Masjid	1,5	0,02
16.	Gereja	5,5	0,04
17.	Lapangan olah raga	2,5	0,04
18.	Taman rekreasi	1	0,01
19.	Kuburan	7,5	0,03
	Jumlah	15,50	100,00

Sumber: Monografi Desa Oelua Tahun 2016

Luas lahan sebagian besar untuk lahan kering tegalan, permukiman dan pekarangan relatif paling luas karena daerah ini merupakan tanah kering sesuai dengan jenis tanah yang ada dan letak desa yang dekat dengan pantai. Desa ini memiliki wilayah yang berada di tepi pantai, jarak kantor desa Oelua ke pantai relatif dekat sekitar 1 km.

Pulau Rote berada di batas paling selatan Indonesia, daerah Rote Ndao memiliki topografi sebagian besar daratan berupa tanah dengan berbatu karang tidak banyak tanaman yang dapat tumbuh subur. Di bagian utara dan selatan pulau ini berupa pantai dengan dataran rendah bagian tengah berupa lembah dan perbukitan, namun tidak ada gunung berapi di pulau ini. Suhu udaranya panas tropis, cocok untuk mereka yang menyukai wisata pantai.

B. KONDISI DEMOGRAFI

1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Penduduk di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2015 berjumlah 147778 orang terdiri dari laki-laki 75292 dan perempuan 72486 orang dengan demikian jumlah penduduk laki-laki relatif lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan (Kabupaten Rote Ndao dalam Angka Tahun 2016).

Jumlah penduduk kecamatan Rote Barat Laut pada tahun 2015 adalah 27684 orang sedangkan penduduk desa Oelua pada tahun 2015 berjumlah 3438 orang yang terdiri dari penduduk laki-laki 1720 orang dan perempuan 1718 orang (Kecamatan Rote Barat Laut dalam Angka Tahun 2016). Pada tahun 2016, penduduk Desa Oelua berjumlah 3057 orang yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 1543 dan perempuan berjumlah 1514 orang. Kepala keluarga yang ada berjumlah 761 kk (Data Monografi Desa Oelua Tahun 2016).

Penduduk desa Oelua dan kecamatan Rote Barat Laut umumnya juga memiliki jumlah penduduk laki-laki yang relatif

lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan seperti juga penduduk kabupaten, hal ini disebabkan penduduk perempuan umumnya mengikuti suami setelah menikah sehingga pindah atau keluar desa. Penduduk yang pindah atau datang ke desa Oelua juga ada, mereka sebagian dari para nelayan yang sudah menetap

Kepadatan penduduk kecamatan Rote Barat Laut pada tahun 2015 yaitu 161,62 jiwa/km² sedangkan kepadatan penduduk kabupaten Rote Ndao yaitu 115,44 jiwa/km² (Kabupaten Rote Ndao dalam Angka Tahun 2016). Di kecamatan Rote Barat Laut, desa yang paling padat penduduknya adalah desa Busalangga yaitu 293 jiwa/km², kemudian diikuti kepadatan penduduk desa Oelua pada tahun 2015 yaitu 221,80 jiwa/km² (Kecamatan Rote Barat Laut dalam Angka Tahun 2016).

Kepadatan penduduk desa Oelua lebih padat dibandingkan kepadatan penduduk kecamatan bahkan kabupaten. Hal ini disebabkan luas wilayah desa Oelua relatif kecil dibandingkan jumlah penduduk sehingga relatif padat. Di desa Oelua juga relatif banyak penduduk pendatang khususnya kaum nelayan yang bertempat tinggal di dusun Oelaba. Hal ini diketahui dari hasil wawancara beberapa informan ada yang berasal dari Alor, Belu, dan sebagainya. Mereka umumnya dari Bugis Bajo sehingga sebagian besar beragama Islam.

Desa Busalangga sebagai desa yang paling padat penduduknya karena sebagai ibukota kecamatan Rote Barat Laut dan menjadi pusat perdagangan di Rote bagian barat. Adanya pasar Busalangga yang buka setiap hari Rabu dan Sabtu yang relatif sangat ramai sebagai pusat jual beli seluruh penduduk Rote. Penduduk pulau Rote akan berbondong-bondong menuju pasar Busalangga untuk menjual hasil bumi dan produksinya, termasuk kerajinan tenun (foto 12). Pasar ini dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.



Foto 12. Pasar Busalangga di kabupaten Rote Barat Laut

Sumber : dokumentasi peneliti tahun 2017

Penduduk desa Oelua juga relatif banyak yang menjual hasil produksinya ke pasar Busalangga. Mereka membawa ikan, gula air, kue-kue dan sebagainya.

2. Pendidikan

Penduduk desa Oelua sebagian besar memiliki tingkat pendidikan tamat sekolah dasar berjumlah 1025 orang (43,45%) diikuti penduduk yang memiliki pendidikan sekolah lanjutan atas (SLTA) berjumlah 575 orang atau 22,65%, penduduk yang buta huruf berjumlah 557 orang atau 21,94% (tabel 2).

Tabel 2. Penduduk Desa Oelua Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	Belum sekolah	450	17,72
2.	Tamat SD	1025	43,45
3.	Tamat SLTP/Sederajat	410	16,15
4.	Tamat SLTA/Sederajat	575	22,65
5.	Tamat PT	40	1,57
6.	Buta huruf	557	21,94
	Jumlah	2539	100,00

Sumber: Monografi Desa Oelua Tahun 2016

Penduduk di desa Oelua sebagian besar memiliki pendidikan yang masih relatif rendah hanya tamat SD berjumlah 1025 orang atau 43,45% dan yang buta huruf 575 orang. Jumlah penduduk yang tamat SMA juga sudah relatif banyak berjumlah 575 orang atau 22,65%. Hal ini disebabkan adanya fasilitas pendidikan atau sekolah lanjutan tingkat atas di kecamatan Rote Barat Laut sehingga tidak relatif jauh dari desa Oelua.

3. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk desa Oelua sebagian besar adalah sebagai nelayan berjumlah 750 orang atau 33, 71% kemudian diikuti penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai petani penggarap tanah berjumlah 650 orang atau 29,21%, diikuti buruh tani berjumlah 300 orang atau 13,48% (tabel 3).

Tabel 3. Penduduk Desa Oelua Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2016

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	Petani pemilik tanah	75	3,37
2.	Buruh Tani	300	13,48
3.	Petani penggarap tanah	650	29,21
4.	Pedagang	90	4,04
5.	Nelayan	750	33,71
6.	Pengusaha sedang/besar	2	1,42
7.	Pengrajin/industri kecil	3	0,09
8.	PNS	60	2,69
9.	Buruh bangunan	125	5,62
10.	Buruh pertambangan	150	6,74
11.	Pengangkutan	10	0,50
12.	Pensiunan PNS/TNI	10	0,45
	Jumlah	2225	100,00

Sumber: Monografi Desa Oelua Tahun 2016

Mata pencaharian penduduk nelayan disebabkan lokasi desa Oelua yang relatif dekat dengan laut sehingga penduduk mencari

ikan relatif mudah untuk kebutuhan sehari-hari (lauk pauk) maupun untuk dijual. Petani yang mengolah sawah tadah hujan, ladang, kebun yang panen satu kali, sebagian penduduk yang tidak memiliki lahan bekerja sebagai buruh tani. Petani bercocok tanam di ladang, dengan tanaman seperti jagung, padi ladang, dan ubi kayu. Selain itu banyak pula di antara mereka yang bekerja sebagai penyadap nira lontar dan beternak kerbau, sapi, kuda dan ayam. Kaum wanita Rote pandai menenun kain dengan motif tradisional (foto 13), menganyam barang dari pandan dan sebagainya.



Foto 13. Wanita Rote yang menenun sejak masih gadis

Sumber : dokumentasi peneliti tahun 2017

Para wanita Rote harus belajar menenun sejak masih gadis, apabila tidak bisa menenun akan sulit menikah, karena persyaratan dapat menikah apabila sudah dapat membuat kain tenun. Pekerjaan menyadap nira lontar tugas kaum dewasa sampai tua. Tetapi pekerjaan itu hanya sampai diatas pohon, setelah nira sampai ke bawah seluruh pekerjaan dibebankan kepada wanita. Kaum pria bangun pagi hari kira-kira jam 03.30, suatu suasana yang dalam bahasa Rote diungkap sebagai; *Fua Fanu Tapa Deik Malelo afe take tuk* (bangun hampir siang dan berdiri tegak, sadar dan cepat duduk). Mereka menyadap nira dari atas pohon lontar (foto 14).



Foto 14. Pria Rote yang sedang mengambil nira lontar

Sumber : dokumentasi peneliti tahun 2017

Nelayan yang ada di desa Oelua khususnya dusun Oelaba sangat bergantung dengan dengan kondisi iklim dan cuaca untuk dapat berangkat mencari ikan. Mereka hanya dapat berangkat bebrapa bulan dalam setahun sehingga tidak dalam sepanjang tahun menggantungkan hidupnya dari melaut. Nelayan yang melaut sebagian sampai ke wilayah perbatasan Indonesia dan Australia yang sudah mereka lakukan sejak turun-temurun. Mereka juga membeli gula air untuk dijual kembali, para istri mereka ada yang menjual kue di pasar, dan sebagainya.

Pulau Rote merupakan pulau kecil yang memiliki banyak potensi sebagai daerah tujuan wisata di kawasan Indonesia Timur. Sebagai salah satu tujuan pelayaran dalam program Sail Komodo 2013, kabupaten Rote Ndao, memiliki potensi pariwisata tak kalah dari tujuan wisata utama Sail Komodo yaitu Labuan Bajo. Potensi ini sangat menjanjikan sehingga diharapkan dapat menyamai Bali sebagai ikon pariwisata Indonesia (2013). Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa potensi ini belum diketahui secara maksimal oleh masyarakat Indonesia. Para wisatawan asing yang sudah menyukai pantai Rote Ndao juga belum mengetahui potensi budaya Rote Ndao, padahal jika kebudayaan diangkat akan bisa menjadi daya tarik yang sangat besar bagi para wisatawan. Beberapa objek wisata di pulau Rote misalnya Mulut Seribu (foto 15), pantai Tiang Bendera (foto 16), Nembrala (foto 16), dan

sebagainya. Saat ini kesadaran terhadap keberadaan Rote Ndao sebagai tujuan wisata masih sangat kurang dibandingkan tujuan wisata lainnya.

4. Agama

Penduduk desa Oelua sebagian besar beragama Kristen Protestan berjumlah 2289, kemudian yang beragama Islam berjumlah 720 orang dan penduduk yang beragama Katholik berjumlah 48 orang. Penganut kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa berjumlah 3057 orang. Dengan demikian seluruh penduduk desa yang sudah menganut agama yang diakui pemerintah tetapi masih tetap mengakui adanya kepercayaan yang ada dalam masyarakat.

Masyarakat Rote memiliki sistem kepercayaan yang mengenal adanya Sang Pencipta disebut *Lamatuan* atau *Lamatuak*. Masyarakat memandang *Lamatuan* ini sebagai *Manadu* (Pencipta), *Mansula* (Pengatur atau Penyelenggara) dan *Manfe* (Pemberi Berkah). Ketiga wujud *Lamatuan* tersebut mereka simbolkan dengan sebuah tiang bercabang tiga yang diletakkan di dalam rumah, di sebelah kanan pintu masuk. Segala sesuatu dalam kehidupan mereka dikaitkan kepada sistem kepercayaan tersebut.

Orang Rote sekarang sudah memeluk agama Protestan, Katolik dan Islam. Agama asli orang Rote disebut dengan *Halaik*. Dalam konsep kehidupan akan alam gaib, orang-orang Rote juga percaya akan adanya dewa. Misalnya dewa *Dewa Nutu Bek* (dewa untuk pertanian), dan *dewa Nade Dio* (dewa pemberi kemakmuran). Mengenai konsep wujud tertinggi tersebut dikenal dengan *Mane Tua Lain* atau *Lama Tuak* sebagai suatu wujud tertinggi.

C. LATAR BELAKANG SEJARAH DAN BUDAYA

1. Latar Belakang Sejarah

1.1. Sebelum Pemekaran (sebelum tahun 2002)

Ada berbagai versi cerita tentang asal mula penduduk pulau Rote. Pada abad ke tiga di pantai Rote (Rote Timur) muncul kapal-kapal Portugis sedang berlabuh karena membutuhkan air minum. Di pantai mereka bertanya kepada nelayan bentuk pulau seperti apa? Nelayan menyangka bahwa mereka menanyakan namanya dan menjawab *Rote is Mijn Naam*. Kapten (nakhoda) kapal Portugis ini menyangka bahwa bentuk pulau itu Rote, segera ia menamakan pulau Rote, pulau ini disebut Rote. Para tokoh adat di Pulau Rote ada yang menganggap tempat asal nenek moyang orang Rote adalah Pulau Seram dan Tidore. Hal ini juga seperti yang ditulis dalam buku "The Timor Problems" oleh Ormelling, (1955:72), menyebutkan ada kemungkinan orang Rote berasal dari Ceram (Zoh, dan Indrayana, 2008:36)

Mereka datang secara bertahap di Kabupaten Belu kemudian menetap di Rote, sebagian meneruskan perjalanan ke Pulau Sabu dan menetap. Leluhur orang Rote ini mengisahkan ada tiga bersaudara, yaitu Belu Mau, Sabu Mau, dan Ti Mau. Ketiga bersaudara datang dari Malaka melalui Seram dan Tidore Belu Mau menetap di Belu dan keturunannya merupakan sebagian besar orang Belu, terutama Belu Selatan. Ti Mau berlayar ke barat dan menetap di *Nusak Thie*, Kecamatan Rote Barat Daya, sedangkan Sabu Mau melanjutkan perjalanan, kemudian menetap di Pulau Sabu.

Cerita lain mengisahkan pertama kalinya nenek moyang orang Rote menetap di suatu tempat di Rote Timur yang kini bernama Nusal Bilba Kata Bilba berasal dari bahasa Belu, yaitu Beluba, artinya sahabat datang Pada saat itu, para leluhur menyebut Pulau Rote sebagai Pulau Kale. Tokoh adat menyatakan bahwa nama Rote sebenarnya berasal dari suatu keluarga di Rote Timur. Nama

pulau Rote terus dipergunakan dalam administrasi pemerintahan Belanda hingga sekarang. (Een Inlandschen School Meester, 1854:4 dalam Zoh, dan Indrayana, 2008:1)

Pulau Rote awalnya tidak berpenghuni kemudian ditempati oleh sebuah kelompok suku yang menurut cerita berasal dari tanah atas atau *Lain Do Ata* (sebelah utara). Fox (1973) menyebutkan bahwa berdasarkan fakta tentang kesamaan nama-nama tempat, pola kekerabatan antara orang Rote dan Ceylon, serta cara-cara orang Ceylon dalam hal menyadap lontar untuk memperoleh nira sehingga penduduk pertama yang mendiami pulau Rote adalah berasal dari Ceylon yang dikenal dengan nama Sri Lanka. Menanggapi pernyataan di atas, jika benar penduduk pertama yang mendiami pulau Rote adalah benar mereka yang berasal dari Ceylon, maka kemungkinan awal kedatangan mereka bersamaan dengan dominasi imigran-imigran dari utara. Hal ini bermula ketika Dinasti Chola yang saat itu memperluas daerah kekuasaannya, dimana mereka menganeksasi Ceylon serta pulau-pulau lain disekitarnya, dan pada tahun 1025 mereka menyerbu Kerajaan Sriwijaya di Sumatra dan Semenanjung Melayu pada tahun 1068 sampai 1069. Setelah dominasi tersebut mulailah etnis Asia Tenggara diserbu oleh imigran-imigran dari utara, dimana India dan Ceylon menjadi sumber pengaruh budaya.

Pada zaman kolonial Belanda, sistem pemerintahan di pulau ini mulai berlaku sejak tahun 1513 saat pemerintah kolonial Belanda membentuk 4 (empat) kerajaan besar di Pulau Rote terdiri dari: 1) Kerajaan Korbafo; 2) Kerajaan Bilba; 3) Kerajaan Termanu; 4) Kerajaan Dengka. Pada tahun 1772, wilayah Keka dan Talae memberontak dan memisahkan diri dari Kerajaan Termanu. Daerah penelitian merupakan daerah wilayah kekausaan kerajaan Dengka. Pemimpin kerajaan Dengka pertama adalah Tullia (1662-1676) selanjutnya Henuk Kane (1691-1727) dilanjutkan Manafe Henuk (1727-1779), selanjutnya Andries Henuk (1779-1800), kemudian Doki Pah Manafe (1803), Bauk (1832), Tungga Koten (1854-1858), Adu Tungga (1859-1890), Paulus Adu Tungga (1891-

1903), Alexander Adu Tungga (1904-1906), Alexander Paulus Tungga (1907-1911).

Pemerintahan dalam *Nusak Thie*, mulai dari moyang Saku Nara atau Suku Taratu. Saku Nara ditetapkan sebagai *manek* yang memerintah mulai dari tahun 1565 sampai 1600, sudah menyusun dan menata pemerintahan daerah, menetapkan Hukum Kekeluargaan (Hukum Perkawinan). Pada masa itu masyarakat *Thie* terdiri dari Suku Sabarai dan Suku Taratu. Keturunan Busa Tola yang tetap tinggal di Pulau Landu diberi hak otonom oleh Saku Nara, Pulau Landu merupakan daerah otonomi dari *Nusak Thie*. Feo Henu adalah putri Henu Etu (Raja Dengka) isteri Saku Nara sangat membantu suaminya menata dan mengayomi masyarakat *Thie*. Moyang Suku Su'a dan Le'e ada yang tinggal terpisah dari masyarakat *Thie* di sekitar wilayah Dengka dan membentuk sebuah suku, yaitu Suku Ndau.

Nale Mesah (Suku Mburala'e) memerintah dari tahun 1665 sampai dengan tahun 1690. Pada masa pemerintahan raja ini, *Thie* mengalami dua peristiwa sejarah yang mengerikan. *Pertama*, atas restu Nale Mesah, Nale Sanggu (panglima perang) menaklukkan dan memusnahkan kerajaan dan rakyat Ndana pada sekitar tahun 1680. *Kedua*, pada tahun 1681, kerajaan *Thie*, Oenale dan Dengka di bawah komando panglima perang Nale Sanggu dan Lere Tasi menyerang kerajaan Termanu dan Lelain karena kedua kerajaan ini selalu menyerang *Thie*, Oenale dan Dengka. Termanu merupakan sekutu dari Belanda, maka Kompeni menganggap hal ini sebagai suatu ancaman langsung kepadanya, lalu mengirim sebuah ekspedisi dari Kupang yang terdiri dari 26 tentara, 500-600 orang Timor dari negara/kerajaan Kupang, Amabi, dan Sonbai untuk membantu Termanu. Ketiga kerajaan itu (*Thie*, Oenale dan Dengka) diserang habis-habisan. Kekuatan musuh (Termanu dan kawan-kawan) terlalu besar, para pejuang dan rakyat (tua-muda, lelaki-perempuan dan anak-anak) lari bersembunyi ke dalam gua-gua, namun gua-gua itu dibakar atau diasapi sehingga banyak penduduk yang mati lemas.

Setelah aman, kapal-kapal Belanda yang kembali ke Kupang membawa serta tawanan perang yang terdiri dari 96 orang lelaki, 158 orang perempuan, dan 181 anak-anak. Mereka dijadikan budak. Sebagai tambahan Thie harus membayar 100 budak dan 8 kati emas, Dengka 75 budak dan 75 kati emas, sedangkan Oenale dibebaskan dari denda karena kehilangan 2/3 dari penduduknya (Fox, 1996: 135).

Ketiga kerajaan menyampaikan kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Gubernur Jenderal memberikan suatu surat peringatan kepada raja-raja Timor yang telah turut memerangi ketiga kerajaan Rote itu dan menyalahkan mereka sebagai pihak yang bertanggung-jawab atas peristiwa tersebut. Lebih lanjut Gubernur Jenderal mengatakan dalam suratnya bahwa Kompeni tidak bermaksud menyusahkan hidup rakyat tetapi berkeinginan agar semua rakyat harus hidup dalam kedamaian dan ketenangan.

Kerajaan Dengka menjalin persahabatan dengan Thie, namun Raja Dengka selalu merasa khawatir akan kekuatan Thie di bawah pimpinan pahlawan-pahlawan Nale Sanggu (Suku Kona) dan Lere Tasi (Suku Le'e). Kedua panglima perang ini yang memimpin tentara gabungan Thie, Oenale dan Dengka waktu ketiga kerajaan ini diserbu oleh Termanu dan sekutunya. Raja Dengka berpikir bahwa dengan kekuatan militer yang dimiliki oleh Thie, pasti sekali kelak Thie akan menyerang Dengka. Untuk itu Raja Dengka mencari jalan agar kedua panglima ini disingkirkan.

Dalam persahabatan yang berkedok itu, Raja Dengka menyarankan kepada Raja Thie (Nale Mesah) supaya kedua oknum itu harus dimusnahkan dengan dalih bahwa bila dibiarkan pasti kelak mereka akan mengadakan kudeta. Nale Mesah tidak menyadari akal bulus Raja Dengka itu lantas mengabulkan saran raja tersebut. Kedua panglima perang itu dituduh dengan berbagai tuduhan yang tidak berdasar dan kemudian diadu-domba oleh Raja Nale Mesah, lalu mereka berdua terlibat dalam suatu perkelahian yang sengit, keduanya saling membunuh, akibatnya gugur bersamaan.

Pada tahun 1660 Dengka, Baa, Lole dan Termanu memberontak dan ke empat kerajaan dihancurkan. Dengka sebagai pemimpin pemberontak harus membayar 133 orang budak. Belanda membuat kontrak pertama dengan raja-raja Rote Dengka, Korbafo, Bilba dan Termanu. Pada tahun 1690 ada 12 kerajaan yang diakui Belanda termasuk Landu, Thi, Lelain, Lole, Ringgou, Oepao, Oenale, Baa.

Raja Suku Mburala'e memerintah dari tahun 1690 sampai dengan tahun 1729. Mula-mula berkedudukan di Kokolo, kemudian pada sekitar tahun 1691 ibukota dipindahkan ke Fiulain. Perpindahan ini dilakukan lantaran Thie masih terus mendapat serangan dari Termanu dan Dengka. Pada masa pemerintahan Nale Mesah, musuh bebuyutan Thie hanyalah Termanu, tapi pada masa pemerintahan raja ini (Mbura Mesah), musuh Kerajaan Thie bertambah lagi, yakni Kerajaan Dengka. Raja Dengka tidak lagi merasa khawatir atas kekuatan Thie karena dua panglima perang (Nale Sanggu dan Lere Tasi) telah tiada.

Pada masa pemerintahannya terjadi pula peristiwa sejarah yang mengerikan bagi Kerajaan Thie, bahkan dalam sejarah Rote. Kerajaan Termanu kembali menyerang Thie pada tahun 1690. Termanu merupakan sekutu yang paling baik buat Belanda sehingga jangan sampai terjadi campur tangan dari Belanda seperti apa yang terjadi pada masa pemerintahan saudaranya (Nale Mesah), maka setelah Termanu dihancurkan cepat-cepat Mbura Mesah mengambil hati dan berbuat jasa baik kepada Belanda. Karena itu Belanda tidak menaruh dendam, malahan pada tahun 1726 dia dianugerahi sebuah piala perak dari VOC dan bertuliskan "Poura Messa, Radja van Thie, 1726". Di sini Mbura ditulis Poura. Kemudian beliau dibaptis di Kupang. Raja ini berjasa pula dalam memperbaiki serta melanjutkan pembangunan embung-embung/bendungan Dano Tua pada tahun 1700.

Foeh Mbura alias Benyamin Mesakh adalah anak dari Mbura Mesakh, dilahirkan di Kokolo (ibukota Kerajaan Thie) kira-kira tahun 1680. Dia menjadi raja menggantikan ayahnya dan memerintah dari tahun 1729 sampai 1746, berkedudukan di Fiulain (ibukota baru). Bersaudara dengan Pandi Mbura (laki-laki),

Nuku Mbura (laki-laki) dan Ndo'i Mbura (perempuan) yang kawin dengan Ndi'i Hu'a (Raja Lole). Versi lain menyebutkan bahwa Foeh Mbura bersaudara pula dengan Pa Mbura. Istri dari Foeh Mbura ialah Ria Be, adik dari Be Poli (Raja Bilba) dan mendapatkan satu-satunya anak (lelaki) yaitu Henu Foeh (meninggal dalam usia yang masih muda) dan tiga anak perempuan.

Foeh Mbura dengan ketiga raja sangat akrab karena antara mereka terdapat hubungan perkawinan. Saudara perempuan Foeh Mbura (Ndo'i Mbura) menikah dengan Ndi'i Hu'a, serta tiga orang puterinya –Doana Foeh menikah dengan Tou Dengga Lilo, Hu'aana Foeh menikah dengan Ndara Naong, serta Sutaana menikah dengan Sou Lai (panglima perang Lole). Ndi'i Hu'a (Raja Lole) tinggal di puncak Gunung Mando di bagian selatan Nusak Lole/Kuli. Bila ada sesuatu peristiwa penting maka Ndi'i Hu'a dan Foeh Mbura saling memberikan berita isyarat bunyi tembakan meriam. Bahkan beritanya pada saat mereka meminum laru pun mereka saling memberi isyarat dengan menembakkan meriam.

Tentang Foeh Mbura dan saudara-saudaranya, menurut versi Sabu yang ditulis oleh Riwu Kaho (2005: 16), bahwa Foeh Mbura, Pandi Mbura, dan Nuku Mbura adalah orang Sabu. Di Sabu mereka disebut/dikenal dengan nama Poe Bura, Padi Bura, dan Nuku Bura. Nuku Bura sebagai pemimpin masyarakat Habba.

Pada tahun 1690-1700 terjadi konflik antara Kerajaan Thie dengan Kerajaan Oenale, Dengka, Korbafo dan Termanu. Permintaan bantuan dari Thie kepada kerabatnya di Sabu, maka Nuku Bura mengirim Poe Bura dan Padi Bura ke Rote untuk membantu *Nusak* (Kerajaan) Thie. Sesudah perang, Padi Bura/Pandi Mbura kembali ke Sabu, sedangkan Poe Bura/Foeh Mbura menetap di Thie. Ketiga bersaudara itu adalah anak dari Mbura Mesah. Bersama Pah Mbura (saudara mereka), ketiganya lahir di Kokolo. Karena selalu mendapat serangan dari Kerajaan Termanu, maka ibukota sekaligus masyarakat Thie berpindah ke Fiulain, sementara Foeh Mbura masih kecil. Penyerangan terhadap Kerajaan Thie oleh keempat kerajaan itu berlangsung pada tahun

1730. Menurut Riwu Kaho, penyerangan itu terjadi sekitar tahun 1690 sampai 1700.

Pada tahun 1690 Termanu menyerang Thie, tapi saat itu Dengka dan Oenale masih bersahabat dengan Thie. Kemudian baru Dengka dan Oenale berseberangan dengan Thie. Apabila benar ada permintaan dari Thie sesuai dengan versi Riwu Kaho, maka menurut versi Fox terjadi pada tahun 1730 dan yang meminta bantuan adalah Raja Thie *ad interim* (Pandi Ndao) kepada Nuku Mbura di Sabu.

Pada tahun 1730, Foeh Mbura berangkat ke Batavia bersama rombongan 27 orang termasuk Raja Lole (Ndi'i Hu'a), Raja Lelain (Ndara Naong) dan Raja Baa (Tou Dengga Lilo). Dari Thie turut serta wakil dari hampir semua leo (klen) yang terdapat di Nusak Thie, antara lain Pandi Mbura (saudara dari Foeh Mbura yang mewakili Suku Mburalae), Mbate Mio (Moiumbuk), Nafi Toulo/Lon (anak dari Tou Lo Nale yang bersama Sangguana Nale dibunuh di Ndana) mewakili Suku Kona, Resi Boru (Suku Bibimane), Tule Fatu (Suku Tolaumbuk), Mina Mbaru (Suku Musuhu), Henu Helo (Suku Langgalodo), Semu Lolo (Suku Kanaketu), Landa Laifoi (Suku Kolek) dan Foi Soru (Suku Su'a). Sampai di Pulau Sabu, Pandi Mbura tidak mau melanjutkan perjalanan lalu tinggal bersama saudaranya Nuku Mbura yang telah lebih dulu bertualang di Belu dan kemudian ke Sabu dan menetap.

Pada waktu itu *fettor* adalah Pandi Ndao (dari suku/leo Todefeo) tidak pergi dan ditunjuk sebagai raja *ad interim*. Sebagai gantinya, Pandi Ndao menunjuk Mbate Moi mewakilinya sekaligus mewakili rumpun suku (leo) Moianan dan/atau Taratu untuk mendampingi raja. Setelah kembali dari Batavia, jabatan *fettor* dari leo Todefeo kepada leo Moiumbuk secara turun-temurun dan mulai dijabat oleh Mbate Moi.

Setelah Foeh Mbura dan rombongannya berangkat (1730), tentara gabungan Termanu, Korbafo, Dengka dan Oenale menyerang Thie, Loleh, Baa dan Lelain pada tahun itu pula (Fox, 1996: 196). Raja Thie *ad interim* (Pandi Ndao) memerintahkan lima orang panglima perang Thie memimpin pasukan Thie

untuk bergabung dengan pasukan dari Lole, Baa dan Lelain buat menangkis serangan tersebut. Akhirnya musuh berhasil dikalahkan. Kelima panglima perang itu adalah Moka Laka (Suku Musuhu), Ndu Mbeda (Suku Kolek), Tule Tole (Suku Bibimane), Lenggu Soru (Suku Kekadulu) dan Tidoama Koli Oe (Suku Su'a).

Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama dua tahun, sedang sisanya disuruh pulang lebih dulu. Sesudah mengikuti pendidikan tahun 1732 lima orang dibaptis, masing-masing Foeh Mbura (Benyamin), Mbate Moi (Yohanis), Nafi Toulo/Lon (Natanel), Tule Fatu (Daniel) dan Resi Boru (Matias). Menurut sumber lain bahwa Foeh Mbura dibaptis bersama ayahnya sebelum di ke Betawi. Benyamin Mesakh mulai menyebarkan agama Kristen.

Setelah kembali (1732), Foeh Mbura mulai menerapkan semua ilmu/teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Karena belum ada gedung khusus untuk kegiatan pendidikan dan kegiatan agama, maka Istana dipakai sebagai tempat sekolah dan gereja. Rakyat Rote mengatakan bahwa beliau membawa "*manggaledok ma manggadilak soa neu nusa Rote*" (membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote). Untuk melancarkan kegiatan pendidikan dan agama maka Foeh Mbura meminta tenaga guru dan pendeta lalu Kompeni mengirim guru-guru serta pendeta (Herman Sanders Zijlsma) ke Fiulain (Thie).

Setelah kerajaan terpisah-pisah kemudian berdampak terbentuknya *nusak-nusak* lainnya yaitu: 1) *Nusak Baa*; 2) *Nusak Loleh*; 3) *Nusak Lelain*; 4) *Nusak Keka*; 5) *Nusak Talae*; 6) *Nusak Termanu*; 7) *Nusak Korbafo*; 8) *Nusak Bokai*; 9) *Nusak Diu*; 10) *Nusak Oepau*; 11) *Nusak Lelenuk*; 12) *Nusak Landu*; 13) *Nusak Bilba*; 14) *Nusak Ringgou*; 15) *Nusak Ndana*; 16) *Nusak Dengka*; 17) *Nusak Delha*; 18) *Nusak Oenale*; 19) *Nusak Ndao* dan 20) *Nusak Thie* (Zoh, Andre Z dan Indrayana, Maria N.D.K, 2008:18)

Setelah 300-an tahun relatif tak berubah, pada awal abad 20, di bawah kebijakan pemerintah Kolonial Belanda berusaha merasionalisasi struktur *nusak* dan sistem gelar para penguasa Rote. Tapi rupanya sistem yang sudah bertahan lama selama berabad-

abad itu sulit diubah. Pada tahun 1919 di bawah pemerintahan Letnan Van Son, Delha dan Oenale menjadi nusak Bolaholue; Dengka dan Lelain dipersiapkan untuk bersatu, baa dan termanu menjadi lamakoli; selanjutnya Ringgou dan Oepao menjadi satu menjadi nusa lai, diu dan landu menjadi satu daedulu. Setelah terjadi persekutuan lamakoli, kerajaan IV dan korbafo membentuk Rote Talada. Sikap pemerintah pada akhir tahun 1920 diharapkan akan terdapat 7 kerajaan: Rote Timur, Beluba, Rote Tengah (Rote Talada), Loaholu, Bolaholu, Thi dan Ndao (Zoh dan Indrayana, 2008:95)

Penguasa Rote hanya melakukan perubahan di permukaan untuk mempertahankan posisi mereka. Pada 31 Oktober 1928, *manek* Rote ramai-ramai menyerahkan hak mereka akan gelar 'Radja' dan menyetujui penunjukan seorang bangsawan Rote dari keturunan Fettor, Joel Simon Kedoh, sebagai seorang pejabat sementara "Radja Rote". Pertama dan terakhir Rote mempunyai seorang "Radja" tunggal. Joel Simon Kedoh seorang bintang pelajar *Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA) di Makassar yang dianggap cakap menjadi raja bagi Rote.

Penguasa tetap mempertahankan hak untuk memerintah dengan gelar *Manek* yang sebenarnya persamaan untuk "radja". Orang Rote menyebut raja yang baru terpilih itu sebagai *manek kisek* sebagai pujian dan hinaan. *Kisek* dalam bahasa Rote berarti 'tunggal' tapi juga berarti 'tersendiri' atau 'menyendiri'.

Sejak pertengahan kedua abad 18 tidak ada perlawanan senjata di Rote. Masyarakat menerima Kristen dan pendidikan Eropa untuk menghindari perburuan budak yang dilakukan Perusahaan Dagang Belanda di Hindia Timur VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*), baru dihapuskan pada tahun 1818. Masyarakat Rote mampu mempertahankan kebudayaan, salah satunya sistem pemerintahan. James Fox menyimpulkan bahwa "selama tiga ratus tahun Rote mempunyai salah satu dari sistem gelar yang paling stabil di Indonesia."

Dengka merupakan salah satu *nusak* besar terletak di sebelah barat memiliki 11 desa diantaranya Morosina, Eotutuhu, Daodolu,

Inguinak, Temas, Lidor, Eoluak, Tualima, Boni, Oebela dan 1 kelurahan Busalangga sebagai ibukota kecamatan (Malaikosa, 2010:36).

Wilayah Rote Ndao semula adalah merupakan bagian dari Wilayah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang yang dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655).

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur masing-masing :

Nomor Pem.66/1/2, tanggal 28 Pebruari 1962 dan Nomor Pem.66/1/22, tanggal 5 Juni 1962, maka wilayah Rote Ndao dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah Pemerintahan Kecamatan yaitu : 1) Kecamatan Rote Timur dengan pusat Pemerintahan di Eahun; 2) Kecamatan Rote Tengah dengan pusat Pemerintahan di Baa; 3) Kecamatan Rote Barat dengan pusat Pemerintahan di Oelaba.

Pada tahun 1963 sesuai dengan perkembangan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor Pem.66/1/32, tanggal 20 Juli 1963 tentang Pemekaran Kecamatan maka Wilayah Pemerintahan yang berada di Rote Ndao dimekarkan menjadi 4 (empat) Wilayah Kecamatan: 1) Kecamatan Rote Timur beribu kota di Eahun; 2) Kecamatan Rote Tengah beribu kota di Baa; 3) Kecamatan Rote Barat beribu kota di Busalangga; 4) Kecamatan Rote Selatan beribu kota di Batutua.

Setelah 4 (empat) tahun masyarakat menginginkan membentuk kabupaten otonom bagi Rote Ndao maka untuk untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan yaitu satu daerah kabupaten harus didukung oleh 6 (enam) buah Kecamatan Administratif, terjadi pemekaran wilayah di Rote Ndao maka 4 (empat) Kecamatan yang telah ada di Pulau Rote Ndao dibagi menjadi 6 (Enam) Kecamatan sehingga menjadi 8 (delapan) Kecamatan. berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor Pem.66/1/44 tanggal 1 Juli 1967 dan Keputusan Nomor Pem.66/2/71,

tanggal 17 Juli 1967 terdiri dari: 1) Kecamatan Rote Timur dengan pusat Pemerintahan di Eahun; 2) Kecamatan Pantai Baru dengan pusat Pemerintahan di Olafulihaa; 3) Kecamatan Rote Tengah dengan pusat Pemerintahan di Feapopi; 4) Kecamatan Lobalain dengan pusat Pemerintahan di Baa; 5) Kecamatan Rote Barat Laut dengan pusat Pemerintahan di Busalangga; 6) Kecamatan Rote Barat Daya dengan pusat Pemerintahan di Batutua.

Pada tahun 1968 *nusak-nusak* digabungkan menjadi enam kecamatan yaitu: 1) Kecamatan Rote Barat Laut terdiri dari *nusak* Dengka, Oenale dan pulau Ndao beribukota di Busalangga; 2) kecamatan Rote Barat Daya terdiri dari *nusak* Thie dan Delha beribukota di Batu Tua; 3) Kecamatan Lobalain terdiri dari *nusak* Baa, Loleh dan Lelain beribukota di Baa; 4) Kecamatan Rote Tengah terdiri dari *nusak* Termanu, Keka dan Talae beribukota di Feo Popi; 5) Kecamatan Pantai Baru terdiri dari *nusak* Korbafo, Bokai, Diu, Lelenuk beribukota di Olafuli Haa; 6) Kecamatan Rote Timur terdiri dari *nusak* Oepau, Landu, Ringgou dan Bilba beribukota di Bilba (Zoh, dan Indrayana, 2008:19)

Keuangan negara yang belum memungkinkan sehingga pembentukan Kabupaten Otonom Rote Ndao belum dapat dilakukan, maka sebagai jalan keluar untuk memenuhi tuntutan keinginan masyarakat, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Pem.66/2/4, tanggal 11 April 1968 agar wilayah Rote Ndao dibentuk sebagai **Wilayah Koordinator Schap** dalam wilayah hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang dan menunjuk Bapak D.C. Saudale, sebagai Bupati di perbantukan di **Wilayah Koordinator Schap** Rote Ndao dengan Keputusan Guberur Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor Pem. 66/2/21, tanggal 1 Juli 1968 (<http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/53/name/nusa-tenggara-timur/detail/5314/rote-ndao> diakses tanggal 10 Mei 2017).

Adanya perkembangan di bidang pemerintahan, pada tahun 1979 terjadi perubahan status **Wilayah Koordinator Schap** Rote Ndao menjadi wilayah pembantu Bupati Kupang untuk Rote

Ndao, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 25 tahun 1979 tanggal 15 Maret 1979, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Bupati Kupang untuk Rote Ndao, yang telah disahkan pula oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Nomor 061.341.63-114 tertanggal 8 April 1980.

Sesuai perkembangan dan dinamika masyarakat maka dalam tahun 2000 timbulnya keinginan kuat dari masyarakat Rote Ndao baik yang berada di Wilayah Pembantu Bupati Kupang Wilayah Rote Ndao maupun dukungan dari orang Rote yang berada di Kupang dan di Jakarta mengusulkan agar Wilayah Pemerintahan Pembantu Bupati Rote Ndao ditingkatkan menjadi Kabupaten definitif. Usulan tersebut didukung dengan adanya pernyataan sikap dari 300 Tokoh masyarakat, Tokoh adat mewakili masyarakat dari 19 Nusak kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, melalui Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai kabupaten induk.

1.2. Setelah Pemekaran (Setelah Tahun 2002)

Usulan masyarakat melalui pengkajian dan mekanisme pembahasan sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku maka pada tanggal 10 April 2002 oleh Pemerintah Pusat dan DPR - RI menetapkan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat pemekaran kabupaten Rote Ndao memiliki delapan kecamatan yaitu: 1) Kecamatan Rote Timur dengan pusat Pemerintahan di Eahun; 2) Kecamatan Pantai Baru dengan pusat Pemerintahan di Olafuliha; 3) Kecamatan Rote Tengah dengan pusat Pemerintahan di Feapopi; 4) Kecamatan Lobalain dengan pusat Pemerintahan di Baa; 5) Kecamatan Rote Barat Laut dengan pusat Pemerintahan di Busalangga; 6) Kecamatan Rote Barat Daya dengan pusat Pemerintahan di Batutua; 7) Kecamatan Rote Selatan dengan pusat Pemerintahan di Daleholu; 8) Kecamatan Rote Barat dengan pusat Pemerintahan di Nemberala atau Delha.

Pada tahun 2012 Kabupaten Rote Ndao mengalami pemekaran kembali dan memiliki 10 Kecamatan yaitu: 1) Kecamatan Rote Timur dengan pusat Pemerintahan di Eahun; 2) Kecamatan Pantai Baru dengan pusat Pemerintahan di Olafuliha; 3) Kecamatan Rote Tengah dengan pusat Pemerintahan di Feapopi; 4) Kecamatan Lobalain dengan pusat Pemerintahan di Baa; 5) Kecamatan Rote Barat Laut dengan pusat Pemerintahan di Busalangga; 6) Kecamatan Rote Barat Daya dengan pusat Pemerintahan di Batutua; 7) Kecamatan Rote Selatan dengan pusat Pemerintahan di Daleholu; 8) Kecamatan Rote Barat dengan pusat Pemerintahan di Nemberala atau Delha; 9) Kecamatan Landu Leko beribukota Landu Leko dan 10) Kecamatan Ndao Nuse beribukota Ndao Nuse.

Sejarah perkembangan pemekaran kabupaten Rote Ndao tersebut mengalami proses yang relatif lama sampai menjadi kabupaten tersendiri disebabkan pendanaan pemerintah pusat dan daerah yang belum siap.

2. Budaya Masyarakat

Penduduk yang ada di Pulau Rote terdiri dari suku-suku kecil seperti: Rote Nes, Bara Nes, Keo Nes, Poli Nes, dan Fole Ne yang menempati wilayah adat disebut *nusak*. Masyarakat Rote memiliki filosofi *mao tua do lefe bafi* yang artinya kehidupan dapat bersumber cukup dari mengiris tuak dan memelihara babi, secara tradisional orang-orang Rote memulai perkampungan melalui pengelompokan keluarga dari pekerjaan mengiris tuak. Pada awalnya ketika ada sekelompok tanaman lontar yang berada pada suatu kawasan tertentu, maka tempat itu jugalah menjadi pusat pemukiman pertama orang-orang Rote (<https://model-daerah.blogspot.co.id/2016/02/budaya-dan-kekerabatan-orang-rote.html>).

Masyarakat Rote mengenal sebuah sistem kemasyarakatan yang disebut dengan istilah *nusak*, seperti telah disebutkan dalam sub bab sebelumnya terdiri dari dua puluh *nusak*. *Nusak* berasal dari kata *nusa* yang mengandung pengertian *tanah suku* (tanah

ulayat), *subsuku/suku/bangsa*, *organisasi pemerintahan* atau *negara/negeri* dan *wilayah* atau *pulau*.

Nusak merupakan sebuah daerah hukum yang bersendi pada hubungan daerah, dimana di dalamnya terdiri dari sekumpulan masyarakat seketurunan. Setelah masyarakat *nusak* bertambah banyak populasinya maka dibagi atas *leo-leo* dan mendiami suatu wilayah desa (*nggorok/ngolok/korok*) tertentu. Sesudah itu tiap suku/leo diangkat seorang kepala suku yang disebut *mane leo* (arti harfiahnya ialah 'raja suku'). *Mane Songgo* (bagian kerohanian), *Mane Dope* (hakim), *Mane Dae Langgak* (mengurusi bagian pertanahan dan pertanian), *Mane Lala* (penegak hukum bagian persawahan), *Langga Mok* (penegak hukum dalam bidang pertanian/ ladang dan kebun), *Mane Holo* (penegak hukum dalam bidang kelautan, hutan, dan tanaman di dalam kampung), *Langgak* (kepala kampung atau RW), *Lasin* (sejenis RT).

Kerajaan Dengka memiliki 23 suku yang terdiri dari:

- A. rumpun Elomuli memiliki 9 klen yaitu: 1) *elo (raja)*: *elo, lete, laasar, henuhanu, abidano, mbau, lani, laasai, mengge, ndoi, ndao*; 2) *fando*: *fek, polo, adu, mole, baik, fanggitani, henuk, tasi, ufi, nafi*; 3) *tasioe*: *saduk, henuk, poik, mbau, detanelu, nafi, foes, baluk, nggonggoek, nggoek, paa*; 4) *luna*: *lulupoi, luna, ambi, besi*; 5) *todak*: *adu manuwain, eohndolu, ledo, sau, fanggi, donggi, pandi, henuk, bute, tobo, nueik, mbau, pou, langga, moihana, nafi, ndun*; 6) *boluk*: *eoh, hanas, foeh, ndun, adu, bolu, sula, lona, bandi, nale, henudelas, fili, sela, haninuna, koten, medi*; 7) *busaleok/mboetik*: *foes, modok, nasa, bulu, mboe, ndun, ndolu, manu, sula, mone, nggili, lona, helo, fua, neu, ufi, landak*; 8) *leonak*: *nafi, suek, lani, hele, adam*; 9) *mbau umbuk*: *henuhili, modok*. Suku induk dari kesembilan klen adalah *Elo, Fando, Bolu, Luna dan Todak*.
- B. rumpun Takatein memiliki 11 klen yaitu: *heniteik (raja II)*: *tungga, elimanafe, ndaomanafe, manafe, pah, bunda, ndun, saudila, nggili, tongge, mboe, kana*; 2) *mbuteik*: *sula, ndunfoes, bessi, hilli, koten, talak, duli, langge, muda, sodak, lusi, doa, dae, seik, moi, detan, sely, feoh, adu, ufi, binloe, dale*; 3) *sauteik*: *soluk, ndun, tallo,*

bulu, loak, mbuik, saa, lalai, moy, fanggi, nggili, lusi; 5) mbauleok: ndolu, mbau, solo, seli, mbui, polo, henuk, pah, poy, fanggi, hili, ndun, lesik; 6) leseleok: molak, lesik, tali; 7) laniteik: ndun, kiu, adulenggu; 8) leolu (fetor): nolu, manu, lau, saduk, adu, pah, lete, mbau, kilak, moe, detan, busu, fafok, fek, nafi, lolo, seuk; 9) saiteik: sain, suek, lu; 10) nubuteik: lilo, nggili, ndolu; 11) mangi: mbuik, salu, luik, detan, kanu, nanuk, sau, pah, lani, sula, adubao, modok, henuk, mone. Tiga klen yang tidak termasuk kedua rumpun yaitu: 1) ambik: mbalu; 2) Ndau: menda; dan 3) Balaoli: mandas, menda, naluk, taek, ndun (Zoh dan Indrayana, 2008:70)

Setelah masuknya Belanda, *maneleo* tidak saja mengurus adat, tetapi juga merangkap pemerintahan negeri. Pada tahap ini *maneleo* disebut juga *manesio* (arti harfiahnya ialah 'raja sembilan'). Disebut raja sembilan karena setelah dibebani dengan tugas-tugas negeri maka tugasnya menjadi banyak. Angka 9 (sembilan adalah angka puncak). Di bawah *maneleo/manesio* terdapat *langgak* (*mane nggorok*) dan dibawah *langgak* terdapat *lasin*.

Selain dari pemerintahan adat, terdapat pula lembaga-lembaga lainnya, seperti *mane dombe/dope* (raja pisau (harfiah): jaksa adat), *mana ke* atau *mana nggero fura* (hakim adat), *mane dae langgak* (kepala pertanahan), *mane raraa/lalaa* (pengurus kompleks persawahan), *mane mok* (penegak hukum dalam bidang perkebunan, perladangan), *mana horo/mana hopu papadak* (penegak hukum dalam bidang pengairan, kelautan, kehutanan, dan tanaman umur panjang), *mana helo* (pujangga/ahli silsilah/penyair), *mana kila oe* (distributor air), dll.

Pemimpin adat tertinggi dalam masyarakat Rote adalah *mane songgo* atau imam yang dibantu *mane dope* atau hakim agung yang bertugas mengurus semua hal yang berhubungan dengan adat, mengadili dan memutuskan perkara pidana dan perdata, dan menyampaikan hasil musyawarah yang diperoleh warga. *Manesio* atau *temukung* atau lurah berkedudukan sesudah *manek* atau *fettor*. *Dae langgak* seorang saksi ahli yang memiliki pengetahuan luas tentang tanah adat. *Langgak mook* fungsinya sama dengan *dae*

langgak pada tingkat kampung. *Langgak* atau kepala kampung, lasin sama dengan ketua RT. Rakyat dipimpin seorang *maneleo*. Kelompok masyarakat dalam satu *nusak* yang terikat dalam satu kekeluargaan atau marga disebut *Leo* dipimpin seorang *maneleo*.

Kepercayaan masyarakat Rote sebelum mengenal Kristen disebut *Dinitiu*, mereka percaya adanya Dewa-dewa, roh nenek moyang dan alam gaib. Dewa-dewa ini disebut *nitu mook*, Dewa yang paling agung kedudukannya yaitu *Teluk Aman Lai Londa* yaitu Dewa Hujan dan Kemakmuran. Pada bulan Juli – Agustus dilaksanakan upacara memohon hujan, anggota *uma nitu* atau *mana songgo* memmbawa persembahan ke rumah adat atau *uma nitu* kemudian dilanjutkan dengan perayaan *hus* atau *limbe* repository. uksw.edu/bitstream/123456789/4024/4/T1_712011026_BAB%20III.pdf oleh LMM Manuain - 2013 -1 diakses tanggal 22 Agustus 2017

Siklus kehidupan masyarakat Rote dari kehamilan, lahir, perkawinan sampai kematian. Pada saat kehamilan istri, suami tidak boleh mencukur rambut sampai istri melahirkan supaya anak selalu beruntung sampai lahir. Setelah kelahiran si ibu tidak boleh mandi air dingin selama tiga hari, hanya boleh mandi air hangat memakai periuk besar. *Fua funik* adalah upacara menggantung ari-ari. Ari-ari bayi dimasukkan *kapisak* dari lontar, didalamnya dimasukkan tempat nira disebut *haik* (foto 15) kemudian digantung di atas pohon lontar. Setelah bayi umur tiga hari dilakukan upacara menelungkupkan periuk besar disebut *natono bane*, istri yang selesai melahrkan sudah boleh mandi air dingin sehingga periuk besar tidak dipakai lagi. Selanjutnya upacara syukuran sederhana. *Fua usek* adalah upacara pada saat pusar bayi lepas dibungkus kain bersih, diikat dengan sepotong daging kering disebut *lalolak*, ketupat persegi empat disebut *tuas do hak* berisi segenggam beras kemudian digantung di atas pohon lontar atau diletakkan dalam perahu kecil dari sabut kelapa dan daun lontar sebagai layar untuk dilepaskan ke laut.



Foto 15 . Tempat air nira (*haik*) yang diambil dari pohon lontar

Sumber: dokumentasi peneliti tahun 2017

Upacara perkawinan memiliki tahap: 1) peminangan, diawali dengan pembawaan tempat sirih pinang (*mbotik*) di pagi hari oleh bibi dari pihak lelaki (*ti'i*) ke rumah pihak perempuan. *Ti'i* menunggu hingga gadis yang akan dipinang bangun (*ndao ndao*). Orang tua gadis akan menyapa saya datang mencari tenaga kerja (*au mai sangga bei bara haik*, apabila disetujui, dijawab oleh keluarga perempuan silakan orang tua datang *felasik ala mai*. Pada tahap peminangan ini, pihak lelaki mengumpulkan seluruh keluarganya sebagai keluarga penerima perempuan disebut *bapa te'o mama te'o* dan keluarga pemberi perempuan disebut *bei huk to'o huk*; 2) peminangan secara resmi, keluarga lelaki datang dengan rombongan yang berjumlah ganjil, biasanya 5-7 orang. Pada tahap ini keluarga akan membahas *belis* dan pembayaran/pengantarannya. Pihak lelaki memiliki acara *tu'u belis*. Pada saat *tu'u belis* seluruh keluarga lelaki diundang dan mengumpulkan sumbangan *belis*, dimulai dari mendaftar keluarga yang akan diundang, membicarakan sumbangan yang akan diberikan, dan menyerahkan sumbangan *belis*; 3) pengantaran *belis*, dilakukan sesuai kesepakatan waktu kedua belah pihak dan penyerahannya dilakukan dengan mengucapkan kata-kata penyerahan dan kata-kata penerimaan; 4) *terang kampung*, proses pengukuhan oleh imam adat sebagai pemimpin upacara perkawinan. Upacara

perkawinan dalam *terang kampung* disebut *natu du sasook*, sebuah pemberitahuan bahwa lelaki dan perempuan tersebut telah resmi sebagai suami istri. Upacara ini disertai dengan pesta yang mengundang kerabat dan kenalan. Pada pagi harinya, pengantin perempuan diantar ke rumah penganti lelaki disebut *napora atau dode*.

Pria Rote dalam memilih perempuan untuk menjadi istri harus memperhatikan ungkapan berikut: *Tu titino, sao mamete, tu sangga duduak, sao sangga safik, fo ana tea bae nggi leo, mba ana kula haba babongkik* artinya: kawin selidiki baik-baik, kawin harus diteliti, kawin harus mencari pikiran yang sama, kawin untuk menyatukan hati agar dapat mempersilakan sirih kepada kerabat dan handai taulan. Sistem perkawinan ada pantangan tidak boleh menikah dalam satu marga yang sama (satu *leo*) supaya tidak terjadi bencana.

Kehidupan masyarakat Rote tersebut tidak dapat dipisahkan dari pohon lontar dimulai sejak ari-ari bayi yang baru lahir dibawa atau digantung ke atas pohon lontar menggunakan *kapisak* dari daun lontar. Bayi yang baru lahir harus mencicipi gula air, setelah meninggal keranda terbuat dari batang lontar. Berbagai peralatan tradisional yang dipergunakan masyarakat sehari-hari untuk memasak, tempat sirih, dan peralatan upacara seperti tempat nira (*haik*) juga dari daun lontar. Peti mati yang digunakan apabila meninggal dunia juga dibuat dari batang pohon lontar disebut *kopak*. Apabila ada orang yang meninggal pada saat memanjat pohon lontar maka pohon tersebut harus ditebang dan menjadi *kopak*.

Pakaian adat sebagai tanda pembeda identitas orang Roti sangat khas dan pria memakai topi daun lontar lebar seperti *sombrero Ti'I Langga*. Motif kain celup ikat tradisional mereka merupakan gabungan motif-motif asli dengan disain patola yang diambil dari kain Gujarat yang merupakan barang dagangan impor kaum elit VOC pada abad ke-18. Alat musik yang juga dikenal di Pulau Sabu ini dibuat dari daun lontar. Alat ini biasa dimainkan dalam berbagai kegiatan sosial yang penting seperti

pernikahan, kematian, kelahiran, dan ulang tahun. *Tii Langga* adalah topi yang menjadi ciri khas Rote, bentuknya lebar seperti sombrero dari Mexico, di bagian atas topi terdapat antena disebut *koak*. Bentuk *koak* berbeda-beda tergantung jabatan yang memakai topi. Pimpinan akan memakai bentuk antena berbeda dengan anak buahnya. Alat musik yang terkenal dari Rote adalah Sasando yang sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia.

Pola permukiman penduduk Rote memanjang dengan susunan permukiman membentuk jalur sungai (*nggolak*). Rumah kepala marga (*mane leo*) berada di paling depan. Penduduk di desa Oelua masih ada yang memiliki permukiman tradisional meskipun jumlahnya relatif sedikit karena sudah digantikan permukiman dengan bahan bangunan batako, semen dan beratap genteng atau seng (foto 16), meskipun bahan-bahan bangunan modern namun bentuk bangunan masih seperti arsitektur bangunan tradisional terutama bentuk bagian atap yang tinggi atau runcing.



Foto 16 . Permukiman penduduk nelayan di desa Oelua, bentuk atap runcing

Sumber: dokumentasi peneliti tahun 2017

Permukiman tradisional orang Rote disebut *uma nitu*. Bangunan sangat sederhana terdiri dari dua lantai atau tingkat, lantai pertama untuk tempat tinggal disebut *uma lai* sedangkan lantai kedua disebut *uma hunuk lain* untuk menyimpan makanan

seperti padi, jagung, sorgum dan sebagainya. Di dusun Oelaba yang sebagian besar nelayan, di lantai kedua ini biasanya tempat untuk menyimpan layar dan keperluan berlayar lainnya. Atap rumah terbuat dari daun lontar, jarak atap rumah sampai tanah sekitar satu meter (foto 17). Pada bubungan atau bagian atas ada kayu panjang melintang disebut *toka* dengan kayu bersilang dibagian ujung disebut *bohani* berfungsi menahan *toka*. Pada kedua ujung terdapat ukiran sebagai wujud duri daun lontar yang masih muda supaya binatang tidak memakan pucuk daun. Pondasi pagar halaman ada yang dibuat dari batu-batu karang yang disusun, ada juga yang terbuat dari pelepah daun lontar sampai satu atau dua meter. Lumbung tempat menyimpan padi juga memiliki atap dari daun lontar (foto 18).

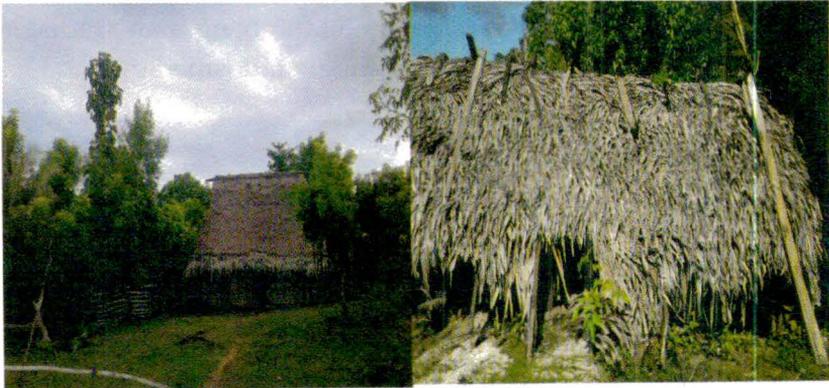


Foto 17 dan 18 . Permukiman dan lumbung tradisional masyarakat Rote

Sumber: dokumentasi peneliti

Seperti telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya, permukiman penduduk nelayan di desa Oelua yang terletak di dusun Oelaba khususnya bagi para pendatang memiliki tipe permukiman berbeda dengan penduduk asli Rote. Sebagian besar permukiman penduduk pendatang memiliki rumah yang terbuat dari semen, batako sedangkan penduduk asli Rote yang sebelumnya memiliki rumah tradisional juga sudah relatif banyak yang merubah bentuk rumahnya, sudah relatif modern tetapi juga

memiliki ruangan di bagian atas untuk menyimpan peralatan berlayar seperti dayung, senter, radio, dan sebagainya.

BAB III

KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI NELAYAN LINTAS BATAS SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas wilayahnya hampir 70 % merupakan wilayah lautan. Keadaan ini memiliki potensi ekonomi kelautan sangat besar dan beragam di antaranya sumber daya ikan. Melimpahnya potensi laut berupa ikan semestinya pendapatan nelayan sangatlah memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kenyataannya tidaklah demikian, kemiskinan masih banyak melanda kehidupan nelayan. Dari sisi ekonomi hasil tangkapan nelayan masih jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena minimnya modal yang dimiliki oleh nelayan, tekanan dari pemilik modal, sistem bagi hasil yang tidak adil, perdagangan atau pelelangan yang tidak transparan, serta pola atau budaya kerja yang masih apa adanya.

Kondisi kemiskinan yang dialami oleh nelayan menyebabkan mereka rentan konflik dan hanya menjadi objek. Hukum yang semestinya memberikan perlindungan ternyata tidak optimal. Dalam undang-undang perikanan hanya ada 2 ayat dalam pasal 1 yang mengatur nelayan, itupun hanya ayat yang memberikan pengertian nelayan dan nelayan kecil.

Masyarakat nelayan di Indonesia dihadapkan pada kompleksitas permasalahan kemiskinan. Terkait dengan kemiskinan nelayan tersebut Mubyarto et.al (1984) menyebutkan

bahwa masyarakat nelayan Indonesia adalah masyarakat termiskin dari kelompok masyarakat miskin lainnya (the poorest of the poor). Hal ini diperkuat oleh fakta yang dipaparkan BPS dan SMERU pada tahun 2002, bahwa desa pesisir yang berjumlah 8.090 desa memiliki Poverty Headcount Index (PHI) sebesar 0,3214 atau 32,14 %. Dengan demikian, masyarakat pesisir Indonesia termasuk di dalamnya adalah masyarakat nelayan yang berjumlah 4.015.320 jiwa masih hidup di bawah garis kemiskinan (DKP,2008).

Kemiskinan tersebut juga berlaku bagi kehidupan nelayan yang ada di Desa Oelua, Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao, padahal tangkapan yang mereka usahakan di laut di kepulauan Pasir terutama di daerah perbatasan Australia adalah teripang. Komoditi ini sebenarnya memiliki nilai jual yang cukup mahal, dan keadaan seperti ini setidaknya bisa mengangkat derajat kehidupan masyarakat nelayan yang ada di Desa Oelua.

Secara geografis, pulau Pasir merupakan salah satu pulau terluar di bagian selatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulau yang dalam bahasa Rote disebut Nusa Solo Kaek ini hanya terletak 60 mil laut dari garis pantai Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 200 mil laut dari pantai barat Australia. Berdasarkan pengalaman para nelayan di Oelua, Rote Barat Laut, Pulau Pasir dapat dicapai dalam waktu 12 – 14 jam dengan menggunakan perahu layar. Bagi sebagian besar nelayan tradisional Indonesia, khususnya nelayan dari Pulau Rote, pulau ini dikenal bukan karena daerahnya berpasir, melainkan pulau tersebut menghasilkan air tawar yang sangat berguna bagi para nelayan. Di samping itu pulau ini sebagai tempat berlindung dari amukan badai ataupun tempat beristirahat sambil menunggu angin yang akan membawa mereka kembali ke kampung halamannya di Rote. Pulau Pasir terkenal kaya akan teripang dan lola. Daerah ini tidak hanya menjadi lahan pencaharian nelayan Rote saja, tetapi juga dari beberapa daerah lain di Indonesia, seperti Madura dan Sulawesi.

Pola arus dan arah angin di daerah tersebut yang menyebabkan kapal-kapal tradisional Indonesia harus pergi dan pulang melalui

Pulau Pasir. Akibatnya sampai kapanpun prinsip semua nelayan dari daerah Rote tetap sama, yaitu selagi bintang tiga rao bersinar, apa pun risiko yang akan terjadi mereka akan tetap berlayar menuju Pulau Pasir sebagai nusa impian mereka untuk mencari nafkah. Bintang tiga rao adalah bintang pedoman bagi nelayan Pulau Rote berlayar dari Pelabuhan Pepela menuju gugusan pulau-pulau Pasir.

A. KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA NELAYAN

Nelayan penangkap teripang yang berasal dari Desa Oelua terdiri dari dua suku besar yaitu etnis Rote dan etnis Bajo. Dalam melakukan aktivitasnya kedua etnis ini saling membantu, baik ketika melaut maupun pada saat mereka berada di darat. Kehidupan mereka sangat rukun meskipun etnis bajo yang ada di Desa Oelua merupakan kelompok pendatang. Berdasarkan penuturan beberapa orang nelayan, kelompok etnis Bajo berasal dari Alor yang sudah bermukim di Oelua hingga beberapa keturunan. Kelompok nelayan yang berasal dari suku Bajo pada umumnya tinggal berkelompok dan bermukim di pinggir laut.

Pola pemukiman dari komunitas Bajo berbentuk kampung yang saling berdekatan atau mengelompok padat dengan jalan-jalan kecil. Pemukiman komunitas Bajo memusat di lingkungan Oelaba sangat dekat dengan pusat pemerintahan Desa Oelua. Pemukiman penduduk yang ada di Desa Oelua cukup ramai terutama pada saat mereka tidak melaut. Umumnya mereka baru melaut ketika musim teripang tiba sekitar bulan Juli sampai bulan Nopember. Selain menangkap teripang, kelompok nelayan yang ada di Desa Oelua juga menanam rumput laut. Beberapa tahun terakhir hasil dari budidaya rumput laut sangat sedikit akibat adanya pencemaran.

Masyarakat nelayan yang ada di Desa Oelua sering melakukan upacara atau ritual, di antaranya ketika akan melaut atau selamatan perahu baru. Upacara selamatan biasanya dilakukan dengan berdzikir bersama para nelayan terutama masyarakat nelayan

yang beragama Islam. Dzikir ini biasanya dipimpin oleh seorang ustadz. Dalam melakukan upacara ini sarana yang dipergunakan umumnya dengan beras yang dicampur dengan air kunyit. Atau beras kuning. Tujuan dari upacara ini adalah supaya perahu yang mereka gunakan dan pemiliknya mendapat keselamatan selama mereka melaut dan hasil yang didapat melimpah.

Pelaksanaan upacara ini biasanya dilakukan di atas sampan, ataupun di darat. Selama berdzikir mereka memanjatkan doa, dan diakhiri dengan penaburan beras kuning di atas perahu. Di samping upacara selamatan perahu baru, kelompok nelayan dari Desa Oelua juga melakukan upacara selamatan laut. Upacara ini selalu mereka laksanakan setiap tahun. Upacara ini dilakukan karena para nelayan percaya bahwa di laut ada penghuni yang tidak terlihat oleh mata. Adapun tujuan dilakukannya upacara ini agar hasil tangkapan berlimpah dan mereka mendapat perlindungan dan keselamatan selama melaut.

Setelah pemekaran wilayah perhatian pemerintah kabupaten terhadap budaya masyarakat semakin meningkat. Ada pencatatan warisan budaya tak benda oleh dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten untuk melestarikan budaya yang dimiliki misalnya: Sasando sudah menjadi warisan budaya tak benda nasional (Indonesia).

1. Tingkat Pendidikan Nelayan

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat suatu daerah menjadikan kehidupannya semakin maju. Masyarakat Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan Rote Ndao khususnya masih jauh tertinggal dalam hal pendidikan. Keteringgalan ini sangat dirasakan ketika Rote Ndao masih merupakan wilayah Kabupaten Kupang. Belakangan semenjak Rote Ndao menjadi kabupaten sendiri kemajuan atau perubahan mulai dirasakan oleh penduduk yang ada di Kabupaten Rote Ndao. Kemajuan ini sangat dirasakan terutama dalam hal tersedianya sarana pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai dengan SMA/

SMK hingga ke pelosok pedesaan. Demikian juga dengan mutu pendidikan semakin menunjukkan kemajuan jika dibandingkan ketika masih menjadi bagian dari Kabupaten Kupang.

Bagi masyarakat Desa Oelua, terutama yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, tingkat pendidikannya bisa dikatakan masih sangat rendah apalagi yang memiliki pendidikan di bidang kelautan atau perikanan sangat langka. Mereka menjalankan usaha terutama menangkap teripang berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Menangkap teripang maupun proses penjualan hasil tangkapan tanpa melalui proses perencanaan yang baik, dapat atau tidaknya dalam melakoni usaha sebagai nelayan menjadi urusan nasib, tanpa ada usaha evaluasi untuk memperbaiki sistem dan metode guna efektivitas dan efisiensi.

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dari manusia untuk dapat menunjang masa depan kehidupannya. Pendidikan yang kurang atau rendah menimbulkan ketertinggalan baik dalam bentuk pengetahuan yang berkaitan dengan teknologi maupun yang berkaitan dengan informasi perkembangan usaha, demikian juga dengan ketrampilan para nelayan yang tidak berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Kondisi nelayan dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan, mereka tetap saja berusaha dengan cara-cara yang sangat sederhana dan sistem usaha tanpa ada perubahan.

Penangkapan maupun proses pemasaran teripang khususnya tanpa manajemen yang baik menyebabkan kehidupan masyarakat nelayan tergolong sebagai masyarakat miskin. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan jenjang pendidikan terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pesisir. Melalui peningkatan mutu pendidikan akan dapat mengentaskan kemiskinan yang dialami oleh hampir semua nelayan yang ada di tanah air termasuk nelayan dari daerah Oelua yang sering melakukan penangkapan teripang ke gugusan pulau-pulau pasir yang ada di wilayah perbatasan dengan negara tetangga Australia. Usaha memajukan tingkat pendidikan bagi masyarakat Desa Oelua

Kemampuan finansial yang sangat kecil membuat nelayan penangkap teripang tidak punya daya saing untuk mengembangkan usahanya dalam skala usaha yang layak. Para nelayan saat ini berusaha hanya untuk sekedar dapat memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarga, mereka umumnya belum mampu berusaha dengan skala usaha ekonomi yang dapat memberikan keuntungan sebagaimana layaknya suatu usaha bisnis. Nelayan juga tidak punya kemampuan dalam akses permodalan di lembaga perbankan karena umumnya mereka tidak memiliki harta atau agunan yang dapat dipertimbangkan untuk perolehan modal. Rendahnya tingkat pendidikan juga berdampak terhadap kemampuan manajerial para nelayan, seperti misalnya meramalkan hal-hal yang akan terjadi berkaitan dengan kemampuan menganalisa kondisi yang berkaitan dengan pasar, produk dan hal-hal yang mempengaruhinya, yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam perencanaan kegiatan, demikian juga dengan penguasaan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya masih rendah.

Para nelayan juga belum mampu menguasai kondisi eksternal, dan ini merupakan tugas pihak-pihak yang memiliki otoritas terutama dinas Perikanan dan Kelautan. Pemerintah belum memiliki kebijakan usaha-usaha apa yang paling efisien di bidang perikanan, pasar dan komoditas yang dapat diusahakan, dan didaerah-daerah mana saja tempat-tempat yang dapat dimanfaatkan untuk usaha perikanan, demikian juga dengan pemberdayaan masyarakat nelayan. Umumnya nelayan-nelayan tradisional berusaha seadanya sesuai dengan kondisi di mana mereka berada, mereka tidak memiliki infrastruktur sebagaimana suatu usaha yang baik seperti tidak memiliki dermaga pendaratan guna kelancaran usahanya, tidak memiliki tempat penyimpanan hasil usaha yang dapat mengurangi resiko kerugian uapun tempat pembuangan limbah yang layak guna menjaga kesehatan lingkungan.

Ilmu adalah suluh bagi anak bangsa dalam menapak kehidupan dan penghidupannya. Teknologi membantunya dalam menjawab berbagai ide kesulitan yang dihadapinya. Agama menuntunnya akan kejujuran, dosa iman dan taqwa akan kebesaran Nya.

Kebudayaan merupakan jembatan sekaligus perekat keragaman anak bangsa ini. Dengan pendidikan mengantarkan ilmu, teknologi, agama dan kebudayaan menjadikannya insan yang cerdas dan berkepribadian.

Pendidikan nelayan lintas batas yang ada di desa Oelua hampir sebagian besar hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar. Rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu penyebab rendahnya penghasilan para nelayan yang ada di desa Oelua. Hal ini juga menyebabkan sulitnya mereka berkomunikasi ketika berhadapan dengan polisi perairan Australia. Bagi nelayan yang berasal dari daerah Rote khususnya dari Oelua dengan tingkat pendidikan rata-rata tamatan sekolah dasar banyak mengalami kendala dalam hal komunikasi. Tingkat pendidikan seperti ini sering menjadi penghambat ketika mereka berhadapan dengan polisi perairan Australia. Kendala seperti inilah yang menyebabkan banyak nelayan tradisional khususnya nelayan yang menangkap teripang di gugusan Pulau Pasir yang merupakan wilayah Australia ditangkap karena dianggap memasuki perairan Australia. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh sebagian besar para nelayan yang ada di Desa Oelua menjadi persoalan yang mendasar bagi mereka untuk bisa bebas dari kemiskinan yang mereka alami hingga saat ini.

Pemerintah daerah Rote Ndao terutama dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah menyiapkan sarana pendidikan untuk sekolah dasar di Desa Oelua. Bagi warga desa yang ingin meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi harus memilih ke kota kecamatan atau kota kabupaten. Kondisi ekonomi yang sangat terbatas menyebabkan hampir sebagian besar dari warga desa untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Ketidakberdayaan dalam hal ekonomi merupakan salah satu penyebab warga Desa Oelua tidak bisa meneruskan pendidikan.

Kemiskinan ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan para nelayan dari daerah Oelua dan hampir di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Keadaan seperti ini tidak hanya disebabkan oleh penghasilan saja. Kendala lain yang menyebabkan rendahnya

tingkat pendidikan adalah tidak tersedianya sarana pendidikan yang lebih tinggi di daerah Oelua. Demikian juga untuk biaya pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi memerlukan biaya yang cukup besar. Sangatlah beralasan jika kebanyakan orang tua yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, lebih memilih mengajak anak-anaknya terutama yang laki-laki menjadi nelayan daripada meneruskan pendidikan.

Setelah pemekaran wilayah menjadi kabupaten, fasilitas pendidikan di kabupaten Rote Ndao semakin berkembang juga, semakin banyak SMA Negeri maupun swasta serta ada perguruan tinggi swasta. Adanya fasilitas tersebut menyebabkan penduduk desa lebih dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi sehingga anak-anak sudah mulai sekolah sampai SMA bahkan beberapa sudah sarjana. Kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan semakin bertambah sehingga anak-anak nelayan sudah mulai memiliki pendidikan lebih tinggi dibandingkan orang tuanya.

2. Sistem Keekerabatan

Suku Rote, sebagai penduduk asli yang mendiami Pulau Rote mempunyai sistem keekerabatan mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar dan dikenal dengan nama atau istilah

- a. Keluarga batih di dalam bahasa daerah disebut *teidalek* yang artinya orang-orang yang seasal, dalam hal ini yang lahir dari satu kandungan. Biasa juga disebut dengan istilah *uma isi* yang artinya isi rumah. Dari keluarga kecil ini yang menjadi kepala rumah tangga atau pimpinan dalam keluarga adalah sang ayah.
- b. Keluarga luas yang disebut *leo* yaitu sekelompok masyarakat yang terdiri dari keluarga-keluarga batih yang lahir dari satu keturunan tertentu. *Leo* ini dapat disamakan dengan marga.

Prinsip keturunan yang dianut suku Rote adalah patrilineal yaitu berdasarkan garis ayah yang berperan dan memiliki

kekuasaan. Hal ini dapat kita lihat dari adanya pemberian nama pada nama anak laki-laki. Sebagai contoh apabila ditemui seorang laki-laki yang bernama sula Nduk, maka Sula adalah namanya sendiri, sedangkan Nduk adalah nama dari sang ayah.

Apabila orang bersangkutan kemudian hari menikah dan memperoleh keturunan laki-laki, maka anak laki-laki itu diberinya nama Adu, maka harus ditambah di belakang nama Adu itu nama ayahnya yaitu Sula sehingga nama anaknya menjadi Adu Sulak. Huruf mati atau konsonan K dalam kata Sulak mempunyai pengertian milik atau anak dari. Apabila ada penuturan silsilah (orang Rote) hanya dituturkan garis keturunan laki-laki, sedangkan yang perempuan diabaikan sama sekali. Demikian juga halnya dalam pembagian warisan, baik berupa rumah, tanah, maupun ternak hanya boleh diwariskan kepada anak laki-laki saja, sedangkan bagi anak perempuan hanya mendapatkan perabot rumah tangga dan perhiasan.

Dalam hal hubungan kekerabatan ada istilah *To'o* atau paman. *To'o* adalah saudara laki-laki dari pihak ibu. Hubungan antara *To'o* dengan keponakannya bersifat magis, terutama di dalam hal perkawinan, kematian, dan pembagian waris. Semua hal tersebut telah diatur dalam norma adat istiadat dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi. Stratifikasi dan komunitas, adanya kelompok-kelompok sosial serta peranan dan fungsinya di dalam masyarakat yang lahir dari satu keturunan tertentu. Kelompok sosial yang dimaksud tidak lain adalah *leo* atau marga. Di dalam satu desa terdapat lima *leo*, yang di antaranya ada dua *leo* yang mempunyai cabang-cabangnya yang disebut *nggitak*.

Kelima *leo* tersebut adalah sebagai berikut: *leo ene* yaitu leo raja yang sekaligus memegang jabatan sebagai *mane dope* atau hakim. *Leo modok* yaitu leo *fetor* atau wakil dari raja. *Leo suki* yaitu leo tuan tanah yang bertugas dalam urusan agraria dengan cabang-cabangnya seperti *leo suki*, *leo lebo*, *leo nggaliau* dan *leo lolena*. *Leo kunak* adalah leo rakyat jelata atau rakyat biasa yang terdiri atas *leo kumak*, *leo nggi*, *leo faisima* dan *leo falaama*. *Leo kahu* yaitu leo rakyat yang sebagian berasal dari Ndao dan sebagian lagi dari *leo suki*.

B. KEHIDUPAN EKONOMI NELAYAN

Kehidupan nelayan pada umumnya berada pada garis kemiskinan, demikian juga halnya dengan nelayan yang ada di Desa Oelua. Sebagai nelayan yang menggantungkan hidup dari menangkap teripang sangat dipengaruhi oleh sedikit banyaknya hasil tangkapan. Hasil tangkapan akan sangat menentukan tingkat penghasilan dan kesejahteraan para nelayan. Nelayan penangkap teripang ini hampir sebagian besar merupakan awak kapal.

Hambatan utama yang dihadapi oleh nelayan penangkap teripang dari desa Oelua adalah masalah modal. Hampir setiap akan melaut mereka mengalami kendala dalam hal permodalan. Modal sangat menentukan dalam setiap usaha yang dilakukan. Tanpa adanya modal yang memadai akan menjadi penghambat setiap usaha. Nelayan lintasbatas dari Desa Oelua hampir semuanya mengalami kendala terutama modal uang ketika mereka akan melaut. Modal awal yang mereka perlukan ketika akan melaut sebenarnya tidak terlalu besar. Walaupun modal yang diperlukan tidak terlalu besar, kenyataan menunjukkan hal ini selalu mereka alami ketika akan pergi menangkap teripang.

Keadaan ini hampir dialami oleh semua nelayan dari daerah Oelua. Sebenarnya di daerah ini sudah ada Koperasi nelayan, namun sayang sampai saat ini mereka belum sanggup mengatasi kesulitan yang dialami oleh para nelayan penangkap teripang. Sebenarnya modal awal yang diperlukan oleh para nelayan tidak terlalu banyak. Menghadapi kenyataan seperti ini umumnya para nelayan melakukan peminjaman modal kepada pemilik perahu. Hal seperti ini akhirnya menyebabkan para nelayan selalu berada pada garis kemiskinan, karena hasil yang didapat akan disisihkan guna melunasi pinjaman dari para pemilik perahu. Hasil yang mereka peroleh sebenarnya sangat menjanjikan, karena harga jual dari teripang saat ini cukup tinggi, bila dibandingkan dengan penghasilan sebagai nelayan penangkap ikan. Namun sampai saat ini umumnya keadaan para nelayan penangkap teripang dari daerah Oelua khususnya, tetap saja mengalami kemiskinan.

Koperasi yang ada sampai saat ini belum mampu membantu para anggotanya terbebas dari belenggu kemiskinan.

Ada tiga pengelompokan nelayan penangkap teripang dari daerah Oelua yang pergi ke daerah perbatasan yaitu pemilik kapal, juragan dan anak buah kapal. Pemilik kapal tidak terlibat langsung ke daerah perbatasan untuk menangkap teripang, namun semata-mata menyiapkan alat angkut berupa perahu layar. Walaupun para pemilik kapal tidak ikut melaut namun dalam pembagian hasil usaha para pemilik kapal nantinya akan mendapatkan sepertiga dari hasil yang didapat selama juragan dan anak buah kapal pergi menangkap teripang. Juragan adalah komandan yang mengatur segalanya dalam upaya mereka pergi menangkap teripang. Segala keperluan mulai dari mencari anak buah kapal, konsumsi dan pembagian tugas menjadi tanggung jawab juragan.

Pembagian hasil seperti itu menunjukkan bahwa nelayan khususnya nelayan penangkap teripang tetap saja terjerat dalam kemiskinan. Dari hasil pembagian seperti itu tidak akan mampu meningkatkan taraf kehidupan mereka. Sekilas menunjukkan bahwa upah yang mereka dapatkan dari usaha menangkap teripang sangat menjanjikan, terlebih lagi jika hasil tangkapannya cukup banyak. Namun jika dihitung secara seksama hasil yang mereka dapatkan sangat kecil, karena penghasilan tersebut bukan sepanjang tahun. Hasil yang mereka dapatkan dari penangkapan teripang sebenarnya cukup singkat yaitu sekitar 2 – 3 bulan melaut. Hasil ini tidaklah mampu untuk mencukupi kehidupan keluarganya selama setahun.

Besar kecilnya pendapatan sangat tergantung keberhasilan dari para juragan mengatur dan memotivasi anak buah kapal ketika mereka pergi ke wilayah Pulau Pasir guna menangkap teripang. Berdasarkan penuturan salah seorang juragan kapal yang bernama Rudi mengatakan bahwa dalam hatinya mereka sudah bulat bahwa kepergiannya menangkap teripang adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Adanya motivasi seperti inilah yang mendorong mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap teripang sebanyak-banyaknya. Semakin banyak

hasil tangkapan berarti semakin besar pendapatan yang mereka dapatkan.

Semua keperluan dan persiapan yang harus dilakukan sebelum mereka berangkat ke daerah perbatasan dibawah pengawasan juragan. Besarnya tanggung jawab seorang juragan akan berpengaruh dalam hal pembagian penghasilan ketika mereka sudah balik dari daerah perbatasan. Walaupun menghasilkan yang diperoleh lebih besar dari awak kapal, jika dilihat dari kenyataan kondisi ekonomi seorang juragan masih tetap saja mereka hidup dibawah kemiskinan.

Tinggi rendahnya tingkat perekonomian para nelayan yang ada di Desa Oelua tidak bisa diukur dari penghasilan mereka menangkap teripang saja. Besarnya biaya hidup para keluarga nelayan penangkap teripang tidak akan terpenuhi jika hanya mengandalkan dari hasil tangkapan teripang yang hanya berlangsung sekitar tiga bulan. Guna menutupi kebutuhan hidup selama setahun dengan penghasilan sekitar 10 – 15 juta sangat jauh dari harapan.

Pada umumnya para nelayan di desa Oelua sangat lemah dalam hal permodalan. Berdasarkan pengakuan dari para nelayan di desa ini mereka hanya memiliki ketrampilan atau keahlian sebagai penangkap teripang. Sebelum pergi melaut juragan memegang peranan yang sangat penting. Dia bertugas mencari anak buah kapal yang biasanya didatangkan dari daerah Alor. Demikian juga halnya dengan berbagai kebutuhan yang diperlukan ketika mereka pergi melaut. Karena terbatasnya modal yang mereka miliki, terpaksa mereka harus meminjam dari pemilik kapal ataupun dari luar. Utang ini akan dikembalikan ketika mereka sudah balik dari perbatasan. Ada kesepakatan yang tidak tertulis antara juragan atau peminjam dengan pemilik kapal atau pemberi modal yaitu pengembalian modal diberikan bunga sekitar 15 %.

Sungguh keadaan yang cukup memberatkan bagi para juragan ketika mereka akan pergi menangkap teripang. Lemahnya permodalan merupakan kendala yang sangat sulit mereka pecahkan, walaupun ketika balik mendapatkan hasil yang

lumayan. Penghasilan yang cukup tinggi harus mereka sisihkan terlebih dahulu untuk membayar pinjaman modal dan bunga kepada pemilik modal. Walaupun mereka memiliki tekad yang bulat pergi menangkap teripang untuk memperbaiki taraf hidup, tetap saja mereka berada dibawah garis kemiskinan.

Kenyataan menunjukkan bahwa hampir di setiap keluarga nelayan yang ada di desa Oelua sudah memiliki rumah beserta dengan perabotan dan sebagainya dari hasil sebagai nelayan penangkap teripang, tetapi tingkat kesejahteraannya masih tergolong rendah. Kehidupan nelayan ini masih saja bergulat dalam kemiskinan, karena hasil yang mereka dapatkan belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama ketika mereka tidak melaut. Di satu sisi mereka dapat memenuhi rumah tangganya dengan berbagai kebutuhan sekunder berkat hasil menangkap teripang, namun di sisi lain kehidupan mereka masih saja bergulat pada tingkat kemiskinan.

1. Pendapatan Nelayan

Nelayan lintas batas dari Rote Ndao pada umumnya memiliki pendapatan dari hasil menangkap teripang cukup memadai. Hasil sekali melaut selama 2 – 3 bulan bisa mencapai 10 – 12 juta. Hal ini sangat tergantung dari sedikit banyak hasil teripang yang mereka dapatkan ketika melaut. Ketika mereka banyak mendapatkan hasil tangkapan maka penghasilan akan tinggi, demikian juga sebaliknya semakin sedikit hasil tangkapan maka penghasilan akan semakin sedikit. Besarnya pendapatan yang mereka peroleh dari hasil menangkap teripang sudah sangat memadai.

Penghasilan yang mereka dapatkan itu sudah merupakan pendapatan bersih yang mereka dapat selama \pm 3 bulan. Hasil yang mereka dapatkan selama tiga bulan melaut lumayan besar, namun jika penghasilan yang mereka dapatkan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama setahun, penghasilan sebesar 12 – 15 juta masih tergolong rendah. Besarnya penghasilan dibagi 12 bulan rata-rata para nelayan penangkap teripang hanya sekitar satu juta sampai satu juta tiga ratus ribu rupiah. Apalagi penghasilan

sebesar itu dipergunakan untuk memenuhi biaya hidup sebuah keluarga yang terdiri dari 6 jiwa dalam sebuah keluarga tentulah sangat rendah. Penghasilan sebesar 15 juta jika dibagi 12 bulan, maka penghasilan para nelayan ini hanya sekitar 1.250.000 rupiah. Penghasilan ini tentulah sangat jauh dari ukuran cukup guna memenuhi keperluan hidup bagi keluarganya. Seorang nelayan yang terdiri dari 6 orang dalam satu keluarga sangat jauh untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Walaupun penghasilan dari menangkap teripang cukup besar, karena musim panen yang hanya tiga bulan tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup selama setahun atau 12 bulan. Demikianlah kenyataan yang mereka hadapi hampir setiap tahun apalagi jika tidak pergi melaut. Sungguh sangat memilukan kehidupan para nelayan penangkap teripang dari Desa Oelua ini, hanya sekitar 6 ribu rupiah per orang per hari. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa kemiskinan selalu membayangi kehidupan mereka sehari-hari. Sudah sepatutnya pemerintah daerah dan instansi terkait untuk ikut memikirkan jalan keluar dalam upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat umumnya dan nelayan tradisional khususnya.

Sebenarnya banyak waktu senggang yang dimiliki oleh nelayan penangkap teripang, namun karena kondisi kapal yang dimilikinya tidak dapat digunakan untuk menangkap ikan sehingga waktu banyak terbuang tanpa penghasilan sama sekali. Kapal yang mereka gunakan lumayan besar dan tanpa peralatan yang memadai sehingga kapal ini hanya dapat digunakan untuk menangkap teripang. Kapal yang lumayan besar ini tidak dilengkapi dengan mesin menyebabkan tidak dapat difungsikan untuk menangkap ikan di perairan Pulau Rote yang kaya akan ikan. Hal seperti ini memaksa para nelayan penangkap teripang memilih pekerjaan lain guna menutupi biaya hidup sehari-hari. Sesungguhnya para nelayan yang ada di Desa Oelua telah mendapatkan bantuan berupa kapal tangkap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun karena peralatan yang belum lengkap sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk menangkap ikan di perairan sekitar Pulau Rote. Para nelayan ini sebenarnya sangat berharap dapat

segera memanfaatkan bantuan ini. Kondisi seperti ini membuat para nelayan penangkap teripang selalu menghadapi kendala dalam hal pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan wawancara dengan Burhanuddin salah seorang nelayan penangkap teripang dari Desa Oelua, dia biasanya membantu istrinya berjualan aneka kue di pasar Busalangga setiap hari pasaran yaitu hari Rabu dan hari Sabtu. Menurutnya hasil dari menangkap teripang tidak cukup untuk membiayai keperluan hidup keluarganya selama setahun. Dari hasil berjualan kue bersama istrinya inilah dia digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hampir semua nelayan penangkap teripang memiliki penghasilan sampingan seperti berkebun dan sebagai petani rumput laut. Beberapa tahun terakhir ini petani rumput laut mengalami kegagalan, sehingga banyak yang mengalami kerugian.

Kurangnya modal menjadi hambatan yang sangat berarti bagi para keluarga nelayan penangkap teripang yang ada di Oelaba, Desa Oelua. Walaupun hanya sebagai nelayan penangkap teripang umumnya mereka memerlukan modal yang cukup banyak ketika mereka akan pergi ke wilayah perairan gugusan pulau Pasir. Pada umumnya para juragan lemah dalam permodalan, sehingga ketika akan pergi ke wilayah perbatasan terpaksa meminjam terlebih dahulu kepada pemilik perahu. Besar kecilnya pinjaman tergantung dari banyaknya anak buah kapal dalam satu perahu, dan juga keluarga yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Modal yang diperlukan para nelayan penangkap teripang untuk biaya selama 75 hari atau sekitar dua setengah bulan melaut kurang lebih 10 – 15 juta rupiah tergantung banyaknya jumlah awak kapal. Semakin banyak jumlah awak kapal berarti jumlah modal yang diperlukan semakin besar. Peminjaman modal ini akan mereka kembalikan lagi setelah mereka balik dari melaut selama 2 – 3 bulan.

Modal awal akan dipergunakan untuk pengadaan garam sekitar 4 karung dengan harga 50.000 rupiah per karung atau ± 200 ribu rupiah, 500 kg beras dengan harga 10.000 rupiah per kilogram

atau seharga 5 juta rupiah. Minyak tanah 75 liter dengan harga 7.000 rupiah per liter yaitu sebesar 525.000 rupiah, kayu api satu carry dengan harga 250.000, tepung terigu 15 kg dengan harga sekitar 8000 rupiah menjadi 120.000 rupiah dan minyak bimoli sekitar 5 liter dengan harga 60.000 rupiah. Total biaya yang diperlukan oleh seorang juragan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama melaut adalah sekitar 6.250.000 rupiah untuk sebuah perahu dengan anak buah kapal sebanyak 8 orang. Modal awal sebesar 10 juta rupiah yang dipinjam oleh juragan akan dikembalikan menjadi 12,500.000 rupiah setelah mereka menjual teripang. Bila dihitung besarnya pengembalian tersebut yaitu sekitar 2,5 juta rupiah, maka seorang juragan dikenakan bunga sekitar 25 %. Keadaan ini sebenarnya cukup memberatkan bagi seorang juragan maupun anak buah kapal, namun karena keterbatasan modal terpaksa mereka lakukan. Kendati para nelayan penangkap teripang yang ada di Oelaba telah memiliki sebuah koperasi, namun sejauh ini belum banyak berkiprah terutama dalam pemberian pinjaman modal guna meringankan beban para anggotanya.

Kendala modal hampir dialami oleh semua juragan dan anak buah kapal penangkap teripang khususnya dan nelayan tradisional pada umumnya. Di samping masalah modal, manajemen operasional para nelayan tradisional ini juga sangat lemah. Hal ini kelihatan ketika mereka harus menerima kenyataan ketika mengembalikan modal yang harus dikenakan bunga sekitar 25 %, merupakan beban yang cukup besar. Ujung pangkal dari permasalahan ini adalah rendahnya sumber daya manusia para nelayan tradisional penangkap teripang khususnya dan dan nelayan tradisional pada umumnya.

Pada umumnya pengembalian modal dilakukan setelah juragan menjual hasil tangkapannya. Hasil yang mereka terima sesuai dengan pembagian yang telah disepakati yaitu sepertiga bagian diberikan kepada pemilik perahu dan sisanya sebesar dua per tiga bagian merupakan bagian juragan dan anak buah kapal. Dengan perhitungan semua hasil penjualan harus dikurangi dengan modal awal yang dipinjam dari pemilik perahu. Jika

hasil penjualan sekali melaut sebesar 120 juta rupiah dikurangi peminjaman awal sebesar 10 juta rupiah, berarti penghasilan sekali melaut adalah 110 juta rupiah. Ini berarti 110 juta rupiah dibagi 3 maka penghasilan seorang pemilik perahu sekitar 36,5 juta rupiah dan juragan serta anak buah kapal sebesar 73,5 juta rupiah. Jika mereka berjumlah 8 orang maka penghasilan bersih per orang sekitar 9 juta rupiah.

Bagi seorang juragan pada umumnya mereka akan mendapatkan penghasilan tambahan dari pemilik perahu sebesar 1 % dari setoran yang diterimanya. Jika seorang pemilik perahu mendapat penghasilan sebesar 36,5 juta rupiah, maka ia wajib menyisihkan 3,6 juta rupiah kepada juragan perahunya. Para juragan tidak mengalami hambatan dalam penjualan atau pemasaran hasil tangkapan. Para pemilik modal dari luar Rote sudah menunggu kedatangan para nelayan penangkap teripang di desa mereka. Harga jual teripang sangat bervariasi tergantung dari jenis teripang yang berhasil dikumpulkan. Harga yang paling mahal yaitu jenis *koro susu* harga per kilogram bisa mencapai 800.000 rupiah. Untuk teripang jenis nenas di pasaran setempat bisa mencapai harga sekitar 650.000 rupiah, dan jenis teripang yang paling murah saat ini adalah untuk teripang bintik polos dengan kisaran harga 293.000 rupiah.

Dalam sekali melaut para nelayan tidak terfokus pada jenis teripang tertentu yang mereka kumpulkan. Teripang jenis apapun akan mereka tangkap, karena semua jenis teripang laku di pasaran Oelaba. Berdasarkan penuturan seorang juragan bernama Rudi yang berhasil diwawancarai, menuturkan dalam sekali melaut mereka bisa mengumpulkan sampai sekitar 400 kilogram teripang.

Setelah pemekaran wilayah pendapatan nelayan didaerah penelitian relatif lebih banyak dibandingkan sebelum pemekaran karena kondisi sarana pelabuhan lebih baik, peralatan untuk perbaikan kapal juga relatif lebih gampang diperoleh sehingga dapat lebih cepat memperbaiki. Demikian juga dengan adanya sarana pelabuhan lebih baik mempercepat distribusi hasil perikanan kepada konsumen, pasar dan perdagangan di sekitar

pelabuhan semakin ramai sehingga penduduk lebih memiliki kesempatan menjual hasil laut.

Pemekaran wilayah juga memberikan kesempatan kerja baru kepada penduduk desa sehingga selain sebagai nelayan mereka dapat memiliki mata pencaharian sambilan untuk menambah penghasilan atau pendapatan selama belum berlayar, misalnya menjual gula air atau gula nira, kue, dan lain-lain.

BAB IV

PERUBAHAN SOSIAL NELAYAN LINTAS BATAS DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN WILAYAH

A. KEHIDUPAN NELAYAN LINTAS BATAS SEBELUM PEMEKARAN WILAYAH

Sebelum tahun 2002, kawasan pulau Rote, pulau Ndao, pulau Nuse, dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan tersebut merupakan satu kecamatan yakni kecamatan Rote. Kecamatan Rote berada di bawah wilayah pemerintahan kabupaten Kupang dengan ibukota di Kupang. Antara Kupang dengan Rote berjarak sekitar 40 mil, dapat ditempuh dengan kapal laut (kapal ferry ASDP) reguler selama 4-5 jam perjalanan. Fasilitas bandar udara Lekunik menuju bandara El Tari Kupang masih terbatas sehingga perjalanan menuju Kupang memerlukan waktu relatif lama.

Luas wilayah kepulauan Rote cukup luas, sekitar 1.280,10 km², terdiri atas 96 pulau. Hanya enam pulau yang berpenghuni selebihnya merupakan pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Wilayah pulau Rote tidak terlampau luas, pulau ini dapat dikelilingi dalam jangka waktu yang relatif singkat sekitar 2-3 jam perjalanan. Kontur geologis wilayah bagian utara dan selatan berupa pantai dengan dataran rendah, sementara bagian tengah merupakan lembah dan perbukitan. Seperti umumnya wilayah Nusa Tenggara Timur, pulau Rote beriklim kering yang dipengaruhi angin muson

dan musim hujan relatif pendek (3-4 bulan). Hal ini dipengaruhi oleh letaknya yang dekat dengan benua Australia, menyebabkan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan, curah hujan rendah, keadaan tanahnya lebih gersang dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia (Fox, 1996:16).

Sebagai daerah kecamatan yang luas dan menjadi daerah perbatasan yang dikelilingi laut lepas, potensi sumberdaya laut dan pesisir Rote Ndao sangat besar. Di kawasan ini terdapat kawasan laut Sawu yang dalam dengan potensi ikan yang berlimpah di sebelah selatan terdapat laut lepas yang berbatasan langsung dengan benua Australia dan memiliki beraneka ragam sumber daya laut serta menjadi cadangan ikan berlimpah. Potensi laut yang berlimpah mendukung pengembangan potensi sektor kelautan dan perikanan laut di Rote. Di samping itu sebagian besar masyarakat Rote bermukim di wilayah pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan. Sebagai nelayan tradisional, mereka melakukan berbagai kegiatan untuk memperoleh ikan. Laut dan ikan menjadi sumber penghasilan utama untuk menghidupi keluarga. Dengan mencari ikan di laut dan menjualnya di pasar memungkinkan mereka memperoleh uang untuk membeli kebutuhan pokok lainnya.

Meskipun memiliki potensi laut yang berlimpah, permasalahan yang dihadapi nelayan adalah kemiskinan. Sudah menjadi pandangan umum bahwa sebagian besar masyarakat nelayan di Indonesia (termasuk masyarakat nelayan di Kabupaten Rote Ndao) tergolong penduduk miskin. Kehidupan sebagai nelayan identik dengan hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan disebabkan berbagai faktor dengan permasalahan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya (Kusnadi, 2009:280). Masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah kompleks seperti kemiskinan, keterbatasan akses modal, kelemahan lembaga sosial ekonomi, degradasi sumber daya lingkungan, belum kuatnya kebijakan yang berorientasi kemaritiman (Kusnadi, 2008 : 27-28).

Secara umum, kondisi sosialekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur, termasuk Kabupaten Rote Ndao, di bidang menunjukkan

dinamikan yang menjanjikan, terutama keanekaragaman di bidang sumberdaya pesisir dan kelautan. Meskipun dalam banyak hal mengalami ancaman akibat tekanan penduduk dan kemiskinan serta penangkapan ikan secara *destruktif* atau menghancurkan dan membinasakan kehidupan biota laut (Sambut, 2004: 44-45). Berdasarkan faktor-faktor tersebut permasalahan nelayan di kabupaten Rote Ndao dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1) Kesenjangan sosial.

Kesenjangan sosial merupakan gejala umum pada masyarakat Indonesia. Selama ini berkembang pandangan bahwa kesenjangan sosial ada kesenjangan sosial antara masyarakat Indonesia. Misalnya, di daerah perkotaan ada kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin sangat timpang. Masyarakat kaya sungguh-sungguh kaya dengan gaya hidup gemerlap, sedangkan masyarakat miskin benar-benar miskin dengan hidup serba kekurangan. Dari segi kewilayah ada pandangan yang berkembang bahwa ada kesenjangan sosial antara wilayah Indonesia bagian barat dengan masyarakat Indonesia bagian timur. Masyarakat di wilayah Indonesia bagian barat berpenduduk padat dan mendapat kemudahan dalam berbagai hal, seperti akses jalan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan masyarakat Indonesia bagian timur penduduk lebih jarang namun kesulitan memperoleh akses-akses tersebut. Kesenjangan demikian sudah mulai dikikis dengan adanya berbagai program pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia bagian barat maupun bagian timur.

2) Keterbatasan Prasarana dan Sarana Transportasi

Keterbatasan akses prasarana dan sarana jalan dan transportasi di Rote, menyebabkan tersumbatnya kesempatan untuk mengakses modal dan pangsa pasar. Jalan yang rusak dan banyak jalan yang belum diaspal, menyebabkan transportasi semakin sulit sehingga biaya transportasi meningkat. Biaya transportasi dari kecamatan ke pelabuhan Ba'a menjadi tinggi. Sementara, angkutan laut

untuk mengangkut hasip bumi, ternak, maupun ikan menuju kota kabupaten di kupang mengandalkan feri dengan waktu perjalan 4-5 jam jika kondisi laut bagus. Sebaliknya jika kondisi cuaca tidak baik penyeberangan feri ditunda sampai cuaca membaik. Hal ini menyulitkan pengiriman pasokan kebutuhan sehari-hari sehingga harga-harga kebutuhan pokok menjadi tinggi.

3) Kualitas Sumber Daya Manusia yang Rendah.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) rendah disebabkan kemiskinan dan keterbatasan memperoleh pelayan pendidikan, teknologi, maupun kesehatan. Sebelum otonomi daerah, Rote Ndao yang merupakan daerah kecamatan hanya ada satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri untuk satu kecamatan dan satu Sekolah Dasar (SD) negeri pada setiap desa. Ba'a sebagai ibukota kecamatan Rote maka sarana pendidikan SMP negeri hanya ada di Ba'a. Anak-anak usia sekolah yang jauh dari Ba'a seperti Rote Timur, Rote Barat Daya, maupun Rote Selatan, untuk menempuh pendidikan SMP harus ke Ba'a dengan jarak sekitar 40-60 kilometer, dan sarana transportasi terbatas. Jika menempuh pendidikan SMP di Ba'a, mereka harus membayar biaya transportasi, biaya pemondokan, biaya makan, uang sekolah, dan sebagainya. Tingginya biaya untuk menempuh pendidikan SMP terasa berat bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, sehingga banyak anak usia sekolah yang hanya menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar saja (hanya tamat SD).

4) Kesehatan Masyarakat dan Sanitasi Lingkungan

Selain sarana pendidikan yang terbatas, sarana penunjang kesehatan juga terbatas. Sebelum otonomi daerah setiap desa di Indonesia memiliki satu Puskesmas. Hal serupa juga ada di Rote Ndao, dimana setiap desa memiliki satu pelayan kesehatan. Meskipun telah tersedia pelayan kesehatan, masalah pelayanan kesehatan masih menjadi kendala karena jarak dan prasarana yang belum memadai. Pada tingkat puskesmas tenaga medis khususnya dokter umum tersedia di puskesmas tingkat kecamatan di Ba'a.

Di desa-desa ada tenaga medis setingkat perawat dan bidan, dengan sarana dan persediaan obat-obatan terbatas. Keterbatasan sarana dan pasokan obat-obatan disebabkan lokasi jauh dengan transportasi yang belum lancar. Jika ada salah seorang warga sakit agak parah harus dirujuk kerumah sakit daerah di Kupang, dengan waktu tempuh sekitar 4-5 jam. Transportasi yang belum lancar menghambat pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

Di samping itu, kesehatan masyarakat dipengaruhi sanitasi lingkungan. Kurangnya sanitasi lingkungan disebabkan pola pemeliharaan binatang ternak. Pemeliharaan ternak dilakukan oleh semua keluarga di Kabupaten Rote Ndao, permasalahannya adalah binatang ternak yang dibiarkan terlepas di pekarangan rumah. Hal ini sangat mengotori lingkungan dan dapat menimbulkan penyakit. Saat ini sudah ada kecenderungan masyarakat untuk mengandangkan ternaknya sehingga kebersihan lingkungan dapat terjaga dengan lebih baik.

5) Permasalahan Ketersediaan Air

Seperti umumnya daerah Nusa Tenggara Timur yang relatif kering, persediaan air pada musim kemarau cenderung menurun. Di Kabupaten Rote Ndao terdapat beberapa sungai yang mengalir di dataran rendah. Sumber-sumber air tersebut akan mengalami penurunan debit pada musim kemarau. Sampai saat ini ketersediaan air masih menjadi masalah utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk Kabupaten Rote Ndao. Pada masyarakat pesisir sumber air diperoleh dengan menggali sumur dengan kedalaman tertentu. Air sumur digunakan untuk semua keperluan baik untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak. Sedangkan pada daerah-daerah pedalaman masyarakat menetap tidak jauh dari sumber-sumber air. Kebutuhan air mereka dipenuhi dari di sumber-sumber air terdekat.

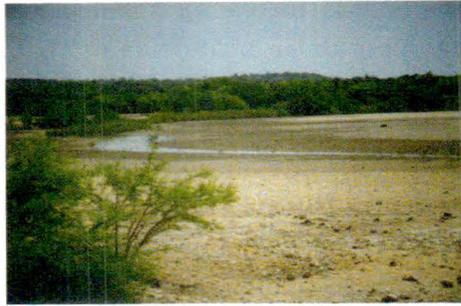


Foto 19. Debit air sungai di kabupaten Rote Ndao mengecil pada musim kemarau

Sumber: Dokumentasi peneliti tahun 2017

Mata air terbesar di kabupaten Rote Ndao ada di Oemanu yang berjarak sekitar 5 kilometer dari Ba'a. Saat musim hujan air ini sangat melimpah, namun tidak pernah kering di musim kemarau. Sumber air ini dimanfaatkan masyarakat disekitar Ba'a dan sekitarnya sebagai sumber air minum yang dikelola PDAM kabupaten Rote Ndao, maupun sebagai sumber pengairah sawah di sekitarnya. Sedangkan daerah-daerah lainnya memiliki sumber air tersendiri walaupun tidak terlampau berlimpah. Pada daerah-daerah yang memiliki persediaan air terbatas, penanaman padi menggunakan sistem tadah hujan dengan menanam padi jenis gogo rancah. Mereka mulai menanam benih pada ketika musim hujan mulai turun. Hasil produksi padi tiap hektare 4-5 ton atau rata-rata 23.697 ton per tahun. Selain padi, tanaman yang cukup penting nilainya adalah kacang tanah biji besar yang berkadar kolesterol rendah, bawang merah, semangka, lombok, jagung, dan sorgum. Sebagian besar dihasilkan di Rote Barat Daya, Barat Laut, Timur, dan Pantai Baru. Komoditas lain yang terkenal adalah lontar, kelapa, dan jambu mete. Menjelang musim kemarau penduduk menanam jagung, kacang-kacangan, dan mengolah nira lontar menjadi gula lempeng, gula semut, gula air, dan *sopi* (minuman khas Rote Ndao yang merupakan fermentasi nira dan mengandung alkohol tinggi).

6) Kebijakan Pembangunan Belum Optimal

Kebijakan pembangunan yang belum optimal memihak masyarakat nelayan. Sejak awal kemerdekaan hingga berakhirnya kebijakan politik Orde Baru, nelayan dan komunitas nelayan kurang memperoleh perhatian pembangunan. Kebijakan pembangunan lebih banyak mengarah pada sektor-sektor daratan (khususnya pertanian melalui program intensifikasi pertanian, kelompencapir, dari desa ke desa, dan sebagainya). Formasi kebijakan yang secara substansial tidak berpihak ke wilayah pesisir dan laut, menjadikan masyarakat yang mendiami kawasan pesisir semakin tersingkir dan terasing dari deru pembangunan bangsa.

Kemiskinan, keterbelakangan sumber daya manusia, kerusakan ekosistem laut, merupakan buah dari kekurangpedulian kebijakan pembangunan tersebut (Kusnadi, 2009:7). Sejak dibentuknya Dinas Perikanan dan Kelautan tahun 1999, salah satu programnya adalah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dioperasionalkan tahun 2001. Tahun 2008 program tersebut telah menjangkau seluruh kota pesisir dan kabupaten di Indonesia, dan telah mampu meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir (Kusnadi, 2009:18).

7) Rendahnya Perhatian Publik Maupun Pemerintah

Rendahnya perhatian publik maupun pemerintah selaku penguasa negara dan pemegang kebijakan terhadap kehidupan masyarakat pesisir dan nelayan. Rendahnya perhatian pemerintah telah berlangsung sejak awal kemerdekaan hingga berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Bahkan pada masa Orde Baru berbagai kebijakan pembangunan seolah-olah hanya berpihak pada masyarakat daratan dan sedikit sekali pembangunan yang menyasar masyarakat pesisir dan pemanfaatan sumber daya kelautan. Kebijakan-kebijakan pembangunan pada masa itu lebih banyak mengarah kepada kehidupan masyarakat agraris khususnya sektor pertanian dan pembangunan industri. Sedangkan formasi kebijakan yang secara substansi berpihak ke wilayah pesisir dan

laut sangat terbatas bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada. Kondisi demikian menjadikan masyarakat pesisir dan nelayan Indonesia semakin tersisih dan terbelakang dalam memanfaatkan sumber daya alam sekitarnya yang berakibat pada keterpurukan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi (Kusnadi, 2009:47). Keterbatasan ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki posisi tawar dalam menyikapi hasil produksinya. Prasarana jalan dan transportasi yang terbatas kesempatan untuk memasarkan hasil produksi menjadi terbatas.

Di kabupaten Rote Ndao, rendahnya perhatian publik dan pemerintah terhadap nelayan karena Rote Ndao relatif masih terisolasi karena terbatasnya sarana transportasi. Di samping itu, perhatian publik dan pemerintah kurang karena Rote Ndao yang merupakan bagian dari Kecamatan Kupang memiliki wilayah luas, meliputi wilayah Kota Kupang, kabuapten Kupang, Rote, dan Sawu. Sedangkan Pulau Rote dan sekitarnya merupakan wilayah kecamatan dengan wilayah yang luas pula. Maka, sangat beralasan jika perhatian pemerintah dan publik terhadap nelayan di Rote Ndao sangat rendah karena harus berbagi perhatian dengan daerah-daerah lainnya.

B. PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN ROTE NDAO

Gagasan otonomi daerah dikemukakan Menteri Dalam Negeri pada masa pemerintahan Orde Baru, Riyas Rasyid, sekitar tahun 1996. Wacana otonomi daerah bertujuan untuk memberi hak penuh kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri. Pemberian hak otonomi daerah berkaitan dengan sistem pemerintahan masa lalu yang cenderung bersifat desentralisasi pusat, dimana pusat mengatur sistem pemerintahan daerah di seluruh Indonesia dengan pola yang sama dan seragam di seluruh Indonesia. Sistem ini dianggap kurang tepat karena yang memahami kondisi suatu daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri bukan pemerintah pusat. Sehingga kebijakan pusat yang

diberlakukan di seluruh daerah di Indonesia seringkali tidak tepat sasaran.

Kurang optimalnya pembangunan di daerah karena lemahnya sistem kontrol pemerintahan pusat terhadap daerah. Dengan demikian, melalui pemeberian hak otonomi daerah berarti pemerintah pusat memberi hak penuh kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai undang-undang. Pengaturan internal daerah diserahkan ke pada pemerintah daerah karena yang mengetahui permasalahan daerah. Dengan tujuan pemerintah daerah dapat menyelesaikan permasalahan daerah dengan sebaik mungkin. Sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dapat dicapai tepat sasaran. Sesuai peraturan pemerintah, tujuan pemberian otonomi daerah adalah : 1) Meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik. 2) Mengembangkan kehidupan demokrasi. 3) Keadilan. 4) Pemerataan. 5) Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 6) Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.

Otonomi daerah diberikan oleh pemerintah pusat dengan melihat beberapa persyaratan seperti syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan sebagai berikut; 1) Syarat administratif untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. 2) Syarat teknis, meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. 3) Syarat fisik pembentukan wilayah kabupaten atau kota paling sedikit terdapat 5 (lima) kecamatan. Disamping itu harus menentukan lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan (Sumber : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah).

Pemekaran kabupaten Kupang menjadi kabupaten Rote Ndao telah memenuhi semua persyaratan di atas. Beberapa potensi yang mendukung pemekaran wilayah Rote Ndao dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Latar Belakang Sejarah Rote Ndao

Berdasarkan latar belakang sejarah, kawasan Pulau Rote dan pulau-pulau sekitarnya berdiri beberapa *nusak* (kerajaan kecil) di bawah pimpinan seorang *manek* (Soh dan Indrayana, 2008:16-17). Kerajaan-kerajaan tersebut seringkali terlibat perseteruan yang saling serang satu sama lain memperebutkan batas wilayah kekuasaan. Pada masa pemerintahan masa kolonial Belanda semua wilayah *nusak* di bawah kendali pemerintah kolonial Belanda. Pulau Rote dengan pulau-pulau sekitarnya termasuk Pulau Sawu dan Raijua menjadi satu *onderafdeeling* (pemerintahan setingkat swapraja atau kabupaten) yakni *oderafdeling* Rote dan Sawu. Setelah masa kemerdekaan, *onderafdeeling* Rote dan Sawu menjadi satu dengan *onderafdeeling* Kupang menjadi daerah swapraja Kupang, kemudian berubah menjadi Kabupaten Kupang (Soh dan Indrayana, 2008:20). Pulau Rote dan sekitarnya menjadi daerah kecamatan yang berada di bawah Kabupaten Kupang.

Sejak akhir tahun 1990-an ketika digagas pemekaran wilayah dan pemberian status otonomi daerah, wilayah Pulau Rote menjadi salah satu wilayah yang mengalami pemekaran lebih awal dari 10 pemekaran wilayah lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rote Ndao dipersiapkan menjadi daerah pemekaran dari Kabupaten Kupang sejak tahun 1999 dan ditetapkan sebagai kabupaten Rote Ndao pada tahun 2002. Pemekaran wilayah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

2) Syarat Administratif

Syarat administratif yang harus dipenuhi untuk mendapat hak otonomi daerah tingkat kabupaten adalah mendapat persetujuan DPRD kabupaten dan bupati, DPRD Provinsi dan gubernur, serta rekomendasi menteri Dalam Negeri. Syarat administratif usulan

menjadi Kabupaten Rote Ndao sudah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Kupang dan Bupati Kupang, persetujuan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Gubernur Nusa Tenggara Timur, serta mendapat rekomendasi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebelum tahun 2002. Terpenuhinya syarat-syarat tersebut mendukung pemerolehan hak otonomi daerah Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2002.

3) Syarat Teknis

Syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi untuk menjadi suatu kabupaten meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. (1) Kemampuan ekonomi masyarakat Rote Ndao didukung peran tanaman pangan 22% dari total pertanian yang menyumbang setengah kegiatan ekonomi, peternakan 17,48%, dan perikanan 12,22%. Komoditas lain yang terkenal adalah nira lontar, kelapa, dan jambu mete, kacang hijau, jagung, dan lain lain. Penduduk biasanya mengolah nira lontar menjadi gula lempeng, gula semut, gula air, dan *sopi*. *Sopi* adalah minuman beralkohol hasil fermentasi nira lontar. (2) Potensi daerah yang menonjol adalah potensi perikanan, karena daerah ini dikelilingi lautan luas sebagai sumber tangkapan ikan yang berlimpah. (3) Sosial budaya masyarakat Rote Ndao didukung sistem kemasyarakatan yang khas, rumah tradisional, pakaian, tarian, maupun tradisi yang berlangsung secara turun-temurun. (4) Sosial politik dan kependudukan di kabupaten Rote Ndao pada tahun 2000 berjumlah 97.974 jiwa (hampir mencapai 100.000 jiwa), telah memenuhi syarat jumlah penduduk sebuah kabupaten. Luas daerah mencapai 1.280 kilometer persegi dengan luas lautan mencapai 2.376 kilometer persegi, tergolong luas untuk menjadi satu wilayah kabupaten (Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rote Ndao tahun 2000). (5) Pertahanan dan keamanan didukung oleh kesadaran masyarakat untuk mengamankan wilayahnya. Saat

ini tidak terjadi sengketa batas wilayah antar kecamatan di Rote Ndao.

4) Syarat Fisik

Syarat fisik pemekaran dan otonomi daerah meliputi paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan. Persyaratan fisik wilayah Rote Ndao didukung sistem pemerintahan lokal pada masa lampau terkait keberadaan *nusak* (suatu daerah yang terdiri atas beberapa kampung dipimpin oleh seorang *manek* atau *fettor*) identik dengan wilayah kecamatan. *Nusak-nusak* yang pernah berkembang di Rote yakni; Thie, Dengka, Oenale, Ndao, Delha, Lelain, Ba'a, Lole, Termanu, Keka, Talae, Bokai, dan Landu. Semua *nusak-nusak* tersebut bergabung menjadi 6 kecamatan yakni kecamatan Rote Timur, Lobalain, Rote Barat Laut, Rote Barat Daya, Rote Tengah, Pantai Baru. Setelah memperoleh predikat otonomi daerah, seluruh kecamatan ini kemudian berkembang menjadi 10 kecamatan. Lokasi calon ibukota berada di Ba'a, karena Ba'a merupakan pusat perekonomian di wilayah Pulau Rote. Sarana dan prasarana pemerintahan telah dibangun kantor bupati di Kecamatan Lobalain yang berjarak sekitar 6 kilometer dari Ba'a.

5) Proses Daerah Persiapan

Sebelum menjadi kabupaten tersendiri, wilayah Rote Ndao sudah menjadi daerah persiapan sejak 3 tahun sebelumnya (tahun 1999). Setelah menjalani proses daerah persiapan selama tiga tahun dan dianggap layak mendapat hak otonomi daerah, maka kawasan Rote dan sekitarnya mulai memperoleh hak otonomi daerah sejak 10 April 2002, diberi nama kabupaten Rote Ndao.

C. PEMBANGUNAN SETELAH PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN ROTE NDAO

Sejak ditetapkan sebagai wilayah kabupaten, pembangunan dan pembenahan di segala bidang mulai dilakukan. Selain

pembangunan pusat pemerintahan kabupaten (kantor bupati beserta jajarannya), pembangunan dan pembenahan fasilitas umum mendapat prioritas. Beberapa fasitas pokok mulai dibangun antara lain:

1) Pembangunan Pusat Pemerintahan

Pusat pemerintahan Kabupaten Rote Ndao bertempat di kecamatan Lobalain, berjarak sekitar 6 kilometer dari Kota Ba'a. Pembangunan pusat pemerintahan mulai dirintis pada masa persiapan yakni sekitar tahun 1999 selesai dan siap digunakan pada tahun 2002. Pusat pemerintahan Kabupaten Rote Ndao dibangun dengan mengadopsi konsep-konsep budaya lokal dengan menempatkan *ti'i langga* (topi khas untuk laki-laki Rote Ndao) pada bagian puncak bangunan. Bagi masyarakat Rote Ndao *ti'i langga* adalah topi khas masyarakat Rote dengan anyaman runcing ke atas menyerupai antena yang melambangkan kejantanan disebut *koak*. Pada zaman dahulu *koak* merupakan tanda pemimpin (Soh dan Indrayana, 2008:130). Masing-masing *nusak* di Rote mempunyai variasi bentuk *ti'i langga* yang berbeda (Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao, 2014:36-37). Misalnya, *Ti'i Langga Nusak Dengka* berbeda hiasannya dengan *Ti'i Langga Nusak Termanu*.



Foto 20. Kantor Bupati Rote Ndao mengadopsi budaya lokal *Ti'i Langga*

Sumber: Dokumentasi peneliti BPNB Bali tahun 2016

2) Pembentukan Aparatur Pemerintahan

Pembentukan aparatur pemerintahan sudah direncanakan sejak masa persiapan dengan memanfaatkan perangkat pemerintahan yang telah ada sebelumnya. Serta memberi kesempatan pindah kepada beberapa staf yang berasal dari Rote Ndao maupun menugaskan beberapa pejabat dari provinsi maupun kabupaten Kupang untuk melaksanakan tugas di Rote Ndao. Dalam beberapa bidang, pemerinth kabupaten Rote Ndao memanfaatkan dukungan keahlian putra-putra lokal untuk bekerja membangun kabupaten Rote Ndao. Misalnya keterlibatan Saleh Hesein, salah seorang tokoh masyarakat asal Rote Ndao dalam membangun Kabupaten Rote Ndao. Saleh Husien sebagai anggota DPR RI yang pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian 2014-2016, ikut mempromosikan pengembangan sektor pariwisata melalui ajakannya berwisata ke Rote Ndao. Saleh Husein juga berperan dalam meningkatkan bidang olah raga melalui perebutan piala Saleh Husein Cup di Kabupaten Rote Ndao tahun 2015-2016.

3) Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Jalan

Sejalan dengan pemberian otonomi daerah, infastruktur jalan menjadi program utama pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Jalan tepi pantai mengelilingi wilayah Pulau Rote mulai digagas, namun belum sepenuhnya terlaksana. Saat ini jalan-jalan utama sudah diaspal dengan baik. Jalan dari Ba'a menuju daerah sekitarnya ke arah Barat menuju kecamatan Rote Barat Laut sudah diaspal bagus, hanya beberapa jalan menuju daerah pesisir seperti Desa Oelua keadaan jalan masih rusak. Jalan dari Ba'a menuju arah selatan khususnya jalan menuju Rote Tengah dan Rote Barat Daya juga sudah diaspal dengan baik. Kemudian jalan raya dari Ba'a menuju Pante Baru dan Rote Timur sudah diaspal dengan baik untuk mendukung objek wisata Pantai Tiang Bendera dan Pantai Batu Termanu yang ada di kawasan ini. Termasuk jalan raya ke pesisir pantai selatan seperti desa Boa dan Nemberala yang menjadi tujuan wisata terkenal di Rote sudah diaspal dengan baik.

Hanya beberapa daerah di Kecamatan Rote Selatan bagian barat dan kawasan pesisir kecamatan Rote Barat Laut, jalan aspal belum diperbaiki.

Salah seorang anggota DPRD Nusa Tenggara Timur asal desa Oelua, Hamdan Saleh Batjo, menyapaikan dorongan kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk serius memperhatikan jalan lintas utara pulau Rote. Jalan lintas utara tersebut di antaranya jalan raya dari Ba'a menuju desa Oemilal, Oetutulul, Oelua, Oebela, Oenitas, sampai menuju destinasi wisata nasional Nemberala. Akses jalan menuju daerah-daerah tersebut sudah seharusnya mendapat prioritas menjadi jalan strategis nasional atau jalan negara, mengingat jalur utara memiliki banyak destinasi wisata alam maupun budaya yang menarik yaitu; Gereja Loaholu Oelua. Gereja tersebut adalah gereja Protestan pertama di Rote didirikan tahun 1818. Di jalur utara juga ada pesangrahan kompeni di Oelua, *kerkof* (makam) Raja Dengka, Rumah Raja Dengka, Kampung Nelayan tradisional Oelaba, pantai pasir putih Litianak, rumpun Batu Gong, gua batu, pasir putih Sai, hasil kerajinan tradisional berupa tempat sirih pinang dan topi para petani di Oenale. Semua wilayah tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung destinasi wisata Nemberala yang sudah mulai dikenal wisatawan Indonesia maupun turis asing.

4) Pengembangan Bandara

Bandar udara menjadi salah satu akse tercepat menuju kabupaten Rote Ndao. Bandar udara mulai dibangun tahun 1969 dengan nama Bandar Udara Lekunik terletak di Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain. Pada saat itu bandara Lekunik menjadi bandara perintis menjadi landasan terbang pesawat-pesawat kecil. Sejak menjadi daerah kabupaten, bandara ini mulai diperbaiki. Perbaikannya rampung tahun 2010 diberi nama menjadi Bandar Udara D.C. Saundale, untuk menghormati David Constantin Saundale selaku pemrakarsa pembangunan lapangan terbang di Pulau Rote. Dengan gagasannya membangun bandara, D.C. Saundale sudah berpikir jauh ke depan, bahwa kondisi Pulau

Rote yang relatif jauh dan dikelilingi lautan luas tidak dapat mengandalkan transportasi laut, terutama dalam kondisi cuaca dan gelombang laut tinggi. Dengan demikian pembangunan transportasi udara sangat penting. Itu sebabnya D.C. Saudale memprakarsai pembangunan Bandara Lekunik sebagai bandara perintis. Dukungan pemerintah terhadap transportasi udara cukup tinggi seperti dikemukakan Bupati Rote Ndao, bapak Leonardus Haning berikut ;

“Saat ini kita telah memiliki bandara yang awalnya berstatus perintis kemudian meningkat statusnya menjadi bandara kelas V dan kelas IV. Ke depan bandara ini perlu dikelola secara baik agar memberikan kontribusi terhadap pengembangan sektor pariwisata dalam rangka memajukan perekonomian daerah ini” (Pos Kupang Online, 3 November 2010, diakses 22 April 2017).

5) Pengembangan Pelabuhan

Kabupaten Rote Ndao memiliki dua pelabuhan tempat bersandarnya kapal yang relatif besar, yakni pelabuhan Ba'a dan Pantai Baru. Pelabuhan Ba'a digunakan tempat bersandar kapal-kapal penumpang seperti kapal cepat, kapal motor (KM) Awu, dan kapal Ferry ASDP. Kapal cepat rute Kupang-Ba'a pulang pergi (pp) berlabuh di Ba'a dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Jika cuaca buruk kapal cepat mengalihkan tempat sandar ke Pantai Baru untuk memperpendek waktu tempuh serta menghindari gelombang laut yang ganas. Di samping kapal cepat, di pelabuhan Ba'a juga bersandar kapal motor (KM) Awu, merupakan salah satu kapal laut milik perusahaan negara PT Pelni yang memiliki rute melewati pelabuhan Kumai Kalimantan Tengah, Surabaya, Benoa Denpasar, Bima, Waingapu, Ende, Sabu, Rote, Kupang, Larantuka, dan Kalabahi. Kapal ini berlabuh di pelabuhan-pelabuhan tersebut satu kali dalam dua minggu. Sedangkan pelabuhan Pantai Baru digunakan untuk belabuhnya kapal-kapal cargo yang memuat barang-barang dan jasa yang dikirim menuju Rote maupun ke luar Rote. Lalu lintas barang dan jasa umumnya mengandalkan kapal

feri yang setiap hari melayani rute Kupang-Pantai Baru dengan waktu tempuh sekitar 4-5 jam.



Foto 21. Kapal cepat Kupang-Ba'a berlabuh di Pelabuhan Ba'a

Sumber: Dokumentasi peneliti tahun 2017

Selain pelabuhan Ba'a dan Pantai Baru, ada beberapa pelabuhan rakyat yang digunakan sebagai tempat berlabuh kapal-kapal motor berukuran kecil yakni pelabuhan rakyat Papela di kecamatan Rote Timur, Pelabuhan Oelaba di kecamatan Rote Barat Laut, pelabuhan Batutua di kecamatan Rote Barat Daya, dan pelabuhan Ndao di Pulau Ndao. Pelabuhan rakyat tersebut digunakan sebagai lalulintas laut dan menyadarkan perahu-perahu nelayan setempat. Berbeda dengan pelabuhan lainnya, pelabuhan Ba'a berkembang menjadi pusat perekonomian kabupaten Rote Ndao. Pelabuhan Ba'a direncanakan menjadi salah satu jalur pelayaran penting di Indonesia, mengingat posisi kabupaten Rote Ndao sebagai wilayah pulau terluar yang memiliki potensi sebagai jalur perdagangan dunia. Pengembangan pelabuhan Ba'a diawali dengan pembangunan infrastruktur khususnya pengembangan pelabuhan Ba'a beserta sarana dan prasarana pelabuhan. Mendukung pelabuhan Ba'a sebagai jalur pelayaran dunia, pada tahun 2011 dilakukan perbaikan pelabuhan dan menara suar yang terletak tidak jauh dari pelabuhan Ba'a. Menara suar tersebut merupakan bangunan tua yang dibangun sejak zaman Belanda.

Berfungsi sebagai penunjuk arah jalur pelayaran serta berfungsi sebagai navigasi rute pelayaran perairan Indonesia bagian selatan.



Foto 22. Pelabuhan rakyat di Papela Kecamatan Rote Timur

Sumber: Dokumentasi peneliti 2017

6) Promosi Wisata

Setelah menjadi kabupaten, pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata mendapat perhatian besar. Sebagai daerah kepulauan yang memiliki luas wilayah laut dua kali lipat luas daratan yakni luas lautan sekitar 2.376 km² maka pariwisata andalan Kabupaten Rote Ndao adalah wisata bahari. Wisata bahari menyajikan panorama pantai, alam bawah laut, masyarakat nelayan, selancar, dan pantai pasir putih. Pengembangan objek wisata yang sudah mendapat kunjungan wisata cukup ramai antara lain pantai Boa dan Nemberala. Pantai Boa digunakan sebagai lokasi selancar dengan gulungan ombak melengkung berbentuk busur, sedangkan pantai Nemberala menyajikan panorama pantai yang tenang dan alami dan *sunset* (matahari tenggelam). Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah kabupaten Rote Ndao yang menetapkan Pantai Nemberala dan Boa sebagai destinasi wisata nasional. Bahkan saat ini pantai Boa menjadi lokasi *surfing* (selancar) terbaik tingkat nasional pada penganugerahan Pesona Wisata 2016. Sekitar bulan September-Oktober di pantai ini diadakan lomba selancar taraf internasional diikuti peselancar

dari seluruh dunia (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao, 23-24).

Promosi objek-objek wisata di Kabupaten Rote Ddao berlangsung gencar melalui pembuatan brosur dan media online. Daerah-daerah yang menjadi target tujuan wisata kabupaten Rote Ndao meliputi wisata bahari dan budaya. Selain pantai Nemberala dan Boa, kawasan pantai yang dipromosikan sebagai tujuan wisata antara lain; Pantai Batu Termanu dengan Batu Suelay dan Batu Hun, Pantai Tiang bendera, Pantai Oesosole, Pantai Mulut Seribu, Laut Mati, jangkar kapal Portugis di Rote Timur, dan lain-lain. Wisata budaya terdiri atas istana raja, gereja tua, tari tradisional, *sasandu* (alat musik tradisional), sentra kain tenun, dan sebagainya. Dalam mempromosikan pariwisata, pemerintah Kabupaten Rote Ndao memperbaiki sarana utama penunjang pariwisata yaitu infrastruktur jalan dan bandara. Seperti dikemukakan Bupati Rote Ndao sebagai berikut;

“Saat ini kita telah memiliki bandara yang awalnya berstatus perintis kemudian meningkat statusnya menjadi bandara kelas V dan kelas IV. Ke depan bandara ini perlu dikelola secara baik agar memberikan kontribusi terhadap pengembangan sektor pariwisata dalam rangka memajukan perekonomian daerah ini,” kata Bupati Rote Ndao, Lens Haning (Pos Kupang Online, 3 November 2010, diakses 22 April 2017)“.



Foto 23. Pemandangan Pantai Nemberala
Sumber: Dokumentasi peneliti tahun 2017

7) Pembangunan SPBU

Saat ini penyediaan bahan bakar di Kota Ba'a selaku ibukota Kabupaten Rote Ndao baru ada satu SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Selebihnya berupa kios-kios yang menjual premium eceran. Bahan bakar yang tersedia di sini berupa premium atau bensin, solar, dan minyak tanah, belum ada bahan bakar pertalite dan pertamak. Pasokan bahan bakar datang 1 kali dalam 3 hari sehingga masyarakat seringkali mengalami kelangkaan bahan bakar. Kemudian harus mengantre lama jika pasokan telah datang. Menyikapi kelangkaan bahan bakar masyarakat menjual premium eceran dengan harga Rp. 10.000- Rp. 15.000 per liter. Para pengecer memperoleh pasokan bahan bakar dari SPBU di Ba'a. Memang ada larangan membeli bahan bakar di SPBU untuk dijual kembali, tetapi masyarakat tidak kehilangan akal. Para pengecer membeli bahan bakar dengan mengisi bahan bakar kendaraannya hingga penuh, sampai di rumahnya bensin itu disedot sampai habis untuk dipindahkan ke wadah lain, kemudian kembali ke SPBU untuk mengisi bahan bakar lagi, demikian berulang-ulang hingga jumlah persediaanya cukup.

D. KEHIDUPAN NELAYAN PELINTAS BATAS SETELAH PEMEKARAN WILAYAH

Pemberian hak otonomi daerah menjadi satu kabupaten yang mengatur pemerintahan secara mandiri, membawa perubahan sosial bagi kehidupan masyarakatnya. Perubahan sosial dapat mempengaruhi keseluruhan aspek kehidupan, meskipun ada bidang-bidang kehidupan tertentu yang dominan berubah ada pula aspek-aspek yang sedikit mengalami perubahan. Menurut Piotr Sztompka (2008:3-8) perubahan sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, perubahan itu sendiri dapat terjadi secara sebagian maupun keseluruhan.

Perubahan pasca pembentukan pemerintah kabupaten mengakibatkan perubahan sosial budaya masyarakat di kabupaten

Rote Ndao pada umumnya membawa dampak positif, meskipun dalam beberapa hal tidak lepas dengan dampak negatif. Hal ini memunculkan perubahan sosial masyarakat baik di bidang sosial, agama, pendidikan, maupun kebudayaan. Secara umum perubahan sosial masyarakat disebabkan oleh dua faktor utama yakni faktor dari luar (eksternal) dan faktor dari dalam (internal). Masing-masing faktor itu saling terkait satu sama lain. Perubahan sosial tampak signifikan dalam peningkatan perekonomian secara umum. Pembangunan infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan, transportasi darat, laut, dan udara meningkatkan mobilitas penduduk menuju maupun ke luar kabupaten Rote Ndao. Hal ini memudahkan masyarakat melakukan mobilitas dan aktivitas perdagangan ke daerah-daerah lain.

Di samping itu, pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi di kota Ba'a semakin ramai dan menumbuhkan geliat perekonomian. Secara khusus perubahan sosial masyarakat Rote Ndao dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1) Tumbuhnya Pedagang Kecil

Wilayah kabupaten Rote Ndao yang semakin ramai mendukung pertumbuhan usaha kecil dan pedagang-pedagang kecil. Toko-toko berderet sepanjang jalan raya di sekitar pelabuhan Ba'a, menjual segala macam kebutuhan sehari-hari. Pedagang ikan segar, sayur mayur, warung makan, sentra perdagangan kain tenun ditemukan di sekitar kota Ba'a. Pada pagi hingga siang hari, pedagang ikan, sayur mayur, dan kebutuhan sehari-hari dapat diperoleh di Pasar Mitina yang terletak di pinggir pantai bagian timur kota Ba'a. Pada malam hari, pedagang ikan segar dan sayur mayur berjualan di sekitar kantor bea cukai pelabuhan Ba'a. Harga-harga kebutuhan pokok di Kota Ba'a umumnya menggunakan kelipatan Rp. 5.000. Jika membeli sayur minimal Rp. 5000, gula cair sebotol 10.000 atau 15.0000, pisang Rp. 10.000-Rp. 15.000 per sisir, harga ikan berkisar antara Rp. 15.000- Rp. 20.000 perikat tergantung ukuran dan jenis ikan. Penggunaan uang Rp.1.000 dan Rp. 2.000 kurang diminati karena harus repot mencari uang kecil

untuk kembalian. Selain di sekitar kantor bea cukai, pada malam hari pedagang makanan berada di sekitar lapangan umum Ba'a. Di sini terdapat warung-warung tenda penjual makanan, terutama pedagang ikan bakar, roti, dan makanan lainnya. Meskipun belum terlalu lengkap, pelancong yang menginap di Ba'a dapat mencari makan malam di tempat ini (foto 24 dan 25).



Foto 24. Toko-toko berderet sepanjang jalan Pabean kota Ba'a

Sumber: Dok. Tim Peneliti tahun 2017



Foto 25. Pedagang-pedagang kecil menjual hasil kebunnya di sekitar kantor bea cukai lama di pelabuhan Ba'a

Sumber: Dokumentasi peneliti tahun 2017

2 Nelayan Lebih Mudah Menjual Hasil Tangkapan

Masyarakat Rote Ndao yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan merasa diuntungkan dengan dibentuknya Kabupaten Rote Ndao. Pembukaan transportasi darat, laut, dan udara meningkatkan mobilitas penduduk masuk maupun ke luar, sehingga Kabupaten Rote Ndao khususnya kota Ba'a semakin ramai. Jumlah penduduk yang semakin meningkat secara signifikan mengakibatkan kebutuhan masyarakat semakin meningkat, terutama kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan pangan (makanan pokok) yang semakin meningkat memungkinkan para nelayan Rote Ndao semakin gampang menjual hasil tangkapan ikannya. Dulu para nelayan menjual ikan hasil tangkapannya di desa-desa terdekat karena jarak pasar jauh dan sarana jalan masih rusak. Sedangkan kebutuhan desa-desa sekitar terhadap ikan tidak sedemikian tinggi karena tetangga sekitar juga sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Sekarang ikan hasil tangkapan para nelayan dibawa ke pasar Busalangga. Pasar Busalangga terletak di Kecamatan Rote Barat Laut menjadi pasar ikan terbesar dan teramai di Kabupaten Rote Ndao, karena lokasi pasar tidak jauh dari Ba'a. Hanya berjarak 10 kilometer dari Ba'a ditempuh dengan waktu perjalanan sekitar 20 menit. Hari pasaran di Pasar Busalangga jatuh pada hari Selasa dan Kamis, para nelayan dari beberapa kecamatan datang menjual hasil tangkapan ikan ke pasar Busalangga. Di pasar Busalangga, ikan transaksi jual beli ikan dilakukan secara eceran maupun grosiran. Ikan yang dijual secara eceran hanya untuk konsumsi masyarakat sehari-hari sedangkan ikan yang dijual secara grosiran umumnya akan dijual kembali di Ba'a atau dijual ke luar Kabupaten Rote Ndao, terutama ke Kupang. Tidak jarang para pengepul ikan di Rote Ndao membeli ikan dari para nelayan kemudian membawa sendiri ikannya ke pusat penjualan ikan di Pasar Oeba Kota Kupang (foto 26). Di Kupang, ikan dijual ke masyarakat sekitar, atau dikemas untuk dikirim ke berbagai

daerah di Indonesia maupun dikirim ke perusahaan-perusahaan pengolahan ikan.

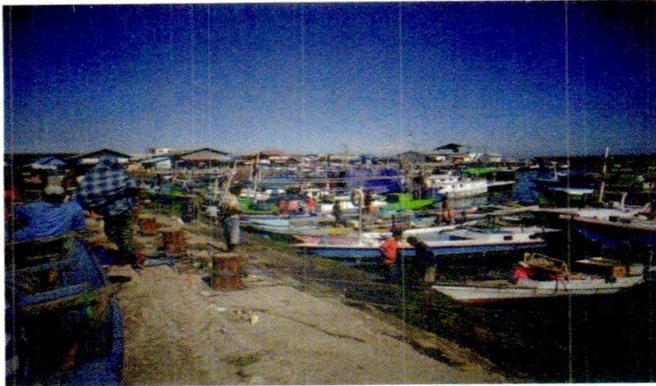


Foto 26. Pasar Oeba di kota Kupang sebagai pusat pelelangan ikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sumber: Dokumentasi peneliti tahun 2017

3) Pendapatan Nelayan Meningkat

Dengan dibangunnya sarana dan prasarana fisik seperti jalan raya dan pasar tradisional, nelayan lebih mudah menjual hasil tangkapan sehingga pendapatan masyarakat semakin meningkat. Dulu pendapatan agak terbatas karena tidak ada tempat untuk menjual ikan juga jalan menuju pasar Ba'a rusak parah sehingga penjualan ikan hasil tangkapan mereka terhambat. Setelah dibangun pasar Busalangga dan prasarana jalan yang memadai, jarak menuju pasar dapat ditempuh dengan waktu tidak terlalu lama, peluang untuk menjual ikan semakin meningkat sehingga penghasilan meningkat. Para nelayan dapat segera membawa hasil tangkapannya untuk dijual ke pasar terdekat. Seperti penuturan bapak Mohtar Latif, seorang nelayan dari Dusun Oelaba Desa Oelua kecamatan Rote Barat Daya. Orang tuanya berasal dari Pulau Pantar Alor, dia lahir dan besar di Oelaba. Sama seperti orangtuanya, ia berprofesi sebagai nelayan. Jika tidak melaut ke Australia, ia mencari ikan di sekitar perairan Desa Oelua dengan jarak yang dekat-dekat saja. Ikan yang diperoleh umumnya

berupa ikan-ikan kecil yang dijual kepada pengepul ikan seharga Rp. 5.000- Rp. 6.000 per kilogram, dan mendapat penghasilan sekitar Rp. 50.000 perhari. Selain itu dia juga bekerja membuat perahu kecil untuk dijual, memperbaiki perahu orang lain yang bocor, membuat jaring, dan mengambil pekerjaan-pekerjaan lain yang bersifat insidental. Sebagai sambilan para nelayan memelihara ternak kambing, itik, dan ayam. Pakan kambing diperoleh dari daun bakau yang tumbuh berlimpah dipesisir laut.

Peningkatan pendapatan juga dialami nelayan Desa Oelua seperti dikemukakan oleh Maskur Mau, bahwa pendapatannya sebagai nelayan sudah lumayan, berkat kerja keras selama ini. Jika tidak melaut ke kepulauan Ashmore Australia, ia mencari ikan di sekitar pesisir laut di di Rote Barat Laut. Hasil tangkapan ikan yang diperoleh di jual ke pasar Busalangga bersama istrinya. Di pasar Busalangga ia menjual ikan hasil tangkapannya sedangkan istrinya menjual kue-kue yang dibuat sendiri di rumah. Kerja keras dan kerjasama yang baik dengan istrinya ia mempunyai penghasilan lumayan baik. Menurut pendapat Maskur Mau, peningkatan pendapatan dialami hampir semua nelayan di desa Oelua. Masyarakat desa Oelua kini sebagian besar sudah bisa memperbaiki rumah dengan tembok batu permanen dan berlantai keramik (foto 27).



Foto 27. Kampung Nelayan Oelaba Desa Oelua Kecamatan Rote Barat Daya. Mereka sudah mampu membangun rumah permanen

Sumber: Dokumentasi peneliti BPNB Bali tahun 2017

4) Kesejahteraan Semakin Meningkat

Dengan meningkatnya akses dan mobilitas masyarakat Rote Ndao, perubahan terjadi di segala bidang. Peningkatan pendapatan mendukung terbentuknya kesejahteraan keluarga, semua anak-anak mendapat hak memperoleh makanan, pakaian dan tempat berlindung yang memadai. Dulu anak-anak pakaian hanya satu dua potong dipakai tiap hari, jarang dicuci sehingga pakaian menjadi kumal. Sekarang, berkat tersedianya berbagai fasilitas dan dana untuk membeli pakaian, membeli sabun pembersih, tersedianya saluran air, maka pakaian anak-anak sekarang sudah bersih-bersih semua, hampir tidak ada yang berpakaian kumal.

Peningkatan pendapatan juga menyejahterakan kehidupan keluarga. Dulu para orang tua tidak mampu memberi fasilitas cukup untuk keluarga, dengan meningkatnya pendapatan maka penyediaan fasilitas untuk keluarga tersedia. Dulu anak-anak berjalan kaki atau naik angkutan umum sampai berpuluh-puluh kilometer, berdesak-desakan karena ketersediaan angkutan umum, sekarang tidak demikian. Anak-anak setingkat SMP ke sekolah naik angkutan umum yang cukup tersedia. Remaja tingkat SMA ke sekolah mengendarai sepeda motor. Peningkatan ekonomi juga dialami Ibu Siti Rohana Batjo, seorang ibu rumah tangga dari Desa Oelaba kecamatan Rote Barat Laut, mengatakan bahwa dulu orang tuanya bekerja keras sebagai nelayan dan berusaha memberi pendidikan terbaik untuk anak-anaknya dari hasil melaut. Usaha keras orang tuanya berbuah manis. Sekarang semua anak-anaknya sudah berhasil menuntaskan pendidikan sampai perguruan tinggi dan salah seorang anaknya menjadi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5) Perbaikan Peralatan Kerja Nelayan

Meningkatnya pendapatan nelayan memberi manfaat positif terhadap semua sektor kehidupannya. Selain meningkatkan kesejahteraan keluarga, meningkatkan kualitas pendidikan anak, dan meningkatkan SDM, juga membawa pengaruh positif

terhadap peralatan kerja para nelayan. Dulu nelayan melaut pakai alat-alat tradisional seperti perahu kecil menggunakan dayung, penerangan memakai daun kepala dibakar, kompas atau petunjuk arah menggunakan posisi bintang-bintang di langit sekarang memakai jukung bermesin, memakai penerangan dari lampu mesin kapal, lampu senter, dan kompas. Untuk memperoleh tangkapan ikan dengan cepat, dulu para nelayan menggunakan racun dan bom ikan. Hal ini dapat merusak karang dan merusak habitat ikan. Ikan-ikan kecil ikut mati sehingga kedepannya berdampak terhadap kelangkaan hasil tangkapan. Sekarang penggunaan alat-alat tangkap tradisional sudah diganti dengan alat-alat yang lebih moderen seperti jukung bermesin, kompas, lampu senter. Alat-alat tangkap tidak lagi menggunakan tuba dan bom tetapi sudah menggunakan jaring. Keadaan ini dikemukakan oleh Kepala Desa Oelaba Bapak Esau Loe sebagai berikut;

“Dulu nelayan sini tangkap ikan pakai bom dan racun sekarang tidak. Oelua sudah bebas dari bom dan racun. Sekarang kita sudah pakai kapal mesin, pancing, pancing tonda, jaring. Nanti kita ada tambah jaring bantuan dari pemerintah kementerian Kelautan di Jakarta” (wawancara tanggal 10 April 2017).

6) Berkembangnya Budi Daya Rumput Laut

Selain menangkap ikan, sejak tahun 2007 sebagian besar nelayan di Kabupaten Rote Ndao membudidayakan rumput laut. Hal ini didukung kondisi pesisir laut yang bersih dan airnya yang tenang. Hasil budidaya rumput laut di Kabupaten Rote Ndao berhasil dengan baik. Tetapi, lima tahun terakhir ini hasil rumput laut semakin menurun. Bahkan tahun ini (2017) panen rumput laut sama sekali tidak bernasil karena rusak.

Kerusakan rumput laut itu disebabkan beberapa hal yakni; 1) Serangan kerang-kerang kecil yang menempel pada batang rumput laut dan memakan batang-batang rumput laut hingga patah. 2) serangan sejenis ulat yang masuk ke dalam batang rumput laut sehingga rumput laut menjadi hancur seperti bubur. Kerusakan rumput laut diduga karena pencemaran lingkungan

yang diakibatkan berbagai faktor seperti pembuangan limbah di laut serta dampak limbah minyak bumi akibat meledaknya tambak minyak Australia di celah Pulau Timor pada bulan Agustus 2009. Hal ini membawa dampak serius terhadap kawasan pesisir di selatan Indonesia, Timor Leste, sampai ke pesisir selatan Papua Newguinea.



Foto 28. Rumput laut hasil budidaya petani sebagian besar rusak

Sumber: Dokumentasi peneliti Tahun 2017

Dampak terparah dialami kawasan pesisir kabupaten Rote Ndao. Hasil tangkapan menurun dan hasil budidaya rumput laut menjadi rusak. Beberapa *Non Government Organization* (NGO, Lembaga Swadaya Masyarakat) di Australia berupaya memperhatikan dampak langsung pencemaran dengan membantu masyarakat Rote Ndao memperoleh kompensasi terhadap masalah tersebut. Namun sampai saat ini belum membuahkan hasil dan masih dalam proses negosiasi dengan pihak perusahaan yang menambang minyak di celah Timor tersebut.

7) Peningkatan Pendidikan

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan program nasional untuk pemeratakan pendidikan di seluruh Indonesia, kabupaten Rote Ndao juga memperoleh pembangunan bidang pendidikan tingkat dasar (SD) sampai tingkat SMA. Sejak

dicanangkan program wajib belajar, masing-masing kecamatan harus tersedia paling sedikit satu sekolah umum tingkat SMA Negeri dan satu sekolah kejuruan SMK Negeri. Berdasarkan program tersebut, sebagian besar kecamatan di Rote Ndao sudah tersedia pendidikan tingkat SMA, hanya beberapa kecamatan yang baru dimekarkan belum tersedia pendidikan tingkat SMA seperti Kecamatan Landu Leko dan Ndao Nuse. Untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat, kabupaten Rote Ndao akan merencanakan peningkatan pendidikan dengan menyediakan fasilitas pendidikan. Nantinya semua kecamatan di Rote Ndao diharapkan memiliki satu sekolah SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi.

Saat ini tingkat pendidikan masyarakat di Rote Ndao sudah membaik. Sekolah sudah banyak, di Kampung nelayan Desa Oelua dan Papela sudah banyak berpendidikan sarjana. Para nelayan pun minimal sudah berpendidikan SMA. Seperti dikemukakan Demсы Henuk, salah seorang pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao berikut;

“ Saya berasal dari Desa Oelua orang tua saya nelayan, saya bisa sekolah dari hasil laut, dulu di sini (di Rote) belum ada SMA, kemudian ada SMA jaraknya jauh (di Ba’a), harus punya motor untuk kesekolah sementara masa itu tidak mampu membeli motor. Sekarang sekolah banyak, pendapatan nelayan juga sudah tinggi, anak sekolah bawa motor” (hasil FGD, tanggal 11 Maret 2017).

Guna menampung siswa yang telah menyelesaikan pendidikan SMA dan SMK menuju jenjang yang lebih tinggi, pemerintah kabupaten Rote Ndao merencanakan pembangunan Perguruan Tinggi. Berdasarkan program pemerintah, sampai saat ini pendidikan tinggi negeri tersedia pada tingkat provinsi. Pendidikan tinggi di tingkat kabupaten masih terbatas, walaupun ada umumnya berupa lembaga pendidikan yang dikelola pihak swasta.

Di kabupaten di Rote Ndao saat ini sudah ada swasta bernama Universitas Nusa Lontar. Gedung sekolah masih meminjan ruang

di SD 1 Mokdale Kecamatan Lobalain, berjarak sekitar empat kilometer dari pelabuhan Ba'a. Perguruan tinggi ini membuka jurusan fakultas hukum, ekonomi, ilmu pendidikan, pertanian, teknik, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Pembangunan perguruan tinggi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat kabupaten Rote Ndao.

8 Pelayanan Administrasi Lebih Baik

Sejak di tetapkan sebagai satu kabupaten, masyarakat Rote Ndao lebih mudah mengurus administrasi kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP), mengurus pajak kendaraan, surat izin, dan sebagainya. Terutama masyarakat pedesaan di pelosok Kabupaten Rote Ndao merasa lebih mudah mengurus surat-surat, misalnya mengurus surat keterangan cukup sampai di Ba'a yang ditempuh dengan 2 jam saja. Waktu mengurus surat pun tidak telampau lama, satu hari saja surat sudah bisa selesai. Seperti penuturan bapak H. Rusli Marzuki Bere, bahwa dulu susah mencari surat izin berlayar karena harus ke Dinas Perhubungan di Kupang, sekarang cukup di Rote saja, sehingga lebih menghemat waktu dan biaya (wawancara tanggal 14 April 2017).

Dalam menjalankan kegiatan melaut, khususnya para nelayan yang pergi ke kepulauan Ashmore Australia, diwajibkan mempunyai surat izin berlayar. Seperti dikemukakan Rudin Juma dan teman-temannya berikut;

“Surat izin berlayar mulai berlaku sejak ada pemerintah Rote Ndao, dulu berlayar hanya buku pas berlayar ditandatangani/diketahui RT atau Kepala Desa. Sekarang harus Dinas Kelautan. Australia lebih suka surat pas berlayar” (wawancara tanggal 12 April 2017) .

Surat izin yang dimiliki nelayan terdiri atas 3 jenis yakni; dari Dinas Perhubungan ada dua (dua jenis) surat izin yakni dari Perhubungan Umum dan Syahbandar, dari Dinas Kelautan ada satu (1 jenis) surat izin yaitu izin melaut. Mengurus surat ini tidak lama cukup satu hari saja sudah selesai. Menurut penuturan para

nelayan, pihak Australia tidak terlalu memperhatikan surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Sebab para nelayan Rote Ndao sudah rutin tiap tahun berlayar ke Australia dan sudah terdaftar dalam catatan kelautan Australia.



Foto Surat Peretujuan Berlayar dari Syahbandar

Sumber: Dok. Tim Peneliti Tahun 2017

9) Kesehatan dan Kesadaran Lingkungan.

Sejak ditetapkan sebagai kabupaten Rote Ndao, pelayanan kesehatan merupakan salah satu prioritas yang harus dikembangkan. Hal ini didukung pemerintah pusat yang mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada setiap daerah di Indonesia. Kabupaten Rote Ndao juga menerapkan program pemerintah pusat dengan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di ibukota kabupaten, puskesmas pada tingkat kecamatan maupun pada tingkat desa. Tersedianya rumah sakit daerah dan puskesmas memudahkan masyarakat mendapat pengobatan dan mempercepat mendapat tindakan medis ketika dalam keadaan darurat. Dalam keadaan sakit parah, mereka tidak lagi harus ke RSUD di Kupang dengan menempuh perjalanan berjam-jam. Di samping itu, masyarakat kurang mampu diberikan KKS (kartu keluarga sehat) untuk mendapat pelayanan berobat gratis (tidak dikenakan biaya).

Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan juga mulai tumbuh. Saat ini sudah ada kecenderungan masyarakat untuk mengandangkan ternaknya sehingga kebersihan lingkungan dapat terjaga dengan lebih baik. Ternak-ternak tidak lagi berkeliaran di pekarangan rumah. Ternak yang dipelihara di dekat pekarangan rumah mulai dikandangkan. Kecuali ternak yang dipelihara di ladang dibiarkan berkeliaran mencari makan sendiri di ladang. Hal ini memang kadang-kadang mengganggu tanaman. Untuk menghindari gangguan binatang ternak, para petani memagari ladangnya dengan susunan pelepah lontar dan gawang.

10) Peningkatan Perhatian Pemerintah

Sejak menjadi kabupaten tersendiri, perhatian pemerintah terhadap staf pemerintahan maupun masyarakat semakin meningkat. Terhadap aparaturnya pemerintahan, khususnya perhatian terhadap staf sudah menampakkan arah lebih baik. Misalnya, pemerolehan jatah seragam kantor dulu mendapat jatah baju seragam tiap tiga tahun sehingga baju dipakai sampai lusuh. Masalah ini disebabkan jatah pakaian harus dibagi daerah-daerah lain dengan wilayah yang luas serta jumlah staf lebih banyak, maka pemberian jatah pakaian untuk masing-masing kecamatan dilakukan secara bergilir mengingat wilayah kabupaten Kupang yang luas sementara dana terbatas. Sejak menjadi satu kabupaten, jatah pakaian secara rutin diperoleh setiap tahun, sehingga seragam pegawai sekarang lebih bersih.

Perhatian pemerintah terhadap masyarakat terutama para nelayan juga sudah menampakkan hasil, terbukti dengan adanya bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurut Kepala Desa Oelua, tahun ini (tahun 2017) ada bantuan pemerintah untuk pengadaan 5 ton garam. Garam ini diberikan kepada para nelayan untuk mengawetkan hasil laut dan akan dibagikan kepada para nelayan yang akan berangkat melaut ke Kepulauan Ashmore Australia. Bagi nelayan yang akan melaut diharapkan mendaftar, kemudian mengambil garam dengan menandatangani tanda terima.

Bantuan pemerintah juga diperoleh ketika Kepala Desa Oelua diundang rapat di Mataram Nusa Tenggara Barat bersama Menteri Kelautan dan perikanan, Ibu Susi Pujiastuti. Rapat bertujuan untuk menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi nelayan. Kepala Desa Oelua menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi nelayan bahwa nelayan-nelayan luar sudah pakai perahu motor, kami (nelayan Desa Oelua) hanya menonton. Akhirnya Kabupaten Rote Ndao diberi bantuan 75 buah kapal lengkap dengan alat-alat menangkap ikan. Kapal tersebut dibagi lima koperasi nelayan di seluruh kabupaten Rote Ndao. Desa nelayan Oelaba memperoleh 11 kapal. Semua kapal-kapal tersebut sudah ada di Ba'a hanya menunggu alat-alat tangkap ikan berupa jaring dari Jakarta.

Selain itu, masyarakat desa di Kabupaten Rote Ndao juga mendapat bantuan dana tunai berjumlah 100 juta rupiah. Desa Oelua, juga memperoleh bantuan dana tunai 100 juta rupiah. Dana ini akan dibagi menjadi dua, sebagian akan diberikan kepada petani darat dan sebagian lagi kepada nelayan. Dana ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan kegiatan mata pencaharian masyarakat baik petani maupun nelayan. Sehingga berpengaruh positif terhadap peningkatan aktivitas kerja, peningkatan pendapatan, dan bermuara pada kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Rote Ndao.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Kehidupan nelayan lintas batas sebelum pemekaran wilayah relatif lebih memprihatinkan dibandingkan setelah pemekaran. Nelayan memiliki keterbatasan pendidikan karena fasilitas belum ada. Pendidikan nelayan lintas batas yang ada di desa Oelua hampir sebagian besar hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar. Rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu penyebab rendahnya penghasilan para nelayan yang ada di desa Oelua. Bagi nelayan yang berasal dari daerah Rote khususnya dari Oelua dengan tingkat pendidikan rata-rata tamatan sekolah dasar banyak mengalami kendala dalam hal komunikasi. Tingkat pendidikan seperti ini sering menjadi penghambat ketika mereka berhadapan dengan polisi perairan Australia. Kendala seperti inilah yang menyebabkan banyak nelayan tradisional khususnya nelayan yang menangkap teripang di gugusan Pulau Pasir yang merupakan wilayah Australia ditangkap karena dianggap memasuki perairan Australia.

Setelah pemekaran wilayah menjadi kabupaten, fasilitas pendidikan di kabupaten Rote Ndao semakin berkembang juga, semakin banyak SMA Negeri maupun swasta serta ada perguruan tinggi swasta. Adanya fasilitas tersebut menyebabkan penduduk

desa lebih dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi sehingga anak-anak sudah mulai sekolah sampai SMA bahkan ada yang sarjana. Kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan semakin bertambah sehingga anak-anak nelayan sudah mulai memiliki pendidikan lebih tinggi dibandingkan orang tuanya.

Nelayan lintas batas di desa Oelua berasal dari Bajo dan asli Rote. Masyarakat nelayan yang ada di Desa Oelua sering melakukan upacara atau ritual, di antaranya ketika akan melaut atau selamatan perahu baru. Upacara selamatan biasanya dilakukan dengan berdzikir bersama para nelayan terutama masyarakat nelayan yang beragama Islam. Dzikir ini biasanya dipimpin oleh seorang ustadz. Dalam melakukan upacara ini sarana yang dipergunakan umumnya dengan beras yang dicampur dengan air kunyit atau beras kuning. Tujuan dari upacara ini adalah supaya perahu yang mereka gunakan dan pemiliknya mendapat keselamatan selama mereka melaut dan hasil yang didapat melimpah.

Pelaksanaan upacara ini biasanya dilakukan di atas sampan, ataupun di darat. Selama berdzikir mereka memanjatkan doa, dan diakhiri dengan penaburan beras kuning di atas perahu. Di samping upacara selamatan perahu baru, kelompok nelayan dari Desa Oelua juga melakukan upacara selamatan laut. Upacara ini selalu mereka laksanakan setiap tahun. Upacara ini dilakukan karena para nelayan percaya bahwa di laut ada penghuni yang tidak terlihat oleh mata. Adapun tujuan dilakukannya upacara ini agar hasil tangkapan berlimpah dan mereka mendapat perlindungan dan keselamatan selama melaut.

Setelah pemekaran wilayah perhatian pemerintah kabupaten terhadap budaya masyarakat semakin meningkat. Ada pencatatan warisan budaya tak benda oleh dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten untuk melestarikan budaya yang dimiliki misalnya: Sasando sudah menjadi WBTB Indonesia atau diakui secara nasional.

Pendapatan nelayan umumnya masih belum dapat melebihi kebutuhan sehari-hari dan kekurangan modal. Penghasilan sebesar 15 juta jika dibagi 12 bulan, maka penghasilan para nelayan ini

hanya sekitar 1.250.000 rupiah. Penghasilan ini tentulah sangat jauh dari ukuran cukup guna memenuhi keperluan hidup bagi keluarganya. Seorang nelayan yang terdiri dari 6 orang dalam satu keluarga sangat jauh untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.

Setelah pemekaran semakin bertambah fasilitas sehingga pendidikan semakin meningkat, perdagangan semakin bervariasi, sebagian besar nelayan memiliki mata pencaharian tambahan misalnya berdagang gula air, kue, kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan selama mereka belum dapat melaut.

Perubahan sosial nelayan lintas batas di desa Oelua sebelum dan setelah pemekaran secara signifikan dapat dirasakan oleh masyarakat. Sebelum pemekaran tahun 2002, masyarakat mengalami kesenjangan sosial yang relatif lebih besar dibandingkan setelah pemekaran. Prasarana dan sarana transportasi sebelum pemekaran relatif terbatas hanya dapat dicapai melalui laut setelah pemekaran dibangun bandara. Kualitas sumber daya manusia sebelum pemekaran relatif lebih rendah dibandingkan setelah pemekaran karena sarana pendidikan yang relatif lengkap. Kesehatan masyarakat dan sanitasi lingkungan relatif lebih rendah dibandingkan setelah pemekaran karena fasilitas kesehatan semakin lengkap adanya rumah sakit umum. Ketersediaan air terutama masyarakat pedalaman relatif sulit sebelum pemekaran dibandingkan setelah pemekaran karena adanya tangki-tangki air bantuan pemerintah. Kebijakan pembangunan belum optimal sebelum pemekaran dibandingkan setelah pemekaran karena jauh dari kota kabupaten.

Setelah pemekaran wilayah tahun 2002 dan sampai dengan 15 tahun kemudian pada saat penelitian ini tahun 2017, kehidupan nelayan lintas batas di daerah penelitian mengalami perubahan sosial: 1) pedagang kecil semakin bertambah; 2) nelayan lebih mudah menjual hasil tangkapan; 3) pendapatan nelayan meningkat; 4) kesejahteraan semakin meningkat; 5) perbaikan peralatan kerja nelayan menjadi relatif lebih cepat; 6) budi daya rumput laut berkembang; 7) peningkatan pendidikan; 8) pelayanan administrasi

lebih baik; 9) kesehatan dan kesadaran lingkungan meningkat; 10) perhatian pemerintah semakin meningkat.

Nelayan lintas batas di daerah penelitian juga semakin menyadari adanya aturan-aturan dari pemerintah Indonesia dan Australia yang mengikat mereka dalam berlayar dan mencari hasil laut sehingga semakin berkurang yang melanggar aturan dibandingkan sebelum pemekaran wilayah. Hal ini disebabkan sering atau intensifnya sosialisasi dan penyuluhan dari dinas kelautan dan perikanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial kehidupan nelayan di daerah penelitian diantaranya 1) Pembangunan pusat pemerintahan; 2) pembentuk an aparaturn pemerintahan; 3) pembangunan infrastruktur dan sarana jalan; 4) pengembangan bandara; 5) pengembangan pelabuhan; 6) promosi wisata; 7) pembangunan SPBU.

Faktor pendidikan yang semakin meningkat, fasilitas atau prasarana dan sarana transportasi, komunikasi, kesehatan dan perdagangan yang lebih baik, peraturan pemerintah, bantuan pemerintah lebih cepat diterima, seluruhnya tidak terlepas dari pemekaran wilayah kabupaten Rote Ndao.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Kehidupan nelayan lintas batas di daerah penelitian sudah mengalami perubahan signifikan namun masih perlu sosialisasi dan penyuluhan yang berkesinambungan supaya mereka mengetahui perkembangan peraturan pemerintah Indonesia dan Australia. Nelayan dapat mengetahui jenis hasil laut yang dilarang diambil, sehingga tidak melanggar aturan yang ditetapkan.

Nelayan juga dapat menjadi sumber daya yang ikut serta menjaga keamanan wilayah perbatasan khususnya sehingga perlu sosialisasi mengenai keamanan wilayah perbatasan negara kita bahkan pelatihan bela negara.

Pemerintah diharapkan dapat selalu meningkatkan kualitas sumber daya nelayan di daerah penelitian mengenai teknis berlayar

dan ketrampilan nelayan sehingga nelayan tidak ketinggalan teknologi dan informasi terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Brooke. 2011. “ Ekonomi Politik Masyarakat Nelayan Skala Kecil: Sebuah Studi Perbandingan Masyarakat Pendetang di Rote Ndao dan Jawa Timur”, **Laporan Hasil Penelitian**. ACICIS-FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Bungin. 2007. **Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial**. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Fathoni. 2006. **Antropologi Sosial Budaya**. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Indrawasih dan Wahyono. 2010. “Kerjasama Bilateral dalam Kerangka Penyelesaian Masalah Nelayan Pelintas Batas Perairan Indonesia-Australia”. **Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. V. No. 2 tahun 2010**. LIPI Press. Jakarta.
- Kadir. 2013. “Perkembangan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai(Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Kramat)”. **Skripsi S1**. Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan. 2009. **Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2009**. Kementrian Kelautan dan Perikanan Pusat Data Statistik dan Informasi. Jakarta.

- Kusnadi. 2007. **Jaminan Sosial Nelayan**. LKIS: Pelangi Aksara. Yogyakarta.
- Kutha Ratna. 2010. **Metodologi Penelitian “Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya”**.Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Malaikosa. 2010. “Makna Perayaan Limbe: Sebuah Penjelajahan Sosio-Antropologi terhadap Perayaan Limbe di Nusak Dengka, Rote Ndao, NTT”. **Thesis S-2**. PPS MSA UKSW. Salatiga
- Narwoko, dkk. 2006. **Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan**. Kencana. 2006
- Partogi. 2014. “Masalah Krusial di Kabupaten Kepulauan Terluar Rote Ndao”. **Jurnal Penelitian Politik. Volume 11 No 1 Juni 2014**. Sekjen DPR RI. Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S.2007. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Balai Pustaka. Jakarta.
- Retnowati. (2011). “Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum)” dalam **Perspektif Volume XVI No 3 Tahun 2011 Edisi Mei**. Jakarta
- Satria. 2009. **Ekologi Politik Nelayan**. LKIS: Pelangi Aksara. Yogyakarta.
- Ritzer dkk. 2004. **Teori Sosiologi Modern**. Kencana Prenada Media. Jakarta,
- Riwu Kaho.2005. **Orang Sabu dan Budayanya**. Jogja Global Media. Yogyakarta
- Simandjuntak. 2007. **Sosiologi Pembangunan**. Bina Ilmu. Jakarta.
- Soekanto. 2005. **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
- Soekanto. 2007. **Sosiologi Suatu Pengantar**. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.

Sztompka.2004. **Sosiologi Perubahan Sosial**. Prenada Media Grup. Jakarta.

Sztompka.2010. **Sosiologi Perubahan Sosial**. Bina Ilmu. Jakarta.

Wangke. 2013. "Perdagangan Lintas Batas Antar Negara: Memacu Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Belu". **Politica**, vol. 4, no.1, mei 2013.Jakarta

<http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/53/name/nusa-tenggara-timur/detail/5314/rote-ndao> diakses tanggal 10 Mei 2017.

ppsp.nawasis.info/sanitasi/pokja/kab.rotendaokab/bab1 diakses tanggal 6 januari 2017.

repository.uksw.edu/bitstream/123456789/4024/4/T1_712011026_BAB%20III.pdf oleh LMM Manuain - 2013 -1 diakses tanggal 22 Agustus 2017

www.rotendaokab.go.id diakses tanggal 7 Januari 2016

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Esau Loe
Usia : 47 tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : Dusun Lasilay, Desa Oelua
2. Nama : Samsul Aryej Therik
Usia : 35 tahun
Pendidikan : S1 Perikanan
Pekerjaan : Kepala Dusun Oelaba
Alamat : Dusun Oelaba, Desa Oelua
3. Nama : Demsy Y. Henuk
Usia : 34 tahun
Pendidikan : S1 Perikanan
Pekerjaan : Penyuluh Perikanan
Alamat : Desa Lelain, Rote Ndao
4. Nama : Rahman Ilagala
Usia : 50 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Nelayan

- Alamat : Dusun Oelaba, Desa Oelua
5. Nama : Laebo M
Usia : 42 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Dusun Oelaba, Desa Oelua
6. Nama : Lamadi Lahaya
Usia : 38 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Dusun Oelaba, Desa Oelua
7. Nama : Rudin Juma
Usia : 38 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Dusun Oelaba, Desa Oelua
8. Nama : Haji Rusli Marzuki
Usia : 60 tahun
Pendidikan : D1 Keperawatan
Pekerjaan : Pensiunan, Juragan
Alamat : Dusun Oelaba, Desa Oelua
9. Nama : Haji Latif
Usia : 62 tahun
Pendidikan : SR
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Dusun Oelaba, Desa Oelua
10. Nama : Maskur Mau
Usia : 32 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Nelayan

- Alamat : Dusun Oelaba, Desa Oelua
11. Nama : Eliasar Elmanafe
- Usia : 61 tahun
- Pendidikan : SD
- Pekerjaan : Nelayan
- Alamat : Dusun Oelaba, Desa Oelua

Nelayan lintas batas di Desa Oelua berasal dari Bajo dan asli Rote. Masyarakat nelayan yang ada di Desa Oelua sering melakukan upacara atau ritual, di antaranya ketika akan melaut atau selamatan perahu baru. Upacara selamatan biasanya dilakukan dengan berdzikir bersama para nelayan terutama masyarakat nelayan yang beragama Islam. Dzikir ini biasanya dipimpin oleh seorang ustadz. Dalam melakukan upacara ini sarana yang dipergunakan umumnya dengan beras yang dicampur dengan air kunyit atau beras kuning. Tujuan dari upacara ini adalah supaya perahu yang mereka gunakan dan pemiliknya mendapat keselamatan selama mereka melaut dan hasil yang didapat melimpah.

Pelaksanaan upacara ini biasanya dilakukan di atas sampan, ataupun di darat. Selama berdzikir mereka memanjatkan doa, dan diakhiri dengan penaburan beras kuning di atas perahu. Di samping upacara selamatan perahu baru, kelompok nelayan dari Desa Oelua juga melakukan upacara selamatan laut. Upacara ini selalu mereka laksanakan setiap tahun. Upacara ini dilakukan karena para nelayan percaya bahwa di laut ada penghuni yang tidak terlihat oleh mata. Adapun tujuan dilakukannya upacara ini agar hasil tangkapan berlimpah dan mereka mendapat perlindungan dan keselamatan selama melaut.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BALI

ISBN 978-602-7961-1



9 786027 961159

Perpustakaan
Jenderal